



#KOLABORASI
#MEDAN BERKAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024



Bobby Nasution
Wali Kota Medan



Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2



Aulia Rachman
Wakil Wali Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN

INSPEKTORAT

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, 20112
Laman inspektorat.medan.go.id, Pos-el inspektorat@medan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dan akan diperbaiki melalui SI-LPPD.

Medan, 24 Februari 2025

Inspektur,



Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196906101997031005

KATA PENGANTAR

puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan tuntunan dan karuniaNya, saat ini Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun 2024 dapat disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tepat pada waktunya.

Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan bahwa, salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 ini menyajikan; (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup; (i) capaian kinerja makro; (ii) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan (iii) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal selama tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini, menunjukkan bahwa : Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan DPRD Kota Medan dan Stakeholder lainnya, relative mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan hasil-hasil yang relatif optimal, sesuai dengan dukungan ketersediaan sumber daya Pembangunan yang dikelola, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan kota, juga masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang sepenuhnya belum dapat diatasi sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat lebih memupuk komitmen pemangku kepentingan pembangunan kota dan secara khusus keseluruhan aparatur Pemerintah kota untuk lebih bekerja keras dalam

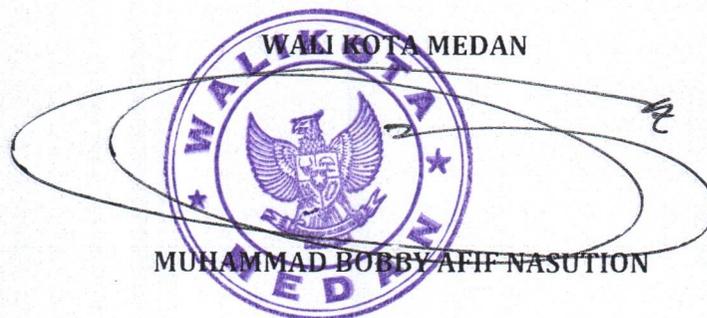
membangun Kota guna *"Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif"*

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan proses pembangunan kota selama ini, atas nama Pemerintah Kota Medan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Februari 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I - 2
b. Data Geografis Wilayah.....	I - 5
c. Informasi Umum Data Kependudukan.....	I -20
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I - 23
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	I -25
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I - 27
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I - 32
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	I - 44
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I - 90
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I - 90
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I - 91
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I - 93
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I- 117
1.1.3 Penetapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-175
a. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-175
b. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	I-170

	c. Gambaran Orientasi Dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Selama Satu Tahun Dalam Rangka Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran 2024.....	I-178
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..	II - 1
	2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II - 1
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	II - 2
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome).....	II - 2
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-14
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-16
	2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	II-17
	2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	II-18
	2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II-19
	2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	II-20
	2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	II-21
	2.3.6 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	II-28
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	III - 1
	3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III - 1
	3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Medan.....	III - 2
	3.2.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat Maupun Yang Ditugaskan Kepada Daerah Dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Memberikan Penugasan.....	III - 2
	3.2.2 Bidang Urusan Yang Ditugas Pembantuan.....	III - 2
	3.2.3 Jumlah Kegiatan.....	III - 3
	3.2.4 Anggaran Tugas Pembantuan.....	III - 5
	3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III - 8
	3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Medan.....	III - 9
	3.3.2 Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi Yang Ditugaskan Kepada Daerah.....	III-36
	3.3 Permasalahan dan Kendala.....	III-40
	3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	III-40
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV - 1

4.1	Urusan Pendidikan.....	IV - 1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 1
	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan	
4.1.2	Minimal Oleh Daerah.....	IV - 1
4.1.3	Alokasi Anggaran.....	IV - 2
4.1.4	Dukungan Personil.....	IV-13
4.1.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV-14
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV-14
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV- 14
	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan	
4.2.2	Minimal Oleh Daerah.....	IV- 15
4.2.3	Alokasi Anggaran.....	IV- 15
4.2.4	Dukungan Personil.....	IV- 16
4.2.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV- 17
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV- 18
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV- 18
4.3.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan	
	Minimal Oleh Daerah.....	IV- 18
4.3.3	Alokasi Anggaran.....	IV- 18
4.3.4	Dukungan Personil.....	IV- 19
4.3.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV- 20
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV- 21
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV- 21
4.4.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan	
	Minimal Oleh Daerah.....	IV- 21
4.4.3	Alokasi Anggaran.....	IV- 22
4.4.4	Dukungan Personil.....	IV- 22
4.4.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV- 24
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	
	Masyarakat.....	IV - 24
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV- 24
4.5.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan	
	Minimal Oleh Daerah.....	IV -24
4.5.3	Alokasi Anggaran.....	IV -22
4.5.4	Dukungan Personil.....	IV -25
4.5.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV -27
4.6	Urusan Sosial.....	IV -27
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV -28
	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan	
4.6.2	Minimal Oleh Daerah.....	IV -28
4.6.3	Alokasi Anggaran.....	IV -29

4.6.4	Dukungan Personil.....	IV -29
4.6.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV -30
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 1.1.	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan.....	I - 8
Tabel 1.2.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan.....	I - 9
Tabel 1.3.	Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya.....	I - 12
Tabel 1.4.	Persentase Kota Medan dalam DAS (%).....	I - 14
Tabel 1.5.	Kejadian Banjir Kota Medan	I - 16
Tabel 1.6.	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2022-2024.....	I - 20
Tabel 1.7.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2024.....	I - 22
Tabel 1.8.	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan dan Luas Wilayah Kota Medan	I - 24
Tabel 1.9.	Unit Kerja Perangkat daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I - 25
Tabel 1.10.	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I - 28
Tabel 1.11.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (rupiah).....	I - 33
Tabel 1.12.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Rupiah).....	I - 39
Tabel 1.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2024 (Rupiah).....	I - 42
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Makro Kota Medan Tahun 2023-2024.....	II - 1
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>) Kota Medan Tahun 2024.....	II - 2
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2024.....	II - 15
Tabel 2.4.	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	II - 17
Tabel 2.5.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	II - 18
Tabel 2.6.	Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2023-2024.....	II - 19
Tabel 2.7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemko Medan dan Target dalam RPJMD Tahun 2024.....	II - 20
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Medan Sesuai Kinerja yang Ditetapkan (Tapkin) Tahun Anggaran 2024 (Rp)	II - 21
Tabel 2.9.	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024.....	II - 28

Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024.....	III - 9
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024.....	III-14
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari BKKBN Pusat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024.	III-22
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024.....	III-31
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024.....	III-36
Tabel 4.1.1	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	IV -1
Tabel 4.1.3a.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV - 2
Tabel 4.1.3b.	Rencana & Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV - 2
Tabel 4.1.4.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pendidikan	IV -14
Tabel 4.1.5.	Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan	IV- 14
Tabel 4.2.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV- 15
Tabel 4.2.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV- 16
Tabel 4.2.4	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Kesehatan.....	IV- 17
Tabel 4.2.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan	IV- 17
Tabel 4.3.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV- 18
Tabel 4.3.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV- 19
Tabel 4.3.4.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	IV- 20
Tabel 4.3.4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	IV- 20
Tabel 4.3.4.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu	IV- 20
Tabel 4.3.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	IV- 21
Tabel 4.4.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV- 21
Tabel 4.4.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV- 22

Tabel 4.4.4.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	IV- 23
Tabel 4.4.4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	IV- 23
Tabel 4.4.4.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu	IV- 23
Tabel 4.4.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	IV- 24
Tabel 4.5.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV- 25
Tabel 4.5.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV- 26
Tabel 4.5.4.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV- 27
Tabel 4.5.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat	IV- 27
Tabel 4.6.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV- 28
Tabel 4.6.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV- 29
Tabel 4.6.4	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Sosial	IV- 29
Tabel 4.6.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial	IV- 30

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	JUDUL	HALAMAN
Gambar 1.1.	Peta Kota Medan.....	I - 6
Gambar 1.2.	Peta Penggunaan Lahan Kota Medan.....	I - 7
Gambar 1.3.	Peta Geologi Kota Medan.....	I-10
Gambar 1.4.	Peta Hidrogeologi Kota Medan.....	I-12
Gambar 1.5.	Peta DAS Belawan, Deli, dan Percut.....	I-13
Gambar 1.6.	Grafik Kejadian Kebakaran Kota Medan.....	I-15
Gambar 1.7.	Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2021-2023.....	I-21
Gambar 1.8.	Piramida Penduduk Kota Medan Tahun 2023 Semester I.....	I-22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 dalam Pasal 1 dikemukakan bahwa Medan, dengan nama Kota Besar Medan, memiliki batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Medan" dahulu (Staatsblad 1938 No. 715) termaksud dalam Staatsblad 1921 No. 772 setelah diubah dengan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tanggal 14 November 1951 No. 66/III/PSU. Kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis Kota Medan saat ini dan masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari dimensi historis yang cukup panjang, dimulai dari dibangunnya kawasan Kampung Medan Puteri pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus dan berkembang menjadi Kesultanan Deli tahun 1669. Selanjutnya Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis saat ini dan masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari dimensi historis yang cukup panjang, dimulai dari dibangunnya kawasan Kampung Medan Puteri pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus dan berkembang menjadi Kesultanan Deli tahun 1669. Perkembangan Kota Medan selanjutnya ditandai dengan perpindahan ibukota Residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan tahun 1887, dan akhirnya tahun 1915 statusnya diubah menjadi Gubernemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur

Berdasarkan pertimbangan dinamika dan prospek pembangunan kota secara regional pada masa yang akan datang, maka, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 Tanggal 29 September 1951 yang menetapkan luas wilayah Kota Medan menjadi 5.130 Ha yang meliputi 4 (empat) Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan tersebut dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951 agar wilayah Kota Medan diperluas menjadi 3 (tiga) kali lipat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kodya Medan, Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Kemudian, melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD Tanggal 5 Mei 1986, dengan luas administrasi yang sama, dilakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 Tanggal 30 September 1996 Tentang Pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II, Medan dimekarkan kembali menjadi 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan dan 2.001 Lingkungan, dan Struktur administratif Pemerintah

Kota Medan tersebut menjadi landasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai saat ini. Kemudian Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 Wilayah Daerah ditetapkan seluas kurang lebih 28.199 (dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan) hektar. Pemekaran kecamatan dan kelurahan tersebut tentunya dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum yang diselenggarakan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian tujuan besar dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, diharapkan agar dapat segera terwujud nyata. Sesuai amanat Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas-tugas pemerintahan umum lainnya. Lebih lanjut bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 11 ayat (2), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Peraturan perundang - undangan yang mendasari pembentukan daerah dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah, berpedoman kepada:

- 1) Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7) Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan nomor 4);
- 20) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
- 21) Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15);
- 22) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
- 23) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan nomor 1);

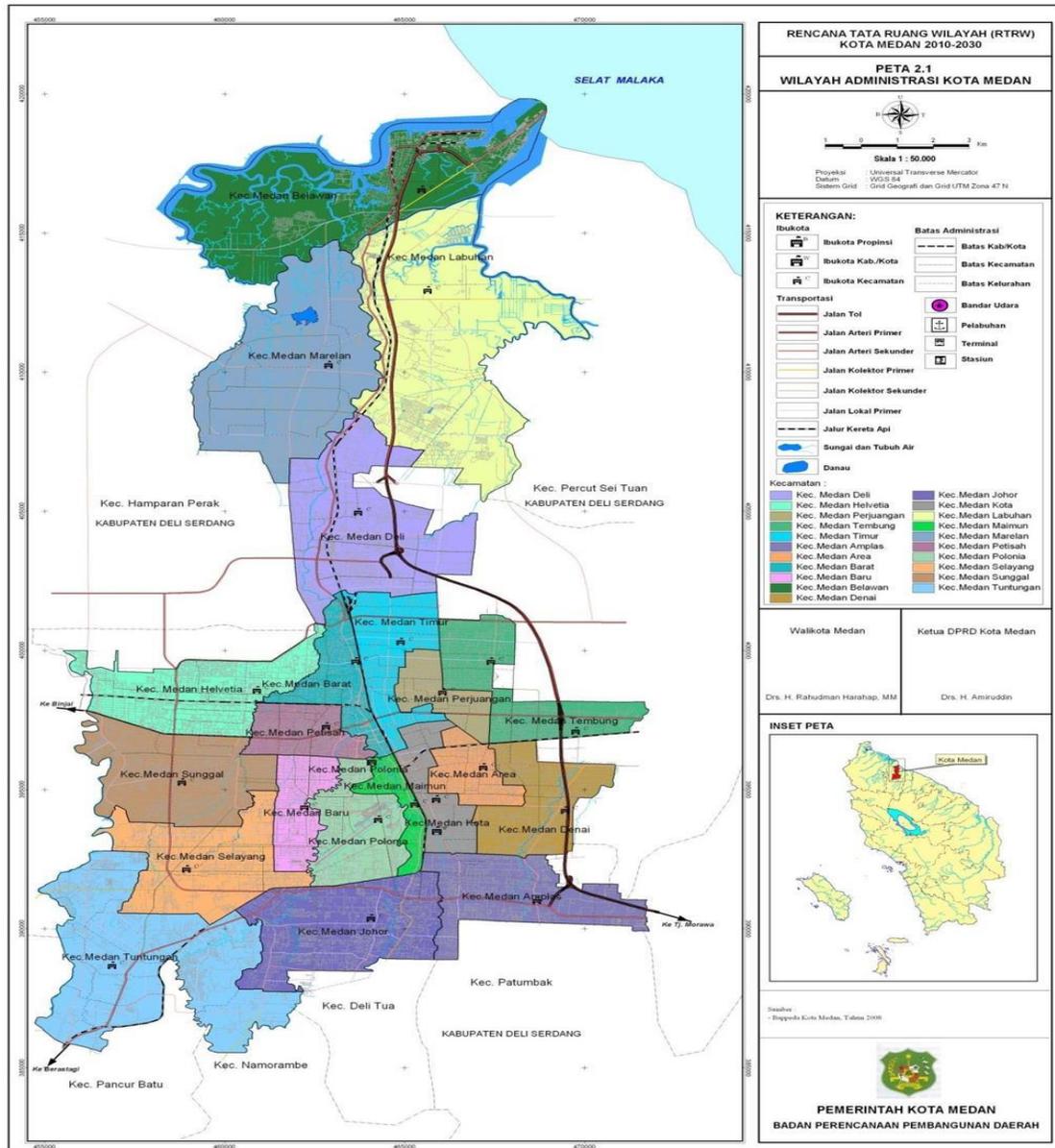
- 24) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 8);
- 25) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
- 26) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2016; (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7); dan
- 27) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 28) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 99)

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Medan terletak diantara koordinat 3° 27'-3° 47' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Kota Medan terletak di posisi pantai Timur Sumatera Utara yang bagian Utara merupakan daerah pesisir. Dengan demikian, Kota Medan termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi kemaritiman yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut

Gambar 1.1
Peta Kota Medan

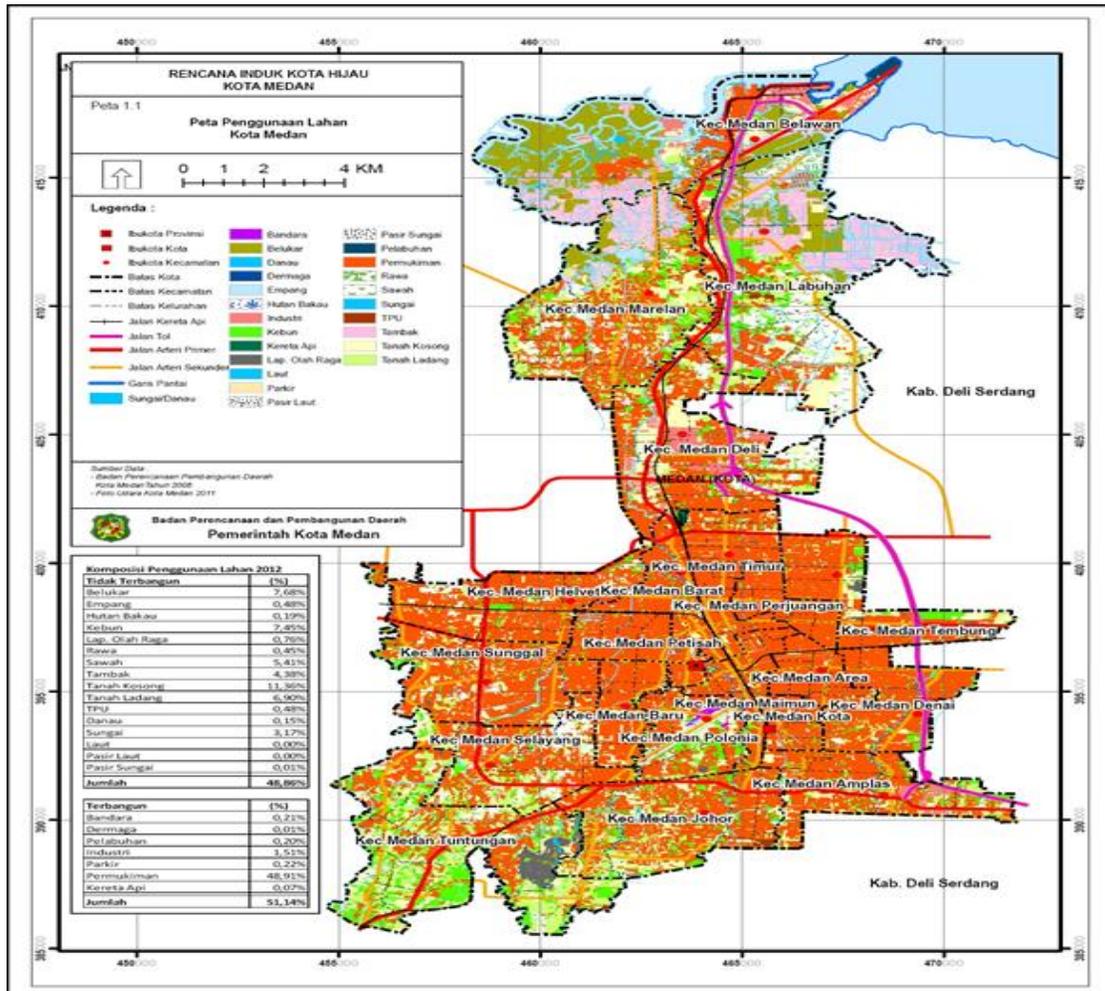


2. Topografi dan Guna Lahan

Kondisi topografi Kota Medan sebagian besar merupakan dataran rendah atau landai dengan ketinggian 0 - 92 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah antara 0 - 2 %. Fisiografi Kota Medan menunjukkan bentuk permukaan lahan datar yang membentang dari Utara ke Selatan, berdasarkan fisiografi wilayah Kota Medan tersebut mempunyai topografi datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Kondisi ini sebetulnya memudahkan bagi pengembangan kawasan perkotaan

karena mempunyai kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman. Wilayah Kota Medan yang paling tinggi berada pada Kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Medan Johor dengan elevasi 70-92 mdpl. Sedangkan wilayah yang paling rendah berada pada Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan yang merupakan daerah yang dekat dengan Selat Malaka sebagai muara dari dua sungai besar, yaitu Sei Deli dan Sei Belawan. Wilayah dengan topografi datar dengan tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi memiliki potensi pengembangan wilayah yang sangat tinggi, namun sebagai faktor pembatas lingkungan pada beberapa kawasan cukup sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering menjadi potensi langganan genangan/banjir.

Gambar 1.2.
Peta Penggunaan Lahan Kota Medan



Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan

No	Elevasi	Luas (Ha)	%	Kondisi dan Potensi Lingkungan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	0 - 5 Mdpl	9.606,67	34.07	Elevasi < 500 mdpl mengindikasikan wilayah tersebut memiliki potensi kemampuan lahan untuk dikembangkan yang tinggi dengan faktor penghambat hidrologis permukaan pada kerentanan terhadap wilayah rawan banjir
2	5-10 Mdpl	1.659,73	5.89	
3	10-20 Mdpl	4.265,69	15.13	
4	20-30 Mdpl	6.435,72	22.82	
5	30-40 Mdpl	3.479,69	12.34	
6	40-50 Mdpl	1.798,48	6.38	
7	50-60 Mdpl	667,82	2.37	
8	70-80 Mdpl	260,78	0.92	
9	80-92 Mdpl	24,89	0.09	
Total (Ha)		28.199,47	100.00	

Sumber: Analisis Interpolasi Spasial DEMNAS, 2017

Beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah Kota Medan ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Kota Medan. Pembangunan fisik di Kota Medan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan perumahan, gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian di Kota Medan.

Pola penggunaan lahan di Kota Medan pada umumnya sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk penggunaan lahan pemukiman. Selain penggunaan pemukiman, pola penggunaan lahan lainnya yang tinggi adalah pola penggunaan lahan perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum lainnya tersebar di seluruh wilayah Kota Medan, pola penggunaan lahan Kota Medan meliputi kawasan terbangun sebesar 60,5% sedangkan kawasan non terbangun sebesar 39,5% dengan luas kawasan non terbangun terbesar berada pada wilayah utara Kota Medan.

Perubahan kondisi penggunaan lahan di Kota Medan sangat dinamis, perkembangan kota yang cenderung mengarah ke bagian utara wilayah Kota Medan. Untuk kawasan selatan wilayah Kota Medan juga harus dapat mengendalikan perkembangan kota, mengingat di wilayah tersebut merupakan daerah yang diharapkan menjadi daerah resapan wilayah Kota Medan. Hal ini juga sedianya disertai dengan mendorong pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan dengan konsep bangunan vertikal.

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
Kawasan Non Terbangun		11.146,81	39.5
1	Badan Air	1,309.36	4.6
2	Sawah	620.07	2.2
3	Semak Belukar	3,842.09	13.6
4	Taman	458.20	1.6
5	Tambak/Kolam	1,544.37	5.5
6	Belukar Sempadan Danau	22.75	0.1
7	Belukar Sempadan Sungai	352.44	1.2
8	Hutan Kota	24.71	0.1
9	Ladang/Tegalan	1,462.84	5.2
10	Mangrove	1,349.53	4.8
11	Pemakaman	160.44	0.6
Kawasan Terbangun		17.052,67	60.5
1	Badan Jalan	547.77	1.9
2	Industri/Pergudangan	1,506.62	5.3
3	Perdagangan dan Jasa	1,830,23	6.5
4	Perkantoran	131.89	0.5
5	Perkebunan	420.58	1.5
6	Permukiman	11,599.01	41.1
7	Pertahanan dan Keamanan	227.75	0.8
8	Sarana Pelayanan Umum	788.81	2.8
Jumlah		28.199,47	100.00

Sumber: RTRW Kota Medan 2022-2042

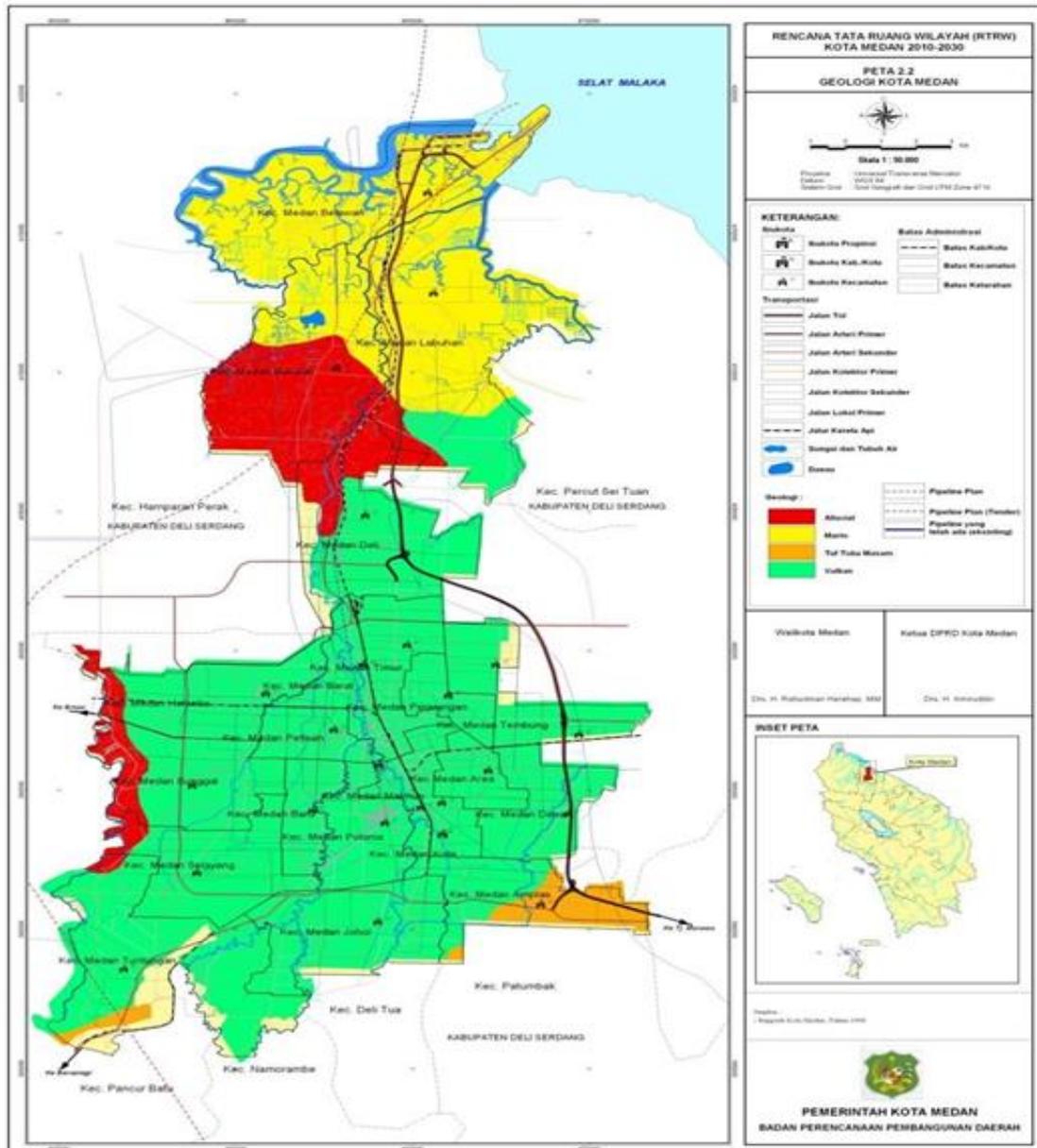
3. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial, 2) grup Marin, 3) grup Vulkan, 4) grup Tufa Masam beserta satuan lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini :

1. Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir disekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar didekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan perkebunan negara.

Gambar 1.3.
Peta Geologi Kota Medan



2. Grup Marin

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara). Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda). Areal ini umumnya mempunyai

drainase terhambat dan sebagian besar tanahnya belum matang (*unripe*) dan setengah matang (*halfripe*). Areal yang berdekatan dengan pantai setempat ditemukan tanah silfat masam potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan. Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa, dengan jenis vegetasi Bakau (*Rhizophora*, sp), Api-api (*Avicennia*, sp), Lenggede (*Bruguiera parviflora*). Areal ini sebagian besar telah digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang umumnya ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata Pantai

3. Grup Vulkan

Grup Vulkan ini umumnya berasal dari vulkan muda berumur kuartar dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi, dengan bahan utama berupa tuf masam dan intermedier. Hasil erupsi kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa Toba masam. Ketebalan abu vulkan Sibayak dan Sinabung makin tebal kearah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Vulkan ini mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan dan Binjai memanjang kearah Kabanjahe.

4. Grup Tufa Masam

Grup ini terbentuk dari aliran abu vulkan hasil erupsi vulkan Toba pada masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (*welded*) terutama di dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan vulkan masam yang sangat luas sebelum pada masa kuartar. Fisiografi ini mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau Toba.

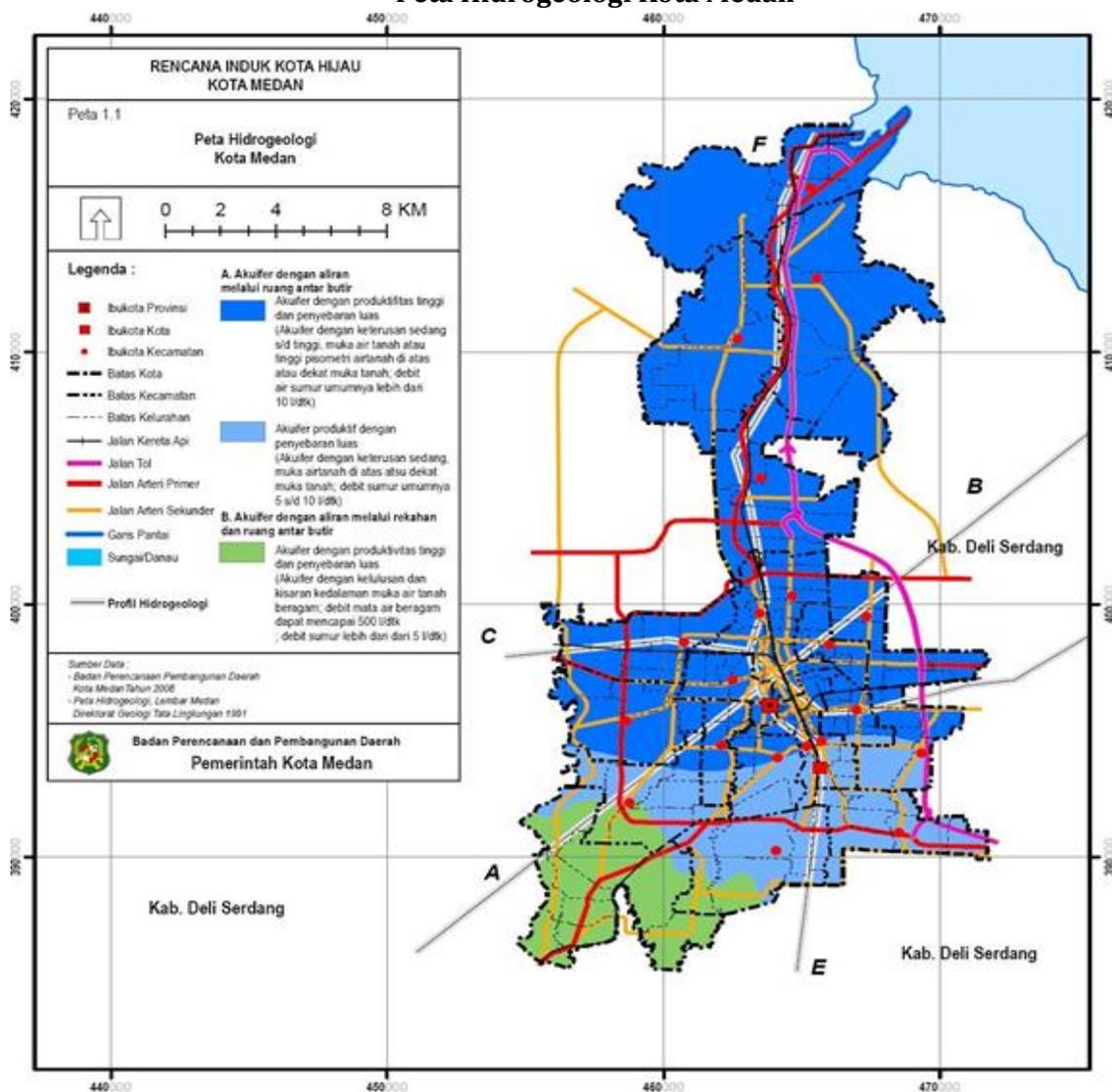
5. Air Tanah

Data tentang air tanah yang ada sangat terbatas, dalam studi yang dilaksanakan oleh C. Lotti & Association Consulting Engineer, kawasan Medan dan sekitarnya dapat dibagi dalam tiga klasifikasi mengenai existing kandungan air tanahnya yang disebut zona. Secara detail dapat dilihat dalam peta *Ground Water Recharge*, yaitu terdiri dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Zona 1 meliputi daerah kawasan pantai, dengan koefisien rechargenya 0,15, zona 2 Medan formasi dengan lapisan *permeal sand over day* dengan koefisien rechargenya 0,25, kawasan vulkan dengan koefisien recharge 0,2. *Ground Water Recharge* tersebut menurut zona tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut

Tabel 1.3.
Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya

Zona	A(km ²)	Mar (m/y)	C	Ground Water In / l/s/km ²
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Zona I	761	1,50	0,15	7,1
Zona 2	616	1,75	0,25	13,8
Zona 3	464	2,50	0,20	15,9

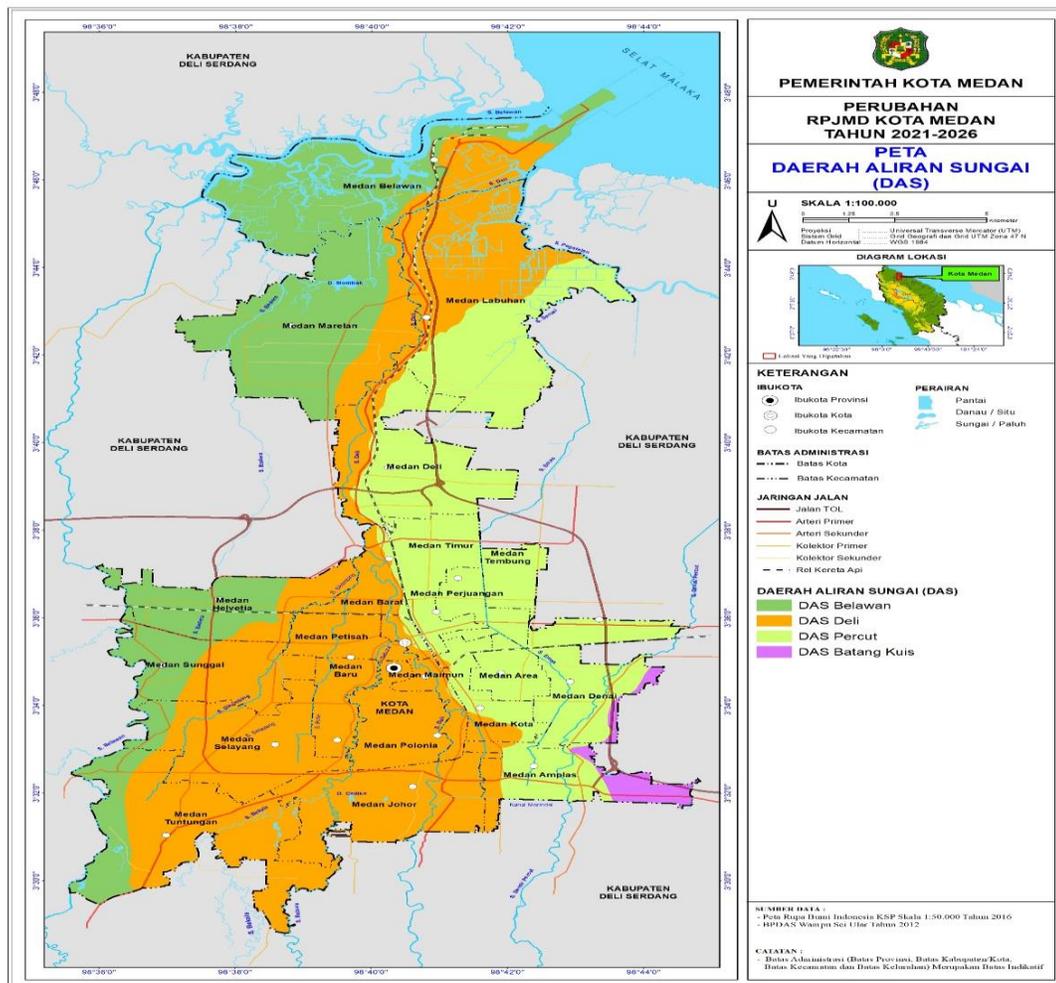
Gambar 1.4.
Peta Hidrogeologi Kota Medan



1. Hidrologi dan Klimatologi

Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya yang secara sistem berada pada Keberadaan sungai – sungai tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan bagi sistem drainase perkotaan. Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan– Ular – Padang dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS Deli sebesar 31.14% dan DAS Percut sebesar 20.48%.

Gambar 1.5.
Peta DAS Belawan, Deli, dan Percut



Tabel 1.4.
Persentase Kota Medan dalam DAS (%)

No.	DAS	Luas Total DAS (Ha)	Luas Administrasi Kota Medan dalam DAS (Ha)	Persentase Kota Medan dalam DAS (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Belawan	37.803,35	11.772,70	31,14%
2.	Deli	74.763,45	8.434,06	11,28%
3.	Percut	37.280,07	7.634,77	20,48%
4	DAS Batang Kuis	14.196,87	357,94	2,52%
Total		164.043,75	28.199,47	17,19%

Sumber: BPDAS Wampu – Sei Ular

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya yaitu 17.6°C dan suhu maksimum yaitu 37.0°C. Untuk tahun 2023 kondisi suhu rata-rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (*global warming*). Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 79.68%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 3.99 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 117.5 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2023 per bulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 291.2 mm. Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini ditambah seringnya terjadi cuaca ekstrem menyebabkan cukup potensial berdampak besar terhadap kondisi Kota Medan disebabkan sungai-sungai yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui normalisasi sungai. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan banjir/genangan air, termasuk banjir rob akibat pasang surut air laut antara lain di kecamatan – kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap hal ini adalah dengan melakukan pembangunan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

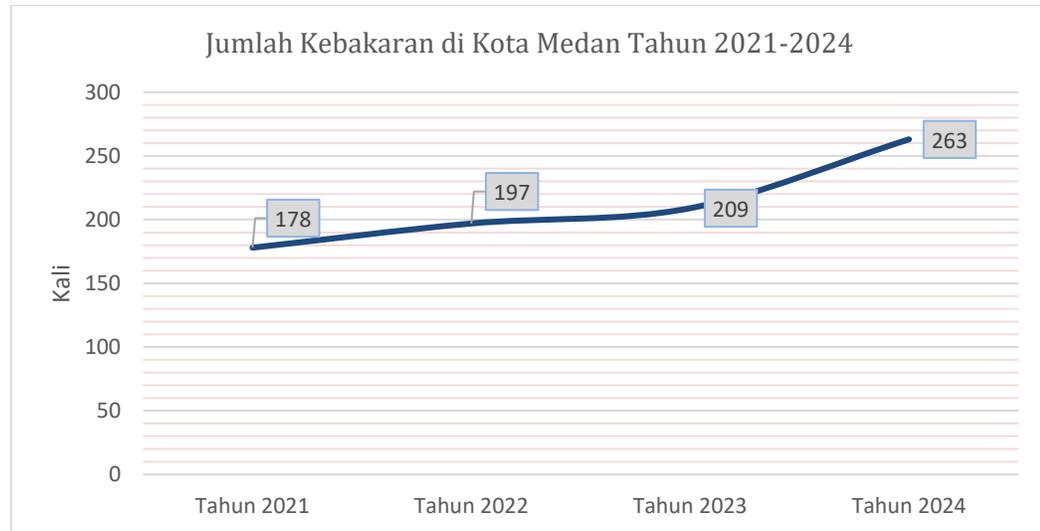
2. Wilayah Rawan Bencana

Secara geologis Kota Medan kecil potensinya dalam bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan, kecamatan yang rawan kebakaran adalah, Kecamatan Medan Area, Medan Deli, Medan Johor, Medan Petisah, Medan Timur, Medan Amplas dan Medan Sunggal. Adapun yang menjadi penyebab kebakaran diantaranya adalah listrik, kompor/gas, rokok, lilin, penyelamatan dan lain-lain. Menurut catatan, kerugian akibat kebakaran terbesar pada tahun 2020

mencapai Rp 101,556 milyar. Sedangkan berdasarkan data jumlah kejadian jumlah kebakaran sejak tahun 2021 terus mengalami penurunan sampai tahun 2024.



Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2019-2023

Gambar 1.6: Grafik Kejadian Kebakaran Kota Medan

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Medan ternyata dari kawasan terdampak tidak ada nilai total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Medan. Sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kecamatan di Kota Medan terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 16,09 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Sedang. Kecamatan yang terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 11,40 Ha

2. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Kerawanan banjir sedang terdapat pada Kecamatan Medan Johor, Medan Amplas, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Petisah, Medan Perjuangan, dan Medan Labuhan. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebahagian Kecamatan Medan Marelan.

Tabel 1.5. Kejadian Banjir Kota Medan

No	Nama Sungai	Waktu Kejadian Banjir	Catatan
1	Sungai Belawan dan Sungai Deli/Babura	14 Januari 2002	Beberapa rumah dibantaran sungai hanyut, dan penduduk diungsikan. Bandara Udara Polonia tidak beroperasi selama 12 jam.
2	Sungai Belawan, Sungai Deli/Babura	6 Januari 2011	Atap rumah di bantaran Sungai Babura terendam
3	Sungai Deli/Babura	28 Oktober 2013	Ribuan rumah terendam, perkuliahan di kampus USU terganggu.
4	Sungai Deli/Babura	25 November 2015	Lima Kecamatan tergenang, ratusan warga mengungsi
5	Sungai Deli/Babura	16 September 2018 dan 18-19 Oktober 2018.	Banjir sungai disertai banjir permukiman, banjir dimana-mana.
6	Sungai Belawan	25 Desember 2020	Banjir sungai disertai banjir permukiman di daerah perbatasan Deli Serdang dan Medan Tuntungan

Sumber : Dinas PU

Lokasi – lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi sepanjang sungai yang belum dinormalisasi dan daerah tersebut pada kenyataan berada pada dataran banjir (flood plain). Hal ini juga diperburuk dengan sistem drainase perkotaan yang belum memadai. Kondisi topografi wilayah Kota Medan yakni dari arah Selatan ke arah Utara (mengikuti arah aliran sungai) memiliki kemiringan lahan yang cukup memadai untuk mengakomodasi sistim aliran gravitasi. Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, pada tahun 2022 Kota Medan memiliki 2.575 titik genangan. Sedangkan jumlah titik genangan yang telah di tangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.958 Titik genangan sehingga menyisakan 617 titik genangan lagi yang perlu ditangani. Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana banjir di Kota Medan total luas bahaya banjir di Kota Medan secara keseluruhan adalah 573,46 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14,02 Ha, kelas sedang seluas 356,15 Ha, sedangkan luas yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 203,29 Ha

3. Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Kota Medan pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri atas kelas rendah, sedang, dan tinggi. Potensi luas bahaya banjir bandang di Kota Medan adalah 376,87 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 69,47 Ha, kelas sedang seluas 181,63 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 125,77 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 13,89 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir bandang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 24,35 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 15,16 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini

4. Rawan kejadian Angin Puting Beliung dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung merupakan fenomena cuaca yang berupa angin kencang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Angin puting beliung sering kali terjadi dalam badai petir atau badai yang kuat. Biasanya, angin puting beliung menyebabkan kerusakan yang cukup besar, termasuk kerusakan pada bangunan, pepohonan, dan infrastruktur.

Angin puting beliung terbentuk ketika angin di daerah tertentu mengalami perubahan arah dan kecepatan secara tiba-tiba. Ini bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu atau tekanan udara di area tersebut. Ketika angin berputar-putar dengan kecepatan tinggi, ia membentuk kolom udara yang berputar vertikal. Pada bagian bawah kolom ini, udara menjadi sangat tidak stabil dan menyebabkan angin kencang yang berputar.

Pada tahun 2022 jumlah kejadian angin puting beliung di Kota Medan sebesar 17 kejadian, angka ini menurun sebanyak 5 kejadian. Angka kejadian puting beliung tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 kejadian. Sebagai upaya mitigasi serta mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana angin puting beliung pemerintah dapat melakukan : Membangun sistem pemantauan cuaca yang efektif dan menerima peringatan dini tentang adanya potensi angin puting beliung sangat penting, menghindari

membangun rumah di daerah rawan angin puting beliung atau mempertimbangkan konstruksi berkekuatan tinggi di daerah dengan risiko tinggi.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan, total luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan secara keseluruhan adalah seluas 28.312,31 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, yang terdampak cuaca ekstrim hasil analisisnya hanya berada pada kelas sedang seluas 21.125,05 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 7.187,25 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 1.795,37 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 2.094,79 Ha.

5. Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuh batuan. Dari penjelasan bencana gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya gempa bumi di Kota Medan, potensi luas bahaya gempa bumi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 23.312,31 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya gempa bumi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 21.027,09 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 7.285,21 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya gempa bumi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya gempa bumi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya gempa bumi adalah Kecamatan Medan Belawan dengan luas 3.057,34 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 1.143,06 Ha

6. Bahaya Likuifaksi

Likuifikasi adalah fenomena geoteknik yang terjadi ketika material tanah jenuh dengan air kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba akibat guncangan gempa bumi

atau tekanan yang diberikan pada tanah. Hal ini terutama terjadi pada material seperti pasir jenuh, lumpur, atau endapan yang memiliki struktur pori-pori yang longgar dan terisi air.

Ketika guncangan gempa bumi terjadi, tanah yang jenuh air dapat mengalami peningkatan tekanan pori akibat getaran. Tekanan pori ini menyebabkan gaya gesekan antar partikel tanah berkurang, sehingga tanah kehilangan kekuatan dan perilakunya berubah menjadi cairan yang mengalir. Efek ini disebut sebagai likuifikasi.

Dalam keadaan likuifikasi, tanah yang semula padat dan stabil berubah menjadi cairan yang tidak mampu menahan beban atau tekanan. Likuifikasi dapat menyebabkan tanah dan struktur di atasnya, seperti bangunan, jembatan, atau infrastruktur lainnya, menjadi tidak stabil atau terjerembab. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan bahkan kecelakaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya likuifaksi di Kota Medan, Total luas bahaya likuifaksi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 17.345,55 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya likuifaksi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 7185,63 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 10.159,92 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya likuifaksi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya likuifaksi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 3.017,98 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 1.556,11 Ha

7. Bahaya Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti halnya Kota Medan yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya

tsunami di Kota Medan, Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kota Medan yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Potensi luas bahaya tsunami di Kota Medan secara keseluruhan adalah 8,98 Ha dan berada pada kelas Rendah yang tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Belawan dan Medan Labuhan di Kota Medan. Jika dilihat dari luas bahaya tsunami tertinggi pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Belawan seluas 8,71 Ha

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah Penduduk, Tempat/Lokasi, dan Pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang kurang didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya. Lebih lanjut, kondisi dan dinamika demografis Kota Medan Tahun 2022-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.6. dan gambar berikut.

Tabel 1.6.
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kota Medan Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = ([2]/[4])
2022	2,528.065	0.094	281.99	8.965
2023	2,530,493	0.096	281.99	8.974
2024	2.539.829	0.369	281.99	9.007

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Gambar 1.7: Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2022-2024

Dari Tabel 1.6 di atas tampak bahwa jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 0.186 persen sejak tahun 2022-2024, peningkatan ini akan berdampak pada kepadatan penduduk walaupun luas wilayah Kota Medan pada tahun 2024 mengalami perubahan yakni dari sebesar 265.1 Km² menjadi 281.99 Km². Dapat dijelaskan bahwa, peningkatan jumlah penduduk kota tahun 2022-2024 disebabkan adanya peningkatan fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar dari pada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Medan. Dengan jumlah penduduk yang masih relatif besar yang diperkirakan mencapai 2.539.829 jiwa pada tahun 2024, maka secara demografis, Kota Medan masih memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar sehingga menjadi daya tarik (*full factors*) untuk mencari pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan kota

Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang. Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan komposisi umur penduduk. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-lak semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Adapun komposisi umur penduduk Kota Medan Tahun 2024 dapat diuraikan pada Tabel 1.7. dan Gambar 1.8 berikut ini.

Tabel 1.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0 - 4	67,061	62,379	129,440	5.10
5 - 9	104,665	97,338	202,003	7.95
10 -14	114,633	107,110	221,743	8.73
15 - 19	113,440	107,101	220,541	8.68
20 - 24	111,907	106,634	218,541	8.60
25 - 29	103,877	100,779	204,656	8.06
30 - 34	100,585	98,400	198,985	7.83
35 - 39	97,684	96,423	194,107	7.64
40 - 44	99,333	100,221	199,554	7.86
45 - 49	83,319	88,170	171,489	6.75
50 - 54	74,282	81,586	155,868	6.14
55 - 59	63,364	71,097	134,461	5.29
60 - 64	47,780	56,481	104,261	4.11
65 - 69	35,955	43,033	78,988	3.11
70 - 74	22,401	27,724	50,125	1.97
≥75	21,117	33,950	55,067	2.17
Jumlah	1,261,403	1,278,426	2,539,829	100.00

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



Gambar 1.8. Piramida Penduduk Kota Medan Tahun 2024 Semester I

Dari Tabel 1.7. di atas tampak bahwa, apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Medan tahun 2024 secara berturut-turut paling banyak berumur 10-14 tahun yaitu 221,743 jiwa atau sebanyak 8.73 persen, kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 220,541 jiwa atau sebanyak 8.68 persen, kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 218,541 jiwa atau sebanyak 8.60 persen, kelompok berumur 25-29 tahun yaitu 204,656 jiwa atau sebanyak 8,06 persen, kemudian berumur 5-9 tahun yaitu 202,003 jiwa atau sebanyak 7,95 persen, kemudian diikuti yang berumur 40-44 tahun yaitu 199,554 jiwa atau sebanyak 7,86 persen, kemudian dengan kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 198,985 jiwa atau sebanyak 7.83 persen, kemudian berumur 35-39 tahun yaitu 194,107 jiwa atau sebanyak 7.64 persen, kemudian berumur 45-49 tahun yaitu 171,489 jiwa atau sebanyak 6.75 persen, kemudian diikuti yang berumur 50-54 tahun yaitu 155,868 jiwa atau sebanyak 6.14 persen, kemudian dengan kelompok umur 55-59 tahun sebanyak 134,461 jiwa atau sebanyak 5.29 persen, kemudian berumur 0-4 tahun yaitu 129,440 jiwa atau sebanyak 5,10 persen, kemudian berumur 60-64 tahun yaitu 104,261 jiwa atau sebanyak 4,11 persen, kemudian diikuti yang berumur 65-69 tahun yaitu 78,988 jiwa atau sebanyak 3.11 persen, kemudian diikuti yang berumur 75 tahun atau lebih yaitu 55,067 jiwa atau sebanyak 2,17 persen dan yang berumur 70-74 tahun yaitu 50,125 jiwa atau sebanyak 1,97 persen. Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2024 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Wilayah administratif Kota Medan pada tahun 2024 memiliki luas 281.99 Km² yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Dengan mengacu Selanjutnya jumlah kecamatan dan Kelurahan serta luas administratif Kota Medan untuk tiap Kecamatan dapat disajikan pada tabel 1.8. berikut:

Tabel 1.8.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan dan Luas Wilayah Kota Medan

No	Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas (Ha)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Medan Tuntungan	9	75	2,515.90	8.92
2	Medan Johor	6	81	1,672.81	5.93
3	Medan Amplas	7	77	1,065.05	3.78
4	Medan Denai	6	82	936.53	3.32
5	Medan Area	12	172	424.09	1.50
6	Medan Kota	12	146	574.70	2.04
7	Medan Maimun	6	66	302.08	1.07
8	Medan Polonia	5	46	877.18	3.11
9	Medan Baru	6	64	542.89	1.93
10	Medan Selayang	6	63	1,644.75	5.83
11	Medan Sunggal	6	88	1,326.38	4.70
12	Medan Helvetia	7	88	1,305.49	4.63
13	Medan Petisah	7	69	528.02	1.87
14	Medan Barat	6	98	633.50	2.25
15	Medan Timur	11	128	889.41	3.15
16	Medan Perjuangan	9	128	453.66	1.61
17	Medan Tembung	7	95	785.21	2.78
18	Medan Deli	6	105	1,833.11	6.68
19	Medan Labuhan	6	99	3,508.71	12.44
20	Medan Marelan	5	88	3,003.01	10.65
21	Medan Belawan	6	143	3,326.99	11.80
Jumlah		151	2.001	28.199	100.00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2022-2042.

Dengan mengacu Tabel 1.8. tersebut di bawah ini dapat dikemukakan bahwa luas wilayah setiap kecamatan relatif bervariasi. Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan terluas, kemudian disusul Kecamatan Medan Belawan, dan Medan Marelan. Berdasarkan luas wilayah dan perkembangan dinamika sosial ekonomi yang ada sampai saat ini, maka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka secara hipotesis ada baiknya beberapa kecamatan dan kelurahan yang memiliki potensi ekonomi dan wilayah yang relatif luas dapat dimekarkan secara terencana sampai ke tingkat lingkungan.

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Kota Medan adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun perangkat daerah Kota Medan terdiri dari: (a) sekretariat Daerah; (b) sekretariat DPRD; (c) inspektorat; (d) dinas; (e) badan; dan (f) kecamatan dengan unit kerja dan jumlah pegawai pemerintah diuraikan pada tabel 1.9. berikut ini.

Tabel 1.9.

Unit Kerja Perangkat daerah serta dasar Huukum Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2024

No.	SKPD	Dasar Hukumn
[1]	[2]	[3]
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
3	Inspektorat	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
6	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
9	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
10	Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
11	Dinas Ketenagakerjaan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
14	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022

No.	SKPD	Dasar Hukumn
[1]	[2]	[3]
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
16	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
21	Dinas Parawisata	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
26	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
30	Kecamatan Medan Sunggal	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
31	Kecamatan Medan Timur	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
32	Kecamatan Medan Tuntungan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
33	Kecamatan Medan Petisah	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
34	Kecamatan Medan Labuhan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
35	Kecamatan Medan Barat	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
36	Kecamatan Medan Maimun	Peraturan Daerah Kota

No.	SKPD	Dasar Hukumn
[1]	[2]	[3]
		Medan Nomor 8 Tahun 2022
37	Kecamatan Medan Deli	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
38	Kecamatan Medan Kota	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
39	Kecamatan Medan Denai	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
40	Kecamatan Medan Amplas	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
41	Kecamatan Medan Area	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
42	Kecamatan Medan Helvetia	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
43	Kecamatan Medan Perjuangan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
44	Kecamatan Medan Selayang	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
45	Kecamatan Medan Tembung	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
46	Kecamatan Medan Baru	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
47	Kecamatan Medan Johor	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
48	Kecamatan Medan Polonia	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
49	Kecamatan Medan Marelan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022
50	Kecamatan Medan Belawan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.

Jumlah aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2024 disajikan pada tabel 1.10 berikut.

Tabel 1.10

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan	15	46	123	184
2	Sekretariat DPRD	Administrasi Pemerintahan	6	7	37	50
3	Inspektorat	Administrasi Pemerintahan	7	57	8	72
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	17	101	183	301
5	Dinas Kesehatan	Kesehatan	38	18	225	281
6	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	10	154	181
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9	10	117	136
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	17	3	35	55
9	Dinas Sosial	Sosial	6	6	31	43
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25	61	45	131
11	Dinas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	8	31	17	56

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	17	55	81
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Ketahanan Pangan	20	41	65	126
14	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	10	11	88	109
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	8	8	83	99
16	Dinas Perhubungan	Perhubungan	21	4	197	222
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	9	13	25	47
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	3	22	95	120
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10	56	15	81

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Perindustrian, dan Perdagangan					
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	7	11	35	53
21	Dinas Parawisata	Parawisata	6	8	21	35
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan	6	25	37	68
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	7	27	15	49
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	8	30	30	68
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	15	3	33	51
26	Badan Pendapatan Daerah	Keuangan	29	3	225	257
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	6	7	15	28
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	7	8	18	33
29	Badan Riset dan	Penelitian dan	6	14	14	34

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Inovasi Daerah	Pengembangan				
30	Kecamatan Medan Sunggal	Kewilayahan	38		45	83
31	Kecamatan Medan Timur	Kewilayahan	63		36	99
32	Kecamatan Medan Tuntungan	Kewilayahan	51		40	91
33	Kecamatan Medan Petisah	Kewilayahan	41		24	65
34	Kecamatan Medan Labuhan	Kewilayahan	38		19	57
35	Kecamatan Medan Barat	Kewilayahan	38		17	55
36	Kecamatan Medan Maimun	Kewilayahan	37		15	52
37	Kecamatan Medan Deli	Kewilayahan	39	7	22	68
38	Kecamatan Medan Kota	Kewilayahan	66		48	114
39	Kecamatan Medan Denai	Kewilayahan	39		36	75
40	Kecamatan Medan Amplas	Kewilayahan	43		36	79
41	Kecamatan Medan Area	Kewilayahan	67		32	99
42	Kecamatan Medan Helvetia	Kewilayahan	43		42	85
43	Kecamatan Medan Perjuangan	Kewilayahan	52		32	84
44	Kecamatan Medan Selayang	Kewilayahan	38		31	69

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
45	Kecamatan Medan Tembung	Kewilayahan	42		37	79
46	Kecamatan Medan Baru	Kewilayahan	39		23	62
47	Kecamatan Medan Johor	Kewilayahan	39		41	80
48	Kecamatan Medan Polonia	Kewilayahan	33		19	52
49	Kecamatan Medan Marelan	Kewilayahan	33		20	53
50	Kecamatan Medan Belawan	Kewilayahan	36		10	46
Total			1267	665	2666	4598

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Dari tabel 1.10 di atas nampak bahwa rincian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan tahun 2024 berdasarkan struktural, fungsional dan pelaksana sebanyak 4.598 orang dengan rincian 1.267 orang atau 27,56 persen, untuk struktural sebanyak 665 orang atau 14,46 persen dan pelaksana sebanyak 4598 orang atau 57,98 persen.

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Medan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Medan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Pada komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dinataranya adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Lainnya yakni pendapatan bagi hasil pajak, Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi Lainnya; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

2. Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; (2) Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; (3) Belanja Tak Terduga.
3. Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas; (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah pada Penyertaan Modal Pada BUMD; (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 1.11. berikut

Tabel 1.11.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024 (rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4	PENDAPATAN DAERAH	7,166,410,196,201.00	6.294.922.205.176,02	87.84
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,477,735,991,080.00	2.770.373.824.190,14	79.66
4.1.01	Pajak Daerah	2,963,036,949,123.00	2,483,892,895,537.00	83.83
4.1.01.06	Pajak Hotel	43,375,021,551.00	45,013,131,509.00	103.78
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	43,375,021,551.00	45,013,131,509.00	103.78
4.1.01.07	Pajak Restoran	107,756,342,064.00	111,846,363,162.00	103.80
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	107,756,342,064.00	111,846,363,162.00	103.80
4.1.01.08	Pajak Hiburan	18,599,933,389.00	19,030,721,417.00	102.32
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	6,882,904,434.00	6,882,904,434.00	100.00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	72,770,000.00	72,770,000.00	100.00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5,172,887,197.00	5,330,680,530.00	103.05
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	964,550.00	30,721,550.00	3,185.07
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5,275,094,955.00	5,445,165,182.00	103.22
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1,190,193,507.00	1,198,104,320.00	100.66
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5,118,746.00	70,375,401.00	1,374.86
4.1.01.09	Pajak Reklame	141,358,814,538.00	100,826,998,995.00	71.33
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	91,325,161,413.00	56,891,010,711.00	62.30
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	4,316,353,125.00	10,087,406,238.00	233.70
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	42,627,950,000.00	33,206,295,203.00	77.90
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	3,089,350,000.00	642,286,843.00	20.79
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	82,332,069,027.00	82,332,069,027.00	100.00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	82,332,069,027.00	82,332,069,027.00	100.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	6,161,755,258.00	6,270,376,708.00	101.76
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6,161,755,258.00	6,270,376,708.00	101.76
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	23,207,172,733.00	25,193,806,134.00	108.56
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	23,207,172,733.00	25,193,806,134.00	108.56
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	865,848,698,375.00	683,344,914,978.00	78.92
4.1.01.15.01	PBBP2	865,848,698,375.00	683,344,914,978.00	78.92
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	730,758,291,942.00	690,927,836,350.00	94.55
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	730,758,291,942.00	690,927,836,350.00	94.55
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	943,638,850,246.00	719,106,677,257.00	76.21
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	309,511,744,518.00	275,710,141,460.00	89.08
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	388,710,422,001.00	270,140,579,790.00	69.50
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	133,621,595,420.00	116,101,900,973.00	86.89
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	44,338,244,742.00	12,530,077,313.00	28.26
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	67,456,843,565.00	44,623,977,721.00	66.15
4.1.02	Retribusi Daerah	287,995,694,769.00	139,920,386,103.00	48.58
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	152,555,401,545.00	48,859,768,298.00	32.03
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan	1,750,000,000.00	2,379,158,420.00	135.95

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Kesehatan			
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	48,921,445,030.00	25,166,547,604.00	51.44
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0.00	268,055,000.00	0.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100,000,000,000.00	19,114,346,759.00	19.11
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,883,956,515.00	1,883,956,515.00	100.00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0.00	22,704,000.00	0.00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0.00	25,000,000.00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	34,470,933,544.00	4,466,034,298.00	12.96
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	634,664,734.00	2,694,761,623.00	424.60
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0.00	49,231,000.00	0.00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,000,000,000.00	152,431,000.00	15.24
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20,000,000.00	41,275,000.00	206.38
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	207,500,000.00	0.00	0.00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1,000,000.00	2,280,000.00	228.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	32,607,768,810.00	1,526,055,675.00	4.68
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100,969,359,680.00	86,594,583,507.00	85.76
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	98,200,000,000.00	84,771,555,040.00	86.33

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2,769,359,680.00	1,823,028,467.00	65.83
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,630,706,918.00	16,973,995,298.79	91.11
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18,630,706,918.00	16,973,995,298.79	91.11
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16,124,076,918.00	16,124,076,918.79	100.00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2,506,630,000.00	849,918,380.00	33.91
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208,072,640,270.00	129,586,547,251.35	62.28
4.1.04.05	Jasa Giro	23,000,000,000.00	4,414,816,198.00	19.19
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	23,000,000,000.00	4,413,515,235.00	19.19
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0.00	1,300,963.00	0.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	69,640,248,000.00	11,696,064,545.00	16.79
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4,214,194,784.00	872,140,897.00	20.70
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6,819,437,363.00	2,005,209,982.00	29.40
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00	252,977,907.00	0.00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	155,661,987.00	0.00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2,038,867,853.00	129,821,703.00	6.37
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	52,500,000.00	82,467,196.00	157.08
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	56,515,248,000.00	8,197,784,873.00	14.51
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	73,920,470,173.00	86,263,879,136.35	116.70

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0.00	0.00	0.00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15,432,392,270.00	27,714,155,734.09	179.58
4.1.04.15.25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	58,488,077,903.00	58,549,723,402.26	100.11
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	41,511,922,097.00	27,211,787,372.00	65.55
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41,511,922,097.00	27,211,787,372.00	65.55
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,477,735,991,080.00	2.770.373.824.190,14	79.66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,582,204,963,000.00	3,429,257,377,514.00	95.73
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,714,204,963,000.00	2,748,284,016,210.00	101.26
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2,714,204,963,000.00	2,748,284,016,210.00	101.26
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	208,897,527,000.00	275,734,243,000.00	131.99
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,931,432,611,000.00	1,927,311,908,517.00	99.79
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32,700,499,000.00	30,396,472,723.00	92.95
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	541,174,326,000.00	514,841,391,970.00	95.13
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2,714,204,963,000.00	2,748,284,016,210.00	101.26
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	868,000,000,000.00	680,973,361,304.00	78.45
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	728,000,000,000.00	540,973,361,304.00	74.31
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	728,000,000,000.00	540,973,361,304.00	74.31
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	140,000,000,000.00	140,000,000,000.00	100.00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	140,000,000,000.00	140,000,000,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR	868,000,000,000.00	680,973,361,304.00	78.45

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	DAERAH			
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	3,582,204,963,000.00	3,429,257,377,514.00	95.73
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106,469,242,121.00	95,291,003,471.88	89.50
4.3.01	Pendapatan Hibah	3,280,000,000.00	1,304,000,000.00	39.76
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,280,000,000.00	1,304,000,000.00	39.76
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	103,189,242,121.00	93,987,003,471.88	91.08
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	103,189,242,121.00	93,987,003,471.88	91.08
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106,469,242,121.00	95,291,003,471.88	89.50
	JUMLAH PENDAPATAN	7,166,410,196,201.00	6.294.922.205.176,02	87.84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2024

Dari Tabel 1.10. di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 6.294.922.205.176,02 atau 87,84 persen. Sedangkan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.770.373.824.190,14 atau 79,66 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian dari pendapatan pajak daerah dapat dicapai sebesar Rp. 2,483,892,895,537.00 atau 83,83 persen, pendapatan retribusi daerah dapat dicapai sebesar Rp. 139,920,386,103.00 atau 48,58 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16,973,995,298.79 atau 91,11 persen, dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 129,586,547,251.35 atau 62,28 persen; (2) Pendapatan Transfer yang dapat direalisasikan sebesar Rp 3,429,257,377,514.00 atau 95,73 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,748,284,016,210.00 atau 101,26 persen dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 680,973,361,304.00.00 atau 78,45 persen; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 95,291,003,471.88 atau 89,50 persen dari pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

2) Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Medan dijelaskan sebagai berikut. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada Tabel 1.12. berikut

Tabel 1.12.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5	BELANJA DAERAH	7,235,090,422,451.00	6.257.781.205.739,27	86.49
5.1	BELANJA OPERASI	5,202,756,617,110.00	4.764.040.644.819,97	91.57
5.1.01	Belanja Pegawai	2,098,444,676,253.00	1.926.958.217.928,99	91.83
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,030,174,074,820.00	969,547,767,222.00	94.11
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	679,616,997,102.00	619,729,497,154.99	91.19
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	298,259,843,295.00	258,584,191,745.00	86.70
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43,997,351,448.00	43,494,095,765.00	98.86
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1,499,101,868.00	875,618,428.00	58.41
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4,897,307,720.00	4,198,419,584.00	85.73
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	40,000,000,000.00	30,528,628,030.00	76.32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,647,001,058,562.00	2.420.691.173.415,98	91.45
5.1.02.01	Belanja Barang	690,794,398,294.00	616,773,150,503.16	89.28
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,589,712,916,850.00	1.466.242.473.988,86	92.23
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	92,008,330,368.00	82,727,853,733.94	89.91
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	88,906,015,795.00	71,391,730,654.00	80.30
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,725,059,705.00	5,596,875,598.00	83.22
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	103,495,690,550.00	122,075,019,348.00	117.95
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18,358,647,000.00	2,911,318,999.00	15.86
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57,000,000,000.00	52,972,750,591.02	92.93
5.1.03	Belanja Bunga	7,500,000,000.00	0.00	0.00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	7,500,000,000.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	338,351,503,979.00	313,250,004,750.00	92.58
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan,	130,336,603,697.00	124,044,572,350.00	95.17

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	200,792,729,450.00	181,983,261,574.00	90.63
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7,222,170,832.00	7,222,170,826.00	100.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	111,459,378,316.00	103,141,248,725.00	92.54
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	102,810,684,400.00	99,598,531,925.00	96.88
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1,048,693,916.00	970,000,000.00	92.50
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7,600,000,000.00	2,572,716,800.00	33.85
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5,202,756,617,110.00	4.764.040.644.819,97	91.57
5.2	BELANJA MODAL	2,007,120,599,307.00	1,488,415,288,707.30	74.16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	99,826,874,013.00	39,241,989,901.00	39.31
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	99,826,874,013.00	39,241,989,901.00	39.31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175,355,768,482.00	160,535,564,193.00	91.55
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12,455,924,223.00	9,809,078,180.00	78.75
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4,323,044,400.00	3,859,300,000.00	89.27
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,270,895,060.00	341,349,672.00	26.86
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	8,876,025.00	7,486,250.00	84.34
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93,414,876,893.00	88,591,892,890.00	94.84
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,655,256,681.00	1,368,677,683.00	82.69
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,002,069,913.00	5,275,660,427.00	87.90
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	868,991,024.00	652,667,004.00	75.11
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	35,239,604,363.00	32,718,981,621.00	92.85
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0.00	0.00	0.00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1,543,429,900.00	1,443,085,400.00	93.50
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	15,260,900,000.00	14,972,664,682.00	98.11
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	311,900,000.00	300,587,080.00	96.37
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3,000,000,000.00	1,194,133,304.00	39.80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,215,100,679,477.00	856,812,504,048.00	70.51
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1,214,607,835,173.00	856,326,734,201.00	70.50
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	110,000,000.00	104,737,693.00	95.22

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	382,844,304.00	381,032,154.00	99.53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	506,957,248,139.00	423,161,734,129.30	83.47
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	368,764,953,230.00	295,878,247,552.30	80.23
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	96,573,618,883.00	96,323,385,451.00	99.74
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	41,618,676,026.00	30,960,101,126.00	74.39
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,515,277,846.00	8,300,145,086.00	87.23
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5,800,000,000.00	4,739,500,000.00	81.72
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0.00	0.00	0.00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	3,665,277,846.00	3,510,695,086.00	95.78
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	364,751,350.00	363,351,350.00	99.62
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	364,751,350.00	363,351,350.00	99.62
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,007,120,599,307.00	1,488,415,288,707.30	74.16
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
	JUMLAH BELANJA	7,235,090,422,451.00	6.257.781.205.739,27	86.49

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2024

Dari data Tabel 1.11 di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja belanja untuk tahun 2024 sebesar Rp. 6.257.781.205.739,27,- atau 86,49 persen. Sedangkan rincian berdasarkan jenis biaya yakni belanja operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.764.040.644.819,97,- atau 91,57 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi tersebut disebabkan efektifnya belanja pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belanja pegawai yang hanya mencapai Rp. 1.926.958.217.928,99,- atau 91,83 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.420.691.173.415,98,- atau 91,45 persen, belanja hibah sebesar Rp. 313,250,004,750.00,- atau 92,58 persen dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 103,141,248,725.00,- atau 92,54 persen. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp 1,488,415,288,707.30,- atau 74,16 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja modal tersebut disebabkan belanja modal tanah hanya

mencapai Rp. 39,241,989,901.00,- atau 39,31 persen, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 160,535,564,193.00,- atau 91,55 persen, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 856,812,504,048.00,- atau 70,51 persen, belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 423,161,734,129.30,- atau 83,47 persen dan belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp. 8,300,145,086.00,- atau 87,23 persen, sedangkan belanja tak terduga realisasinya hanya sebesar Rp. 5,325,272,212.00,- atau 21,12 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga secara keseluruhan tersebut lebih didasarkan pada efisiensi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tidak ada dari akun belanja daerah yang jumlah realisasi pengeluarannya mencapai anggaran. Hal ini menunjukkan pengeluaran belanja daerah tahun anggaran 2023 tetap mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis, pengelolaan belanja daerah termasuk pertimbangan input, output dan outcome dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk anggaran dan realisasi belanja per OPD Tahun Anggaran 2024 di uraikan pada tabel 1.13 berikut.

Tabel 1.13.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2024
(Rupiah)

No	Organisasi Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Sekretariat Daerah	140.857.771.998,00	123.923.338.978,00	87,98
2	Sekretariat DPRD	241.000.000.000,00	228.701.493.714,00	94,90
3	Inspektorat	25.441.464.336,00	21.562.018.387,00	84,75
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.358.068.706.708,00	1.250.626.840.004,00	92,09
5	Dinas Kesehatan	204.939.242.121,00	182.127.672.666,14	88,87
6	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi	748.193.934.199,00	644.866.861.807,00	86,19
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.517.003.226.034,00	1.079.551.282.132,00	71,16
8	Satuan Polisi Pamong Praja	48.814.919.091,00	46.165.617.059,00	94,57
9	Dinas Sosial	112.143.278.595,00	94.392.354.243,00	84,17
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39.174.917.889,00	37.002.966.897,00	94,46
11	Dinas Ketenagakerjaan	16.505.371.502,00	15.351.078.597,00	93,01
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44.866.142.245,00	35.050.091.371,00	78,12

No	Organisasi Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	37.571.153.580,00	36.491.566.040,00	97,13
14	Dinas Lingkungan Hidup	70.587.680.392,00	62.596.523.554,00	88,68
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.736.155.527,00	31.336.086.208,00	95,72
16	Dinas Perhubungan	517.957.682.748,00	467.740.424.639,00	90,30
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	54.984.865.614,00	52.879.451.067,00	96,17
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.240.237.644,00	24.988.947.386,00	88,49
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	43.227.911.927,00	37.789.247.779,06	87,42
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	46.077.339.184,00	41.783.060.252,00	90,68
21	Dinas Pariwisata	23.815.757.503,00	21.995.655.960,00	92,36
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.906.940.398,00	14.397.409.375,00	96,58
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.410.497.576,00	18.276.410.613,00	89,54
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.675.809.457,00	19.399.558.822,00	89,50
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77.155.782.747,00	36.646.940.398,00	47,50
26	Badan Pendapatan Daerah	186.901.037.730,00	142.434.161.284,00	76,21
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.782.847.280,00	13.853.588.586,00	93,71
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	122.403.644.854,00	117.572.189.680,00	96,05
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.609.559.580,00	8.837.113.477,00	91,96
30	Kecamatan Medan Sunggal	31.164.222.908,00	29.166.812.657,00	93,59
31	Kecamatan Medan Timur	37.907.102.447,00	37.261.023.213,00	98,30
32	Kecamatan Medan Tuntungan	34.002.826.208,00	32.723.601.630,00	96,24
33	Kecamatan Medan Petisah	29.059.567.549,00	27.481.315.672,00	94,57
34	Kecamatan Medan Labuhan	22.294.895.142,00	21.159.052.982,00	94,91
35	Kecamatan Medan Barat	29.818.134.404,00	27.474.152.903,00	92,14
36	Kecamatan Medan Maimun	22.767.849.048,00	22.021.026.860,00	96,72
37	Kecamatan Medan Deli	25.046.254.602,00	24.139.615.158,60	96,38

No	Organisasi Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
38	Kecamatan Medan Kota	46.589.628.538,00	44.735.299.009,00	96,02
39	Kecamatan Medan Denai	27.803.616.070,00	25.855.464.775,60	92,99
40	Kecamatan Medan Amplas	29.307.750.173,00	27.524.867.860,00	93,92
41	Kecamatan Medan Area	40.705.999.110,00	38.739.732.347,00	95,17
42	Kecamatan Medan Helvetia	31.954.342.578,00	29.798.215.269,00	93,25
43	Kecamatan Medan Perjuangan	34.638.643.133,00	32.163.283.200,00	92,85
44	Kecamatan Medan Selayang	25.311.309.482,00	24.028.227.263,00	94,93
45	Kecamatan Medan Tembung	30.458.602.049,00	29.264.237.032,00	96,08
46	Kecamatan Medan Baru	24.050.551.431,00	23.119.528.583,00	96,13
47	Kecamatan Medan Johor	26.307.958.723,00	25.348.809.855,00	96,35
48	Kecamatan Medan Polonia	19.568.165.338,00	19.015.099.475,90	97,17
49	Kecamatan Medan Marelan	20.457.415.693,00	19.689.946.068,00	96,25
50	Kecamatan Medan Belawan	25.587.827.375,00	24.265.058.623,00	94,83

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2024

Dari tabel 1.12 di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi belanja OPD untuk tahun 2024 secara rata-rata mencapai 91,14 persen.

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

Serangkaian kegiatan/sub kegiatan dari pelaksanaan program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan selaiugis memuat alokasi anggaran dan realisasi belanja di uraikan berikut ini.

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1,422,564,784,941	1,318,810,015,197
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,422,564,784,941	1,318,810,015,197
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,422,564,784,941	1,318,810,015,197
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	844,064,802,244	751,190,559,614.00
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	577,590,766,907	566,821,180,583.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	592,847,120	545,295,000.00
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	316,368,670	252,980,000.00
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	15,525,115,000	10,535,624,627.00
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3,194,134,960	722,406,940.00
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	78,037,367	0.00
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2,384,647,240	1,102,031,240.00
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	99,400,000	99,400,000.00
	Jumlah	1,443,846,119,508	1,331,269,478,004.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	749,819,603,710	736,951,557,902
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	749,819,603,710	736,951,557,902
2	Dinas Kesehatan	749,819,603,710	736,951,557,902
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	464,165,992,812	455,861,142,750.00
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	276,837,239,598	273,128,437,905.00
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,232,441,803	1,480,517,750.00
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6,583,929,497	6,481,459,497.00
	Jumlah	749,819,603,710	736,951,557,902.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	704,095,613,513	603,198,543,764
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	704,095,613,513	603,198,543,764
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	704,095,613,513	603,198,543,764

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,651,642,425	90,416,515,293.00
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	268,843,974,465	232,955,132,543.00
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	339,452,493,478	277,686,360,533.00
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2,147,503,145	2,140,535,395.00
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	32,930,943,198	31,267,686,610.00
	Jumlah	737,026,556,711	634,466,230,374.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1,185,732,905,009	917,260,314,695
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1,124,242,350,698	860,389,992,167
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1,124,242,350,698	860,389,992,167
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14,470,837,000	13,849,405,000.00
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16,248,254,000	15,549,637,000.00
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	671,298,081,858	542,840,489,916.00
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	421,825,177,840	288,060,617,251.00
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	400,000,000	89,843,000.00
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,727,500,311	41,765,652,529.00
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	2,519,220,000	2,101,336,000.00
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	13,243,834,000	13,003,334,000.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	101,171,344,655	39,593,375,601.00
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1,977,722,370	1,772,868,000.00
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	228121254000	120924723835.00
	Jumlah	1,517,003,226,034	1,079,551,282,132.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	39,174,917,889	37,002,966,897
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	39,174,917,889	37,002,966,897
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39,174,917,889	37,002,966,897
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,283,336,784	25,364,090,952.00
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	11,891,581,105	11,638,875,945.00
	Jumlah	39,174,917,889	37,002,966,897.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	48,814,919,091	46,165,617,059
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	48,814,919,091	46,165,617,059
6	Satuan Polisi Pamong Praja	48,814,919,091	46,165,617,059
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,987,336,490	13,056,177,575.00
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	34,827,582,601	33,109,439,484.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Jumlah	48,814,919,091	46,165,617,059.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	14,782,847,280	13,853,588,586
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	14,782,847,280	13,853,588,586
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14,782,847,280	13,853,588,586
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,740,066,480	11,814,992,586.00
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	2,042,780,800	2,038,596,000.00
	Jumlah	14,782,847,280	13,853,588,586.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	112,143,278,595	94,392,354,243
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	112,143,278,595	94,392,354,243
8	Dinas Sosial	112,143,278,595	94,392,354,243
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,115,145,003	11,127,063,990.00
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	80,437,898,553	72,861,703,635.00
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	11,493,469,163	6,452,145,538.00
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3,508,215,160	1,842,503,880.00
1.06.06	Program Penanganan Bencana	2,588,550,716	2,108,937,200.00
	Jumlah	112,143,278,595	94,392,354,243.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	16,505,371,502	15,351,078,597
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	16,505,371,502	15,351,078,597
9	Dinas Ketenagakerjaan	16,505,371,502	15,351,078,597
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,590,779,587	12,451,466,157.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kabupaten/Kota		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	515,563,700	507,532,950.00
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	249,541,815	245,540,590.00
2.07.05	Program Hubungan Industrial	2,149,486,400	2,146,538,900.00
	Jumlah	16,505,371,502	15,351,078,597.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	44,866,142,245	35,050,091,371
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	25,922,696,429	18,682,838,633
10	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	25,922,696,429	18,682,838,633
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,703,670,749	17,922,502,593.00
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	373,122,627	221,263,760.00
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	118,579,700	57,574,277.00
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	136,900,710	0.00
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	78,700,355	77,117,855.00
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	189,301,988	175,761,988.00
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	322,420,300	228,618,160.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6,179,042,345	4,741,803,357

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,179,042,345	4,741,803,357
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	6,179,042,345	4,741,803,357.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12,764,403,471	11,625,449,381
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12,764,403,471	11,625,449,381
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	467,400,000	385,925,835.00
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5,026,407,946	4,136,652,886.00
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7,270,595,525	7,102,870,660.00
	Jumlah	44,866,142,245	35,050,091,371.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	31,263,711,020	30,298,530,651
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	31,263,711,020	30,298,530,651
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	31,263,711,020	30,298,530,651
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28,900,570,320	28,110,384,785.00
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	719,587,100	713,407,650.00
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	520,105,550	430,186,500.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1,123,448,050	1,044,551,716.00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	6,307,442,560	6,193,035,389
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2,563,191,726	2,558,977,484
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2,563,191,726	2,558,977,484
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	985,376,606	983,933,100.00
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,577,815,120	1,575,044,384.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3,744,250,834	3,634,057,905
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3,744,250,834	3,634,057,905
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,030,312,139	1,978,992,315.00
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	474,606,540	471,890,442.00
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	504,243,997	454,787,190.00
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	735,088,158	728,387,958.00
	Jumlah	37,571,153,580	36,491,566,040.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	3,099,990,000	2,789,401,368
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3,099,990,000	2,789,401,368
12	Dinas Lingkungan Hidup	3,099,990,000	2,789,401,368
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3,099,990,000	2,789,401,368.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	67,487,690,392	59,807,122,186

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	67,487,690,392	59,807,122,186
	Dinas Lingkungan Hidup	67,487,690,392	59,807,122,186
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,415,928,882	44,293,956,202.00
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	956,006,200	914,776,200.00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3,689,119,525	3,192,033,871.00
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	650,480,000	546,126,361.00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	51,519,725	50,000,000.00
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	179,752,380	2,400,000.00
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	694,932,780	609,850,011.00
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	199,190,680	180,053,500.00
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,790,340	64,261,400.00
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	10,549,969,880	9,953,664,641.00
	Jumlah	70,587,680,392	62,596,523,554.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	32,736,155,527	31,336,086,208

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	32,736,155,527	31,336,086,208
13	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	32,736,155,527	31,336,086,208
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28,292,603,137	27,274,602,571.00
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	3,665,322,390	3,344,407,500.00
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	178,230,000	156,344,000.00
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	600,000,000	560,732,137.00
	Jumlah	32,736,155,527	31,336,086,208.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	517,957,682,748	467,740,424,639
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	517,957,682,748	467,740,424,639
14	Dinas Perhubungan	517,957,682,748	467,740,424,639
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	357,322,379,923	344,832,615,403.00
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	160,635,302,825	122,907,809,236.00
	Jumlah	517,957,682,748	467,740,424,639.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	54,984,865,614	52,879,451,067
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	54,586,611,614	52,512,274,470
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	54,586,611,614	52,512,274,470
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,790,437,648	15,570,703,564.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	10,322,470,000	9,569,882,233.00
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	27,473,703,966	27,371,688,673.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	148,320,000	134,575,000
	dinas komunikasi dan informatika	148,320,000	134,575,000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	148,320,000	134,575,000.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	249,934,000	232,601,597
	Dinas Komunikasi dan Informatika	249,934,000	232,601,597
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	249,934,000	232,601,597.00
	Jumlah	54,984,865,614	52,879,451,067.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	33,123,725,277	29,022,306,748
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	33,123,725,277	29,022,306,748
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	33,123,725,277	29,022,306,748
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,485,112,621	19,512,906,448.00
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	343,484,000	341,014,000.00
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4,976,858,656	4,971,493,300.00
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	4,318,270,000	4,196,893,000.00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	10,104,186,650	8,766,941,031
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	9,060,986,650	7,732,220,539

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9,060,986,650	7,732,220,539
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	42,000,000	42,000,000.00
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	7,219,815,650	6,029,845,600.00
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1,799,171,000	1,660,374,939.00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1,043,200,000	1,034,720,492
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1,043,200,000	1,034,720,492
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,043,200,000	1,034,720,492.06
	Jumlah	43,227,911,927	37,789,247,779.06
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	28,240,237,644	24,988,947,386
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	28,240,237,644	24,988,947,386
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28,240,237,644	24,988,947,386
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,202,370,944	23,787,152,886.00
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	631,386,700	110,588,500.00
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	292,000,000	238,000,000.00
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	59,833,000	17,838,000.00
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	301,047,000	274,968,000.00
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	753,600,000	560,400,000.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Jumlah	28,240,237,644	24,988,947,386.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	46,077,339,184	41,783,060,252
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	46,077,339,184	41,783,060,252
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	46,077,339,184	41,783,060,252
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34,851,040,832	31,489,469,317.00
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,083,172,529	1,030,726,000.00
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10,143,125,823	9,262,864,935.00
	Jumlah	46,077,339,184	41,783,060,252.00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	14,906,940,398	14,397,409,375
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	14,906,940,398	14,397,409,375
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14,906,940,398	14,397,409,375
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,519,085,398	14,091,282,575.00
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	387,855,000	306,126,800.00
	Jumlah	14,906,940,398	14,397,409,375.00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	23,815,757,503	21,995,655,960
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	23,815,757,503	21,995,655,960
20	Dinas Pariwisata	23,815,757,503	21,995,655,960
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,777,415,325	14,353,117,601.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	357,795,178	353,611,336.00
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	6,719,657,640	6,338,428,257.00
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	117,428,680	112,338,000.00
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	843,460,680	838,160,766.00
	Jumlah	23,815,757,503	21,995,655,960.00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	140,857,771,998	123,923,338,978
21	Sekretariat Daerah	140,857,771,998	123,923,338,978
	Bagian Perekonomian	522,573,422	493,320,972
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108,913,172	108,660,972.00
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	413,660,250	384,660,000.00
	Bagian Umum	69,687,282,786	62,068,026,338
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69,687,282,786	62,065,426,338.00
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	0	2,600,000.00
	Bagian Hukum	1,681,101,345	1,430,924,440
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	356,476,145	312,459,540.00
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1,324,625,200	1,118,464,900.00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3,606,530,705	3,057,220,530
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	135,547,100	108,080,500.00
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3,470,983,605	2,949,140,030.00
	Bagian Administrasi Pembangunan	864,362,143	851,898,150

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	564,042,143	557,668,150.00
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	300,320,000	294,230,000.00
	Bagian Kerja Sama	1,222,729,928	1,059,303,900
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	324,859,928	301,452,400.00
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	897,870,000	757,851,500.00
	Bagian Tata Pemerintahan	6,981,929,019	5,510,768,788
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	259,344,827	209,749,500.00
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6,722,584,192	5,301,019,288.00
	Bagian Organisasi	840,960,929	381,999,808
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	840,960,929	381,999,808.00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2,217,314,960	1,885,187,500
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	276,154,960	269,357,500.00
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,941,160,000	1,615,830,000.00
	Bagian Sumber Daya Alam	834,719,496	1,189,607,171
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	352,963,960	729,432,171.00
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	481,755,536	460,175,000.00
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3,845,850,323	2,955,141,600
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,845,850,323	2,955,141,600.00
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	48,552,416,942	43,039,939,781
4.01.01	Program Penunjang Urusan	48,552,416,942	43,039,939,781.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah	140,857,771,998	123,923,338,978.00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	241,000,000,000	228,701,493,714
	Sekretariat DPRD	241,000,000,000	228,701,493,714
22	Sekretariat DPRD	241,000,000,000	228,701,493,714
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,971,544,253	94,178,426,431.00
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	143,028,455,747	134,523,067,283.00
	Jumlah	241,000,000,000	228,701,493,714.00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	20,410,497,576	18,276,410,613
	Perencanaan	20,410,497,576	18,276,410,613
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20,410,497,576	18,276,410,613
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,604,746,826	12,957,720,113.00
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,868,511,800	3,528,649,500.00
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,937,238,950	1,790,041,000.00
	Jumlah	20,410,497,576	18,276,410,613.00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	186,901,037,730	142,434,161,284
	Keuangan	186,901,037,730	142,434,161,284
24	Badan Pendapatan Daerah	186,901,037,730	142,434,161,284
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	174,144,015,749	135,162,904,001.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12,757,021,981	7,271,257,283.00
	Jumlah	186,901,037,730	142,434,161,284.00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	77,155,782,747	36,646,940,398
	KEUANGAN	77,155,782,747	36,646,940,398

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77,155,782,747	36,646,940,398
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,880,444,334	21,038,157,367.00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	38,855,570,410	9,110,965,562.00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,419,768,003	6,497,817,469.00
	Jumlah	77,155,782,747	36,646,940,398.00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	21,675,809,457	19,399,558,822
	Kepegawaian	19,624,824,752	17,875,861,248
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19,624,824,752	17,875,861,248
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,073,592,292	16,780,842,248.00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	1,551,232,460	1,095,019,000.00
	Pendidikan Dan Pelatihan	2,050,984,705	1,523,697,574
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,050,984,705	1,523,697,574
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,050,984,705	1,523,697,574.00
	Jumlah	21,675,809,457	19,399,558,822.00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	9,609,559,580	8,837,113,477
	Penelitian Dan Pengembangan	9,609,559,580	8,837,113,477
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	9,609,559,580	8,837,113,477
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,561,302,530	7,875,863,427.00
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,048,257,050	961,250,050.00
	Jumlah	9,609,559,580	8,837,113,477.00
	Unsur Pemerintahan Umum	122,403,644,854	117,572,189,680

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kesatuan Bangsa Dan Politik	122,403,644,854	117,572,189,680
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	122,403,644,854	117,572,189,680
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	117,655,991,630	114,093,272,463.00
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,210,423,564	1,938,238,000.00
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	832,415,730	409,651,000.00
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5,940,000	5,440,000.00
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	416,895,360	176,600,000.00
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,281,978,570	948,988,217.00
	Jumlah	122,403,644,854	117,572,189,680.00
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	25,441,464,336	21,562,018,387
	Inspektorat Daerah	25,441,464,336	21,562,018,387
29	Inspektorat	25,441,464,336	21,562,018,387
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,993,564,336	19,483,168,387.00
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,447,900,000	2,078,850,000.00
	Jumlah	25,441,464,336	21,562,018,387.00
30	Kecamatan Medan Belawan	25,587,827,375	24,265,058,623
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,038,746,741	9,468,222,403.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11,881,516,810	11,520,452,020.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	179,968,701	111,823,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	781,844,322	659,427,000.00
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	244,300,000	244,300,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69,694,124	61,079,744.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	190,920,000	189,920,880.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74,357,168	68,008,973.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	198,540,000	165,605,465.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73,698,582	64,117,564.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	698,205,700	632,446,740.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76,177,616	60,891,527.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	135,340,000	107,399,640.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,190,283	60,957,300.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	96,980,000	91,136,371.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,125,592	69,097,288.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kabupaten/Kota		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	700,221,736	690,172,708.00
	Jumlah	25,587,827,375	24,265,058,623.00
31	Kecamatan Medan Labuhan	22,294,895,142	21,159,052,982
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,010,135,401	10,194,659,373.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9,304,420,280	9,103,290,478.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	115,668,400	114,348,400.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	127,400,000	126,360,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	283,567,900	275,047,100.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,002,518	35,806,450.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,984,500	190,337,674.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,848,956	24,733,070.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,929,484	194,387,414.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,269,735	30,691,213.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,033,000	197,966,350.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,486,650	28,117,201.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,728,568	185,201,401.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,040,300	26,885,890.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,345,000	196,547,460.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47,108,950	36,182,064.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,925,500	198,491,444.00
	Jumlah	22,294,895,142	21,159,052,982.00
32	Kecamatan Medan Kota	46,589,628,538	44,735,299,009
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,842,747,381	19,874,319,943.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	21,498,412,972	21,344,775,313.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	178,704,000	169,504,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	229,599,000	229,599,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	442,209,000	402,022,900.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94,381,473	81,127,281.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	143,717,151.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87,434,750	76,270,975.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	174,060,936.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79,195,411	77,540,586.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	178,606,123.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	55,286,514.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	173,666,090	115,884,900.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84,897,618	59,537,960.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	86,961,957.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86,538,820	71,243,412.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	163,850,008.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,847,610	72,356,889.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,999,875	159,013,333.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,314,250	61,401,596.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	178,816,478.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83,514,976	67,575,435.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	187,010,000	180,098,332.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69,298,445	67,460,747.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	197,585,150.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88,037,215	75,776,987.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	177,829,520.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88,819,652	53,747,189.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	139,328,394.00
	Jumlah	46,589,628,538	44,735,299,009.00
33	Kecamatan Medan Timur	37,907,102,447	37,261,023,213
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,710,667,451	16,503,007,602.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	18,690,472,120	18,612,484,531.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148,437,541	142,167,541.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	184,800,000	184,800,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	401,296,996	388,118,815.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,009,350	7,080,520.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	138,392,000	128,265,205.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,010,150	10,019,620.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	134,595,000	116,844,600.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,377,884	18,629,840.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	115,965,000	105,294,069.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,448,300	4,241,915.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	122,610,000	75,165,350.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,338,355	18,509,385.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	179,702,200	149,799,584.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,430,895	20,008,228.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	126,885,000	116,413,920.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,977,330	19,241,540.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	118,695,000	100,952,235.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,937,025	17,665,106.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	153,380,000	110,100,017.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,541,000	10,877,196.00
7.01.03	Program Pemberdayaan	127,005,000	116,437,260.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,856,750	12,211,001.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	163,436,600	155,040,825.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,785,300	15,431,380.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	124,050,200	102,215,928.00
	Jumlah	37,907,102,447	37,261,023,213.00
34	Kecamatan Medan Helvetia	31,954,342,578	29,798,215,269
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,660,900,536	14,162,582,729.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13,810,529,273	13,471,522,643.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	121,777,460	116,462,500.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	172,480,000	169,240,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	320,965,500	279,452,500.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73,311,717	63,494,805.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,472,454	180,039,370.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62,995,857	55,628,255.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,460,772	178,422,176.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,326,976	69,323,394.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	193,171,628	178,016,816.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63,646,930	62,858,079.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	196,588,272	168,840,198.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82,452,301	66,480,367.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,603,408	144,715,773.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60,949,784	55,661,180.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	189,095,680	162,650,678.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71,966,790	55,574,810.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,647,240	157,248,996.00
	Jumlah	31,954,342,578	29,798,215,269.00
35	Kecamatan Medan Marelan	20,457,415,693	19,689,946,068
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,910,601,532	9,542,243,135.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8,632,629,921	8,442,622,132.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	146,379,808	103,587,920.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	98,985,000	96,240,000.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Umum		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	422,836,332	354,456,616.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,813,301	54,482,713.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	204755000	194517233.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56,024,430	49,915,722.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	180,556,000	164,448,509.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62,644,620	56,388,996.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	170,705,000	169,179,543.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64,130,403	60,940,894.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	174,970,500	154,190,867.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,419,846	67,577,813.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,964,000	179,153,975.00
	Jumlah	20,457,415,693	19,689,946,068.00
36	Kecamatan Medan Denai	27,803,616,070	25,855,464,774
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,192,225,422	13,040,965,884.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11,606,665,295	11,412,507,884.00
7.01.03	Program Pemberdayaan	114,383,535	108,613,200.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	149,424,830	147,700,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	391,272,500	372,444,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,802,810	25,796,668.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	197,810,000	157,609,058.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,073,136	17,111,605.80
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	189,412,779	101,358,171.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38,100,158	27,779,172.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,650,000	120,953,965.80
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,922,743	26,133,528.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,629,000	39,860,189.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,871,985	21,224,093.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	173,600,000	116,835,749.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,851,877	22,148,821.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	159,920,000	96,422,787.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Jumlah	27,803,616,070	25,855,464,775.60
37	Kecamatan Medan Area	40,705,999,110	38,739,732,347
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,005,652,100	18,889,796,979.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17,668,501,140	17,405,117,721.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	289,284,390	153,170,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	245,055,710	238,120,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97,655,000	45,032,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,929,257	16,717,400.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	183,349,348	128,341,040.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,914,233	14,665,800.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	183,287,393	103,745,165.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,186,966	9,606,663.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	187,374,712	130,376,281.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,997,585	12,483,872.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	183,381,277	179,365,600.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,799,475	19,148,970.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	183,252,886	176,201,080.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,998,770	22,423,286.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	181,255,898	171,315,481.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,578,574	7,650,707.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	172,675,000	149,649,925.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,271,322	9,759,484.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	167,735,500	160,992,485.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,892,744	13,836,639.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	183,698,100	157,284,750.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,422,452	10,953,204.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	183,421,068	160,118,336.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,669,328	11,717,471.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	186,182,712	155,708,018.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,776,920	13,887,090.00
7.01.03	Program Pemberdayaan	182,799,250	172,546,900.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
	Jumlah	40,705,999,110	38,739,732,347.00
38	Kecamatan Medan Baru	24,050,551,431	23,119,528,583
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,068,935,614	12,265,941,050.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9,269,552,399	9,232,280,890.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74,640,000	72,240,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	139,200,000	137,917,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	168,437,210	163,987,388.00
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21,540,000	21,540,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,407,864	11,851,410.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	190,756,492	185,485,176.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,337,326	14,241,960.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	201,326,640	198,214,031.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,334,685	6,094,280.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	210,607,340	205,748,390.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,455,278	15,871,700.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	208,279,848	206,992,226.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,831,875	19,139,641.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,584,568	7,048,540.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	185,827,748	166,385,988.00
	Jumlah	24,050,551,431	23,119,528,583.00
39	Kecamatan Medan Polonia	19,568,165,338	19,015,099,475
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,853,780,702	9,608,799,245.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8,306,951,588	8,267,015,270.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	51,397,120	50,140,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	126,300,000	126,300,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	182,764,282	181,235,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34,718,940	30,629,021.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	202,200,719	122,158,591.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78,881,156	34,535,862.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	121,117,360	111,909,470.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60,321,586	42,157,130.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	144,675,000	88,505,903.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,800,000	6,800,000.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	198,295,000	192,812,323.90
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,001,885	22,571,200.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	172,960,000	129,530,460.00
	Jumlah	19,568,165,338	19,015,099,475.90
40	Kecamatan Medan Tembung	30,458,602,049	29,264,237,032
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,439,327,314	15,559,604,366.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	12,027,786,490	11,996,077,140.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	124,400,000	117,600,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	322,590,288	293,813,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38,343,668	26,214,044.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	197,056,000	170,645,031.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,931,025	28,145,508.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	113,750,000	86,354,235.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,249,684	28,895,424.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kabupaten/Kota		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	195,288,000	180,883,786.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,606,220	27,828,289.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,419,000	189,224,776.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,729,482	30,852,538.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	196,112,000	159,352,500.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,706,196	20,806,658.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	173,704,000	141,956,812.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,338,682	37,245,265.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	182,264,000	168,737,660.00
	Jumlah	30,458,602,049	29,264,237,032.00
41	Kecamatan Medan Perjuangan	34,638,643,133	32,163,283,199
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,530,881,800	14,842,398,910.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15,457,478,371	15,218,280,397.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	103,687,100	96,577,100.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	178,201,800	177,689,900.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Umum		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	423,746,173	393,467,873.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,798,616	11,267,235.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,609,160	111,833,873.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,154,397	9,125,066.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,323,200	184,904,490.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,110,555	13,385,393.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,009,750	95,723,690.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,628,550	13,510,990.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,495,920	179,269,689.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,073,758	16,946,551.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	196,287,100	157,893,805.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,623,503	11,564,910.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	192,156,755	179,488,122.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,713,435	10,343,383.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	170,941,136	99,123,956.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,993,900	11,437,903.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,764,548	150,930,442.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,350,210	12,889,232.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,613,396	165,230,290.00
	Jumlah	34,638,643,133	32,163,283,200.00
42	Kecamatan Medan Barat	29,818,134,404	27,474,152,903
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,070,534,067	10,252,771,471.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15,307,448,054	15,089,623,060.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	141,338,500	136,960,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	186,360,000	184,960,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	470,628,760	449,078,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,937,736	48,118,245.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	196,620,230	183,764,449.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66,104,851	54,341,669.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	194,070,000	181,785,371.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,303,920	76,120,889.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,910,750	183,641,868.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,359,569	48,723,481.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	201,628,000	155,563,600.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,933,302	63,875,907.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	198,945,360	141,271,425.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74,376,305	55,013,947.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,635,000	168,539,521.00
	Jumlah	29,818,134,404	27,474,152,903.00
43	Kecamatan Medan Tuntungan	34,002,826,208	32,723,601,630
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,149,672,236	16,216,424,389.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10,879,703,074	10,833,779,100.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	162,980,970	149,715,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	268,246,477	262,668,704.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,821,167,893	3,738,828,009.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,044,304	18,799,950.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kabupaten/Kota		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	181,499,424	169,605,792.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,680,464	18,845,900.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	178,626,831	148,877,261.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,299,250	10,664,786.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	180,793,656	162,990,680.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,752,285	22,558,200.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	166,359,237	155,521,865.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,438,982	6,581,400.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	173,810,000	161,380,269.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,041,411	19,816,305.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	160,019,495	150,379,632.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,668,732	12,871,000.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	142,909,750	130,595,314.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,776,072	15,876,176.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kabupaten/Kota		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	182,047,622	152,889,254.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,823,907	17,721,760.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	182,464,136	146,210,884.00
	Jumlah	34,002,826,208	32,723,601,630.00
44	Kecamatan Medan Petisah	29,059,567,549	27,481,315,672
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,379,696,613	12,327,872,890.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13,277,348,531	13,158,751,595.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	129,491,020	129,265,360.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	190,994,860	189,370,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	252,616,080	250,889,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58,905,535	45,610,411.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,891,872	169,281,700.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60,997,771	53,107,383.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,038,068	199,738,125.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67,625,812	60,910,551.00
7.01.03	Program Pemberdayaan	200,234,408	188,566,674.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,505,993	45,482,669.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,158,840	76,373,670.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61,484,589	50,766,964.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,058,001	131,229,559.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,079,300	55,597,876.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,929,800	171,034,125.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61,532,760	46,111,645.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,977,696	131,355,475.00
	Jumlah	29,059,567,549	27,481,315,672.00
45	Kecamatan Medan Petisah	29,059,567,549	27,481,315,672
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,379,696,613	12,327,872,890.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13,277,348,531	13,158,751,595.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	129,491,020	129,265,360.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	190,994,860	189,370,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	252,616,080	250,889,000.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58,905,535	45,610,411.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,891,872	169,281,700.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60,997,771	53,107,383.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,038,068	199,738,125.00
7.01.01	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	67,625,812	60,910,551.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,234,408	188,566,674.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,505,993	45,482,669.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,158,840	76,373,670.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61,484,589	50,766,964.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,058,001	131,229,559.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,079,300	55,597,876.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,929,800	171,034,125.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61,532,760	46,111,645.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,977,696	131,355,475.00
	Jumlah	29,059,567,549	27,481,315,672.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
46	Kecamatan Medan Johor	26,307,958,723	25,348,809,855
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,682,216,930	13,000,492,496.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11,054,657,721	10,914,301,555.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	126,111,833	115,294,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	117,600,000	117,600,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	315,031,760	303,976,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,440,746	9,833,944.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	136,522,000	135,807,526.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,285,800	20,234,402.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	137,215,000	136,000,125.00
7.01.01	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	33,531,200	16,563,500.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,843,000	22,583,915.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	138,383,000	135,505,114.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,323,933	16,544,521.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	135,976,000	134,574,684.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,285,800	16,174,111.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	135,100,000	133,430,510.00
	Jumlah	26,307,958,723	25,348,809,855.00
47	Kecamatan Medan Maimun	22,767,849,048	22,021,026,860
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,387,537,917	9,884,390,801.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10,503,570,385	10,429,680,265.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	103,740,000	103,740,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	196,225,000	186,644,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	254,040,000	247,783,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65,657,501	60,199,160.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	151,100,262	137,027,003.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72,199,999	64,588,979.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	151,482,870	136,729,650.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71,000,000	60,021,210.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	150,988,352	136,787,350.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70,618,601	57,992,616.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	149,607,043	146,764,464.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65,772,966	58,062,996.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	149,277,764	112,417,433.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71,171,252	52,174,567.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	153,859,136	146,023,366.00
	Jumlah	22,970,849,048	22,187,268,680.00
48	Kecamatan Medan Deli	25,046,254,602	24,139,615,158
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,725,273,855	11,102,247,111.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11,427,487,696	11,358,043,010.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	108,541,300	102,105,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	212,400,000	212,284,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	155,521,000	153,579,500.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43,525,380	36,419,345.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	198150000	142456201.60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,385,966	37,605,511.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	198150000	197124839.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43,764,543	33,961,048.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	206790000	181353930.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46,520,855	39,455,993.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	155,533,000	147,668,459.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47,811,547	40,472,879.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	188,510,000	172,447,172.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,254,460	36,584,457.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,635,000	145,806,703.00
	Jumlah	25,046,254,602	24,139,615,158.60
49	Kecamatan Medan Amplas	29,307,750,173	27,524,867,860
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,624,494,986	14,157,896,649.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11,352,811,145	11,236,235,867.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	152,643,982	143,890,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	167,650,000	167,650,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	357,585,822	323,690,000.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,197,417	53,559,861.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	178,662,690	162,445,599.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52,281,546	50,964,150.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	180,861,000	159,764,549.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70,430,754	70,119,719.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	176,932,700	173,261,735.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65,920,457	60,633,511.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	180,889,958	166,189,740.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,200,000	50,465,710.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	157,821,350	113,972,360.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,213,866	50,923,210.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	179,672,500	161,242,805.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57,325,000	53,559,150.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	174,155,000	168,403,245.00
	Jumlah	29,307,750,173	27,524,867,860.00
50	Kecamatan Medan Sunggal	31,164,222,908	29,166,812,657
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,719,698,602	16,243,121,431.00

ode	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kabupaten/Kota		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11,019,203,420	10,819,056,823.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	111,499,878	93,960,000.00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	112,536,250	111,225,000.00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	674,700,030	651,732,000.00
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	333,339,717	280,431,400.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,987,792	191,307,250.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	195,707,048	167,556,092.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,047,000	156,669,343.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199,996,477	94,650,420.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200,000,000	187,100,625.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	197,506,694	170,002,273.00
	Jumlah	31,164,222,908	29,166,812,657.00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah

Adapun permasalahan strategis pembangunan kota yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Medan, antara lain:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan sejak periode tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi -1,98 persen menjadu 5,60 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan Ekonomi Propinsi dan rata rata nasional, pertumbuhan Ekonomi Kota Medan masih menunjukkan trend yang positif, akan tetapi pada capaian LPE tahun 2020 berkontraksi sangat dalam disebabkan pandemi Covid-19. Perlambatan perekonomian Kota Medan lebih tinggi dari kontrakasi perekonomian yang dialami oleh Propinsi Sumatera Utara dan hal ini harus dicermati khususnya sektor sektor yang mengalami penurunan yang signifikan.

2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kota Medan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020 sebesar 10,73 % menjadi 8,30 % pada tahun 2024. Sementara capaian tingkat propinsi Sumatera Utara hanya sebesar 5,60 %, tentu hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan karena dengan tingginya angka pengangguran terbuka dikhawatirkan memberi dampak pada aspek sosial, gangguan kamtibmas, meningkatnya angka kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya.

3. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Indeks pemerataan pendapatan Kota medan berfluktuasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024, di kisaran angka 0,34 dan termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Kota Medan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Medan dengan upaya peningkatan pemerataan pendapatan.

4. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024 Pemerintah Kota Medan belum dapat menurunkan jumlah penduduk miskin yakni dari 8,01 % jiwa pada tahun 2020 menjadi 7,94% jiwa pada tahun 2024. Secara persentase angka kemiskinan di Kota Medan masih dikategorikan rendah tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara maka jumlah penduduk miskin Kota Medan sangat besar. Untuk itu perlu upaya dari Pemerintah Kota untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Medan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Disamping itu pernyataan

visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu- isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”*

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah

Medan Kota yang Berkah adalah kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religius warganya, baik lahir dan batin, juga menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu sebagai bagian dari kepedulian dan pengokohan sosial. Disamping itu menuju kota sejahtera yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan, kota yang bebas dari korupsi dan narkoba. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat untuk terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata

2. Medan menjadi Kota yang Maju

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan dan tanggungjawab seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan kota maupun masyarakat selama lima tahun ke depan, maka misi pembangunan kota tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah

dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Kota bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang

menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Kota Medan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun program yang berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Medan adalah.

Tabel 1.12.

Tujuan, Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
DINAS PENDIDIKAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5	Pendidikan Anak Usia Dini
6	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7	Pendidikan Non Formal
DINAS KESEHATAN	
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
2	Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
3	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
4	Program Ekspansi Rumah Sakit
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan
7	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA
14	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan RS
23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS PEKERJAAN UMUM	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
7	Program Pembangunan Drainase Dan Gorong-Gorong
8	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
9	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Bronjong
10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
11	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan (Dana Dak)
12	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Dana Dak)
13	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan (Dana Bantuan Keuangan Propinsi)
14	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Dana Bantuan Keuangan Propinsi)
15	Program Pembangunan Drainase Dan Gorong-Gorong (Dana Bantuan Keuangan Propinsi)
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
17	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
18	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
20	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
DINAS PERKIM DAN TARU	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Pengembangan Perumahan
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan
8	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
9	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan
10	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
11	Program Perencanaan Tata Ruang
12	Program Pemanfaatan Ruang

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
15	Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
DINAS P2K	
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5	Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6	Program peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
BADAN KESBANG POL LINMAS	
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak kriminal
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat
7	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
8	Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SAT POL PP	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
10	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
11	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
12	Program Penertiban Reklame
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban bencana Alam
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
DINAS SOSIAL	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari - Hari Besar
5	Program Pengembangan Data / Informasi
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
9	Program Undian dan Pengumpulan Uang
10	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/ Kesetiakawanan Sosial
11	Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
13	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Program Pembinaan para Penyandang Cacat Trauma
16	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
DINAS Ketenagakerjaan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari- Hari Besar Lainnya
6	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
7	Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal
8	Program Pengembangan Data/Informasi
9	Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
11	Program Undian dan Pengumpulan Uang
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
9	Program Dharma Wanita Persatuan Kota Medan
10	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
11	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
12	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
14	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
DINAS KETAHANAN PANGAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Disverifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
11	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
13	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (dlm 4 prog)
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
8	Lampu Penerangan Jalan Umum
9	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan
7	Program Pengembangan Data / Informasi
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	Program Keluarga Berencana
2	Program Pelayanan Kontrasepsi
3	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak
5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
7	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
8	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
9	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
10	Program Pengendalian Penduduk
11	Program Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
12	Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
DINAS PERHUBUNGAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
8	Pogram peningkatan pelayanan angkutan
9	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
11	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	Pelayanan administrasi kantor
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan disiplin aparatur
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
6	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
7	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatasi
8	Kerjasama informasi dengan media massa
9	Pelayanan dan pengamanan persandian
DINAS KOPERASI DAN UKM	
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10	Penanggulangan Kemiskinan
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
6	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
7	Peningkatan Pelayanan Perijinan

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
8	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10	Program kerja sama Informasi dengan mass media
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
7	Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
8	Program Pengembangan Kebijakan, Manajemen Pemuda dan Olah Raga
9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
10	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga
11	Program Pembinaan Generasi Muda
12	Program Pengembangan Data dan Informasi
DINAS KEBUDAYAAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
10	Program Pengembangan Kemitraan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
8	Program Peningkatan Rapat-rapat / Konsultasi ke Luar Daerah
9	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
10	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
11	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS PARIWISATA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8	Program Pengembangan Kemitraan
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
7	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
9	Peningkatan Promosi dan Investasi
10	Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
11	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
12	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
14	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
15	Pengembangan Budidaya Perikanan
16	Pengembangan Perikanan Tangkap
17	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
18	Peningkatan Kesejahteraan Petani
19	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
20	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
DINAS PERDAGANGAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
7	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
DINAS PERINDUSTRIAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
7	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
8	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Teknologi
9	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
10	Pegembangan Sentra Sentra Industri Potensial
11	Program Penanggulangan Kemiskinan
SEKRETARIAT DAERAH	
BAGIAN ADM PEMBANGUNAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan
BAGIAN ADM PEREKONOMIAN	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3	Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan
4	Peningkatan Ketahanan Pangan
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Kecil Menengah
7	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTAR KOTA, DAERAH, LEMBAGA	
1	Program Kerjasama Pembangunan
2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
3	Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
BAGIAN KEAGAMAAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
BAGIAN ADM PEMERINTAHAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
BAGIAN UMUM	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Pengembangan Data/Informasi
7	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
9	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
10	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
7	Program Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi
8	Program Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan
9	Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga
10	Program Pengembangan Analisa Media dan Informasi
BAGIAN HUKUM	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6	Program Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan
2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
8	Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9	Program Pengembangan Data dan Informasi
BAGIAN SOSIAL, PENDIDIKAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparatur
4	Program Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
5	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
7	Program Perlindungan / Peningkatan dan Pengembangan Lembaga dan Ketenagakerjaan
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
9	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
10	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
11	Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
3	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
4	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
7	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
8	Program kerjasama dengan mass media
KECAMATAN	
MEDAN BELAWAN	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5	Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan
6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar
8	Penanggulangan Kemiskinan
9	Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
10	Pendidikan Anak Usia Dini
11	Pengembangan Lingkungan Sehat
12	Pengembangan Data/Informasi
13	Penataan Administrasi Kependudukan
14	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
15	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
MEDAN LABUHAN	
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparatur
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Program penataan administrasi kependudukan
6	Pendidikan Anak Usia Dini
7	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
9	Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
11	Program Penanggulangan Kemiskinan
12	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
14	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
15	Program Sarana dan Prasarana
MEDAN KOTA	
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini
6	Pogram peningkatan dan pemberdayaan kecamatan/ kelurahan
7	Program Pemeliharaan Infrastruktur
8	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
11	Penataan Administrasi Kependudukan
12	Program Penanggulangan Kemiskinan
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
14	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
MEDAN TIMUR	

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparatur
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6	Program Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan
7	Program Pengembangan Data dan informasi
8	Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
11	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
12	Penanggulangan Kemiskinan
13	Program pendidikan anak usia Dini
14	Pengembangan Lingkungan Sehat
15	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
16	Program upaya Pencegahan Penanggulangan narkoba
MEDAN HELVETIA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
5	Program Pengembangan Data/Informasi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
8	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
9	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
11	Program Penanggulangan Kemiskinan
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
MEDAN MARELAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Pengembangan Data/ Informasi
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5	Program perencanaan pembangunan daerah
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
8	Program peningkatan peran serta kepemudaan
9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
11	Program Penanggulangan kemiskinan
12	Program Pendidikan Anak Usia Dini
13	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
14	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
MEDAN DENAI	
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini
7	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan
8	Program pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
9	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
13	Program Penanggulangan Kemiskinan
MEDAN AREA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan
6	Program Pengembangan Data/ Informasi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Nasional
9	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan
10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
11	Program Penanggulangan Kemiskinan
12	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
13	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
14	Program Pengembangan Olahraga Berprestasi
15	Program Sarana dan Prasarana Lingkungan
MEDAN BARU	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
4	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
10	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
12	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan
13	Program Penanggulangan Kemiskinan
14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Program Pengembangan Data/Informasi
17	Program Penata Administrasi Kependudukan
MEDAN POLONIA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
7	Program Pengembangan Papan Data/Informasi
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
11	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
12	Program Pendidikan Anak Usia Dini
13	Pengembangan Lingkungan Sehat
14	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
15	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan
16	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
17	Penanggulangan Kemiskinan
MEDAN TEMBUNG	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
3	program Peningkatan disiplin aparatur
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
6	Program pendidikan anak usia dini
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan
8	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
10	Program perencanaan pembangunan daerah
11	Program Pengembangan data/informasi
12	Program penanggulangan kemiskinan
13	Program pengembangan lingkungan sehat
14	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari - hari Besar
15	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan
16	Program Pemeliharaan Infrastruktur
MEDAN PERJUANGAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
9	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
10	Program Penanggulangan Kemiskinan
11	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari Hari Besar
14	Program Penataan Administrasi Kependudukan
15	Program Pengembangan Data /Informasi
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
MEDAN BARAT	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Kapasitas SD Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Kemanan
9	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
10	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Program Pengembangan Data / Informasi
13	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
14	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
15	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan hari - hari besar
16	Program Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
17	Program Penanggulangan Kemiskinan
18	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
19	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
20	Program Pembinaan dan Per masyarakatan Olah Raga
21	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
MEDAN TUNTUNGAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Perencana Pembangunan Daerah
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
8	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan
9	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
10	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini
12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
13	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
14	Program Penanggulangan Kemiskinan
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
16	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
17	Program Pengembangan Data/ Informasi
18	Program Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah
MEDAN SELAYANG	
1	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari - hari Besar
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
12	Program pendidikan anak usia dini
13	Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
MEDAN PETISAH	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Program Pengembangan Data/Informasi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
8	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
9	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
11	Program Penanggulangan Kemiskinan
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
MEDAN JOHOR	
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini
7	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan
8	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
9	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
13	Program Penanggulangan Kemiskinan
MEDAN MAIMUN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Program Penanggulangan Kemiskinan
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
12	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
13	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
14	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan
15	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
MEDAN DELI	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan
7	Pengembangan Lingkungan Sehat
8	Pendidikan Anak Usia Dini
9	Penanggulangan Kemiskinan
10	Pengembangan Data/Informasi
11	Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
13	Penataan Administrasi Kependudukan
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan
15	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
MEDAN AMPLAS	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6	Pendidikan Anak Usia Dini
7	Penataan Administrasi Kependudukan
8	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan.
9	Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Penanggulangan Kemiskinan
11	Pengembangan Data/ Informasi
12	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar
13	Program pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan
14	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
15	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
16	Pengembangan Lingkungan Sehat
17	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
MEDAN SUNGGAL	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparat

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7	Program perencanaan pembangunan daerah
8	Program Penanggulangan Kemiskinan
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
11	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan
12	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
13	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
INSPEKTORAT	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparatur
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
BAPPEDA	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Pengembangan Data dan Informasi
3	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
4	Program Perencanaan Pembanguunan Sosial Budaya
5	Penanggulangan Kemiskinan
6	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
7	Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
12	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
1	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2	Program Pengembangan Data / Informasi
3	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
4	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6	Program peningkatan dalam sarana dan prasarana aparatur
7	Program peningkatan disiplin aparatur
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

No	Program Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
	keuangan
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan
10	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
11	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
12	Program Perlindungan Hukum dan Penegakan HAM
13	Program Pembinaan Usaha, Keterampilan dan Bantuan Sosial Anggota dan Keluarga
14	Program Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya
15	Program Pembinaan Mental dan Rohani
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
7	Program Kerjasama informasi dengan Mass Media
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
10	Program Peningkatan Pelayanan Kerjasama antar Pemerintah Daerah.
11	Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kep. Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Adapun kegiatan pembangunan sesuai rencana pembangunan tahun pada tahun 2024 diantaranya adalah:

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	KABUPATEN/KOTA
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
6	Dinas Sosial
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Daerah
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
7	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Dinas Lingkungan Hidup
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.13	Penataan Organisasi
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
14	Dinas Perhubungan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Daerah
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	PELAYANAN DASAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
20	Dinas Pariwisata
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
21	SEKRETARIAT DAERAH
	Bagian Perekonomian
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Bagian Umum
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Bagian Hukum
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	Bagian Kerja Sama
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
	Bagian Organisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Bagian Sumber Daya Alam
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	SEKRETARIAT DPRD
22	Sekretariat DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	PERENCANAAN
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Alam)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	KEUANGAN
24	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	KEUANGAN
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	KEPEGAWAIAN
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
	INSPEKTORAT DAERAH
29	Inspektorat
6.01.01	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.02	PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	UNSUR KEWILAYAHAN
	KECAMATAN
30	Kecamatan Medan Belawan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
31	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
32	Kecamatan Medan Kota
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
34	Kecamatan Medan Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
36	Kecamatan Medan Helvetia
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Kecamatan Medan Marelan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
38	Kecamatan Medan Denai
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
39	Kecamatan Medan Area
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
40	Kecamatan Medan Baru
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
41	Kecamatan Medan Polonia
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
42	Kecamatan Medan Tembung
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
43	Kecamatan Medan Perjuangan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
44	Kecamatan Medan Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Kecamatan Medan Tuntungan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Kecamatan Medan Petisah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
45	Kecamatan Medan Petisah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
46	Kecamatan Medan Johor
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
47	Kecamatan Medan Maimun
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
48	Kecamatan Medan Deli

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
49	Kecamatan Medan Amplas
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
	KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
50	Kecamatan Medan Sunggal
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kode	Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
[1]	[2]
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Penerapan Standard Pelayanan Minimal

Peraturan perundang - undangan yang mendasari penerapan standar pelayanan minimal berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;

b. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan strategi dan teknik pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan. Adapun yang menjadi Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah *“ Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”*

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan, maka arah kebijakan umum daerah dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024 antara lain:

1. Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Medan Berkah
 - a) Peningkatan pelaku usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
 - b) Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi social
 - c) Penguatan lintas sektor dalam penanganan bencana dan perlindungan social
 - d) Meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin

2. Dalam mewujudkan Misi Kedua: Medan Maju
 - a) Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern, dan berkualitas melalui peningkatan tenaga pendidik PAUD
 - b) Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan PAUD di kelurahan
 - c) Peningkatan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan sesuai dengan standarisasi pelayanan
 - d) Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine
 - e) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) dan gizi Masyarakat
 - f) Mendorong penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menula
 - g) Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta
 - h) Memperkuat pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Dalam mewujudkan Misi Ketiga: Medan Bersih.
 - a) Peningkatan Kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota.
 - b) Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan.
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan.
 - d) Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri.
 - e) menyiapkan flatform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
4. Dalam mewujudkan Misi Keempat: Medan Membangun
 - a) Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
 - b) Memberikan insentif untuk investasi dalam infrastruktur energi terbarukan.
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mengendalikan aliran air, seperti saluran drainase dan sistem pengaturan air.
5. Dalam mewujudkan Misi Kelima: Medan Kondusif
 - a) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan.
 - b) Meningkatkan Kerjasama kelompok produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba
 - c) Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah
6. Dalam mewujudkan Misi Keenam: Medan Inovatif
 - a) Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan.

- b) Menggiatkan aktivitas promosi potensi investasi
 - c) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM
 - d) Meningkatnya koordinasi antar lembaga lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan sektor UMKM
 - e) Pengoptimalan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta sektor pariwisata untuk mendorong pendapatan daerah
 - f) Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders
7. Dalam mewujudkan Misi Ketujuh: Medan Beridentitas
- a) Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional
 - b) Melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya.
 - c) Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya.

b. Gambaran Orientasi Dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Selama Satu Tahun Dalam Rangka Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran 2024

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kota Medan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021. Pada tahun

2024 ada 8 (delapan) OPD yang melaksanakan standar pelayanan minimal yakni dengan masing-masing kebijakan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan kota urusan Pendidikan yang semakin berkualitas, maka kebijakan penyelenggaraan urusan Pendidikan tahun 2024 diarahkan kepada:

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan melalui pendekatan Merdeka Belajar
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah
- d. Pengembangan Kurikulum
- e. Mengefektifkan Program ekstrakurikuler

2. Dinas Kesehatan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kesehatan, maka Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2024 diarahkan kepada:

- a. Peningkatan Pelayanan BLUD.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat.
- c. Peningkatan Akses, cakupan dan kualitas layanan jaminan kesehatan Masyarakat.
- d. Meningkatkan antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit pandemi.

3. Dinas Sumber Daya, Air Bina Marga dan Bina Konstruksi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan maka arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi tahun 2024 diarahkan kepada:

- a. Peningkatan infrastruktur jalan.
- b. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir.
- c. Peningkatan kondisi drainase kota dan lingkungan.
- d. Peningkatan Ppedestarian
- e. Penyelesaian kegiatan yang bersifat tahun jamak.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Dalam rangka mewujudkan sasan urusan perumahan, kawasan pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditetapkan Tata Ruang maka arah kebijakan pokok tahun 2024 diarahkan kepada:

- a. Akses SPAM terhadap seluruh rumah tangga di Kota Medan..
- b. Akses layanan air limbah terhadap rumah tangga di Kota Medan
- c. Penataan bangunan dan gedung yang layak huni.
- d. Penataan Kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman
- e. Penataan Kawasan permukiman layak huni
- f. Pengendalian perumahan yang tertib

- g. Penyelesaian dan ganti rugi terhadap penyediaan lahan pembangunan kota
- h. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang bersifat tahun jamak

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan pencapaian waktu tanggap kebakaran.
- b. Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran, khususnya UPT.
- c. Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap kebakaran.

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum maka Kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diarahkan kepada:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Penegakan dan pembinaan hukum daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama perlindungan Masyarakat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana maka perubahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan kepada:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
- b. Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

8. Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang sosial maka perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial diarahkan kepada:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
- b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
- c. Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas.
- d. Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapat diketahui dari berbagai indikator kinerja dalam berbagai bidang. Bagaimana keberhasilan suatu daerah dalam pelayanan publik diukur dari sejauh mana capaian yang diperoleh daerah dimaksud terkait berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui beberapa capaian indikator kinerja antara lain : Indikator Kinerja Makro; Indikator Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (IKK Hasil/Outcome), dan Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Sampai sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan terkait berbagai indikator tersebut akan diuraikan berikutnya

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja Pemerintah Kota Medan berkaitan dengan kinerja makro diukur dari beberapa indikator kinerja makro yang secara garis besar terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja makro tersebut menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial yang dialami dan terjadi di Kota Medan selama periode yang diperhitungkan. Perkembangan capaian kinerja makro Kota Medan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.1. berikut.

Table 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Medan Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	82,61	83,23	0.75
2.	Angka Kemiskinan	8.00%	7,94%	(0.06)
3.	Angka Pengangguran	8.67%	8,13%	(0.62)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,04%	5,07%	(0.59)
5.	Pendapatan Perkapita	Rp 122,59 juta	Rp 132,57 juta	(8.14)
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,373	0,356	(-4,55)

Table 2.1. di atas mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi Kota Medan tahun 2024 relative mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum indikator kinerja makro tahun 2024 mengalami peningkatan atau perbaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa indikator dengan angka yang menunjukkan adanya perbaikan antara lain adalah Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi, Demikian juga Penurunan Angka Kemiskinan dan Penurunan Angka Pengangguran. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja makro Pemerintah Kota Medan tahun 2024 relatif mengalami peningkatan atau lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menggambarkan bagaimana realisasi capaian kinerja yang berhasil diperoleh/diraih atas berbagai indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diukur dari berbagai jenis indikator kinerja kunci (IKK) yang secara umum menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sesuai dengan konsep tersebut maka indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau *Outcome* akan menunjukkan pencapaian kinerja berupa kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai setidaknya pada suatu rentang waktu/periode tertentu. Capaian atas kondisi dimaksud bergantung kepada atau merupakan fungsi dari output yang dihasilkan atas kegiatan tertentu.

Jenis indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau *Outcome* disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah indikator yang berbeda-beda. Capaian yang diraih Pemerintah Kota Medan atas indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau *Outcome* untuk tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)
Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan.	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77.163 -----x 100% = 99.49% 77.555	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Dapodik, Emis (RA)	-
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	266.112 -----x 100% =103.18% 257.890	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik, Emis (MI)	-
		3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	136.473 -----x 100% =102.47% 133.174	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik, Emis (MTs)	-
		4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	14.056 ----- x 100% = 88,60% 15.863	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
2	Kesehatan.	5.	Rasio daya tamping Rumah Sakit (RS) Rujukan	9.098 -----x 100% = 0,36% 2.539.829	Dinas Kesehatan : Bidang Yankes	-
		6.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	66 ----- x 100% = 97,06% 68	Dinas Kesehatan : Bidang Yankes	-
		7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	36.116 ----- x 100% = 96,81% 37.306	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	35.618 -----x 100% = 96,11% 37.060	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	34.840 -----x 100% = 97,80% 35.623	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	183.188 -----x 100% = 98,50% 185.978	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		11.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.312 -----x 100% = 22,07% 391.064	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		12.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1.236.076 -----x 100% =72,79% 1.698.202	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	255.895 -----x 100% = 88,72% 288.441	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	313.265 ----- x 100% =64,98% 482.112	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		15.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36.072 -----x 100% = 81,62% 44.194	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3.310 -----x 100% = 95,09% 3.481	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	44.582 -----x 100% = 85,86% 51.925	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	66.704 ----- x 100% = 89,97% 74.141	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
3	Pekerjaan Umum	19.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	155,61 ----- x 100% = 27,13% 573,51	Dinas Sumber Daya Alam, Bina Marga, Bina Konstruksi (SDA, BM,BK)	Kawasan permukiman di wilayah sungai merupakan kewenangan Pem. Pusat c.q. Kementerian PU-PR
		20.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	-	KOTA MEDAN TIDAK MEMILIKI SUNGAI KEWENANGAN	Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS merupakan kewenangan Pem. Pusat c.q. Kementerian PUPR
		21.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	KOTA MEDAN TIDAK MEMILIKI IRIGASI KEWENANGAN	Kota Medan tidak memiliki Daerah Irigasi sesuai dengan Permen PUPR No.14/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
		22.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	98,75%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya & Tata Ruang (PKP,CK,TR)	-
		23.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	96,18%	Dinas PKP,CK,TR	-
		24.	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/kota	377 -----x 100% = 100% 377	Dinas PKP,CK,TR	-
		25.	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	3.279,5 -----x 100% = 100% 3.279,5	Dinas Sumber Daya Alam, Bina Marga, Bina Konstruksi (SDA, BM,BK)	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		26.	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	846 -----x 100% = 66,71% 1.265	Dinas SDA, BM,BK	-
		27.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	108 ----- x 100% = 100% 108	Dinas SDA, BM,BK	-
4	Perumahan Rakyat	28.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	-	KOTA MEDAN TIDAK TERJADI BENCANA ALAM PADA TAHUN 2024	Pada T.A 2024 dianggarkan Program/ kegiatan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana pada sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebesar Rp 200 juta dan sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana sebesar Rp 200 juta. Namun tidak terealisasi karena tidak ada terjadi bencana alam tahun 2024
		29.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kab/Kota	88 ----- x 100% = 100% 88	Dinas PKP,CK, TR	
		30.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	207,31 -----x 100% =40,92% 506,6	- Dinas PKP,CK,TR - KOTAKU	-
		31.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	21.044 -----x 100% =5.50% 382.828	- Dinas PKP,CK,TR KOTAKU	-
		32.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2.164 -----x 100% = 100% 2.164	- Dinas PKP,CK,TR KOTAKU	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	131 ----- x 100% = 100% 131	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	---
		34.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	26 -----x 100% = 100% 26	Satpol PP	---

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		35.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.427.186 -----x 100% = 100% 1.427.186	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	-
		36.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	522.747 -----x 100% = 36,62% 1 427.186	BPBD	-
		37.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	35.224 -----x 100% = 100% 35.224	BPBD	-
		38	Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	263 -----x 100% = 97,77% 269	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)	-
		39.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	8,71 menit	DPKP	-
6	Sosial	40.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	4.272 -----x 100% = 100% 4.272	Dinas Sosial	-
		41.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	20.689 -----x 100% = 100% 20.689	Dinas Sosial	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
7	Tenaga Kerja-	42.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Dinas Tenaga Kerja : Subbag Penyusunan Program	- Dokumen RTKD belum tersusun sehingga tidak dapat membandingkan jumlah kegiatan yang mengacu ke RTKD dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota. - Kegiatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kota Medan telah dianggarkan pada tahun 2024 tetapi tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan efektifitas kinerja pada pelaksanaan APBD TA.2024
		43.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{1.707}{218.064} \times 100\% = 0,78\%$	Dinas Tenaga Kerja Subbag Sertifikasi : Medan Dalam Angka;	-
		44.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{182.242.590,63}{1.169.324} \times 1 = \text{Rp } 15.585$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Produktivitas Tenaga Kerja & Pemagangan	-
		45.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{17.128}{19.822} \times 100\% = 86,41\%$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Kelembagaan, Pengupahan, Syarat Kerja, Jaminan Sosial dan Purna Kerja	-
		46.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab/Kota	$\frac{1.899}{2.293} \times 100\% = 82,82\%$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{4.997.648.178.136}{7.209.877.216.417} \times 100\% = 69,31\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A, PM dan PP-KB)	-
		48.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kab/Kota	$\frac{117}{117} \times 100\% = 100\%$	Dinas P3A, PM dan PP-KB : APLIKASI SIMFONI PPA	-
		49.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{49}{332.156} \times 100.000 = 14,75$	Dinas P3A, PM dan PP-KB : APLIKASI SIMFONI PPA	-
9	Pangan	50.	Persentase cadangan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{9,60 \text{ ton}}{139 \text{ ton}} \times 100\% = 6,91\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
10	Pertanahan	51.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{7.432.495}{7.432.495} \times 100\% = 100\%$	Dinas PKP,CK,TR	-
		52.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{70.362}{25.751} \times 100\% = 273,23\%$	Dinas PKP,CK,TR	-
		53.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{1.361.575}{2.046.671} \times 100\% = 66,56\%$	Dinas PKP,CK,TR	-
		54.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	Dinas PKP,CK,TR	Data Tanah Obyek Landreform (TOL) merupakan kewenangan Pem. Pusat c.q. Kementerian PU-PR
		55.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	Dinas PKP,CK,TR	Data tanah untuk masyarakat merupakan kewenangan Pem. Pusat c.q. Kementerian PU-PR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		56.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	15 -----x 100% = 100% 15	Dinas PKP,CK,TR Bag. Hukum Setda	-
11	Lingkungan Hidup	57.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKA = 23,61 ; IKU = 32,55 ; IKL = 7,54 IKLH = 23,61 + 32,55 + 7,54 = 63,69	Dinas Lingkungan Hidup	-
		58.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	601.930,57 Ton/Thn -----x 100% = 94,96 % 633.881,33 Ton/Thn	Dinas Lingkungan Hidup	-
		59.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80 ----- x 100% = 37,2 % 215	Dinas Lingkungan Hidup	-
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	1.846.653 -----x 100% = 98,31% 1.878.308	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	339.893 -----x 100% = 50,87% 668.140	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		62	Kepemilikan akta kelahiran	648.149 -----x 100% = 94,21% 687.961	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian	25 -----x 100% = 100% 25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	64.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	Dinas P3A, PM dan PP-KB	Surat Keterangan : Tidak ada desa di Kota Medan
		65.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	Dinas P3A, PM dan PP-KB	Surat Keterangan : Tidak ada desa di Kota Medan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	66.	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,87	BPS ; Dinas P3A, PM dan PP-KB	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
	Berencana	67.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	136.552 -----x 100% 63,99% 213.381	Dinas P3A, PM dan PP-KB; SIGA	-
		68.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	22.129 -----x 100% =10,37% 213.318	Dinas P3A, PM dan PP-KB; SIGA	-
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kab/Kota	127 -----x 1 = 0,65 194	Data Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan TA. 2024	-
		70.	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0,72	Data Kinerja Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan TA. 2024	-
16	Komunikasi dan Informatika	71.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 -----x 100% = 100% 50	Dinas Kominfo	-
		72.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26 -----x 100% = 32,5% 80	Dinas Kominfo	-
		73.	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.798.772 -----x 100% = 70,9% 2.539.829	Dinas Kominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	107 -----x 100% = 17,37% 616	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang Koperasi	-
		75.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	631 -----x 100% =30,65% 2059	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang UMKM	-
18	Penanaman Modal	76.	Persentase peningkatan investasi di Kab /Kota	3.013.395.510.000 -----x 100% =45,50% 6.621.938.840.000	DPM-PTSP; BKPM RI	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
19	Kepemudaan dan Olah Raga.	77.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{7.451}{634.948} \times 100\% = 1,17\%$	Dispora; Disdukcapil; Diskop-UMKM Perindag	-
		78.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{579}{639.536} \times 100\% = 0,091\%$	Dispora; Bakesbangpol	-
		79.	Peningkatan Prestasi Olahraga	200 medali	Dispora; KONI; NPC;	-
20	Statistik.	80.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
		81.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
21	Persandian.	82.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{0}{645} \times 100\% = 0\%$	Dinas Kominfo	Belum dilaksanakan penilaian tingkat keamanan informasi dengan memakai Indeks KAMI dari BSSN
22	Kebudayaan.	83.	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{20}{126} \times 100\% = 15,87\%$	Dinas Kebudayaan : SK Walikota Medan No. 433/28.K/ X/ 2021	-
23	Perpustakaan.	84.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; Hasil Survey Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024	-
		85.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{(0,3218 + 0,0227 + 0,2263 + 0,0155 + 1,000 + 0,0979 + 1,000)}{7} = 38,35$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; Perpustakaan Nasional	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
24	Kearsipan.	86.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$(100 + 47,50 + 100 + 0)/4 = 60,6\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		87.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$(6,89 + 100 + 0 + 0 + 0 + 100)/6 = 34,48\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
25	Kelautan dan Perikanan.	88.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan Tangkap kapal < 5 GT sebanyak 23.107.447 Kg (23.107 ton) - Produksi Perikanan Budidaya 1.170.785 kg (1.170 ton) - Jumlah total = 24.278.232 kg (24.278 ton) 	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
26	Pariwisata.	89.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{30.900}{129.506} \times 100\% = 23,85\%$	Dinas Pariwisata	--
		90.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	$\frac{274.682}{263.489} \times 100\% = 104,24\%$	Dinas Pariwisata	--
		91.	Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{1.071.089}{3.239.740} \times 100\% = 33,06\%$	Dinas Pariwisata	--
		92.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (PDRB-ADHB)	$\frac{10.100,82}{329.609,17} \times 100\% = 3,06\%$	Dinas Pariwisata	--
		93.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	$\frac{612.326.236.242}{2.774,082,046.628,1} \times 100\% = 22,07\%$	Dinas Pariwisata	--
27	Pertanian.	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun)	$\frac{12.800,78 \text{ ton}}{2.008 \text{ ha}} \times 1 = 637,4 \text{ ton/ha}$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		95a.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Kasus Rabies)	Jumlah Kasus 2023 = 7 (+Rabies) Jumlah Kasus 2024 = 0 (+Rabies) Persen Penurunan -100 %-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Data Tidak Tersedia
		95b.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Kasus Avian Influenza))	Tahun 2023 Tidak ada laporan kejadian Tahun 2024 Tidak ada laporan kejadian-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Data Tidak Tersedia
28	Perdagangan	96.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	2.519 -----x 100% = 75,46% 3.338	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	-
		97a	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jenis Urea (ton) : 622,92 -----x 100% =77,67% 802	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-
		97b		Jenis NPK (ton) : 275 -----x 100% =89,58% 307	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	
		98.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	22.042 ----- x 100% =72,44% 30.428	SIMPEL (System Pelaporan Tera Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi)	-
29	Perindustrian	99.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	43.562 -15.609 -----x 100% =179,08% 15.609	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : DPM-PTSP	-
		100.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0 -----x 100% =0% 0	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Naskah Akademis dan Draft RPIK sudah disusun tapi belum ditetapkan menjadi Perda
		101.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25 -----x 100% = 500% 5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan ; DPM-PTSP	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		102.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Di OSS tidak ada data yang mengajukan permohonan izin
		103.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Di OSS tidak ada data yang mengajukan permohonan izin
		104.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Keterkinian informasi industri : $50\% + 25\% + 0\% = 75\%$ Kelengkapan informasi industri : $10\% + 10\% + 0\% + 0\% + 0\% = 20\%$ Nilai akhir : $75\% + 20\% = 95\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang merupakan jenis indikator yang diarahkan untuk menunjang dan mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berjalan dengan baik. Diharapkan dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap tercapainya target yang ditetapkan terutama berkaitan dengan indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau *Outcome*.

Jenis indikator kinerja kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang diarahkan sesuai dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang, dengan jumlah indikator yang berbeda-beda. Capaian yang diraih Pemerintah Kota Medan atas indikator kinerja kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang untuk tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang
Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1.	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan (Rp)	818.165.995.506 -----x 100% = 13,07% 6.258.348.799.239	BKAD	--
		2.	Rasio PAD (Rp miliar)	2.770,373.824.190 -----x 100% = 44,01% 6.294.922,205.176	BKAD	--
		3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	-
		4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	-
		5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	4.238.768.459.731 -----x 100% = 67,72% 6.258.348.799.239	BKAD	-
		6.	Opini Laporan Keuangan	-	BKAD	Dalam proses-
2.	Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	7.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 Paket -----x 100% =0,00% 8 Paket	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
		8.	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	3798 -----x 100% = 80,86% 4.697	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
		9.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	2.855.176.001.581 -----x 100% = 100% 2.855.176.001.581	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
		10.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-2.082.000.000.000 -----x 100% = -68,07% 3.058.300.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
3.	Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	11.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3.626 -----x 100% = 78,80% 4.604	BK-PSDM	-
		12.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	659 -----x 100% = 14,30% 4.604	BK-PSDM	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		13.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	352 -----x 100% = 53,40% 6599	BK-PSDM	-
4.	Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	14.	<i>Budget Execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6.258.348.799.239 ----- - 1 x 100% = 23,73% 8.206.297.907.872	BKAD	--
		15.	<i>Revenue Mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	2.770.373.824.190 ----- -1 x 100%=26,53% 3.770.971.775.437	BKAD	--
		16.	<i>Assets Management</i>	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BKAD	--
		17.	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	68.678.863.163,3 -----x 100% = 0,85% 8.026.297.907.827	BKAD	--
5.	Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	18.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan-	6.258.348.799.239 -----x 100% = 86,50% 7.235.090.422.451	Dinas Kominfo	-
		19.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	12 -----x 100% = 100% 12	Dinas Kominfo	-

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas (pertanggungjawaban) atau pemberi amanah. Pemerintah Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban terkait akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Medan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, Pemerintah Kota Medan melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Kota Medan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut.

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pimpinan daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis pada Table 2.4. berikut

Tabel 2.4.

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,93
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	127,55
3	Persentase Kemiskinan	Persen	7,40 - 7,95
4	Indeks Pendidikan	Poin	11,42
5	Indeks Kesehatan	Poin	74.30
6	Nilai SAKIP	Level	BB (75)
7	Opini BPK	Level	WTP
8	Indeks SPBE	Level	2,90
9	Indeks Pelayanan Publik	Level	A- (4,41)
10	Luas Kawasan Kumuh	Ha	105,96
11	Jumlah Titik Banjir/Genangan	Titik	305
12	Jumlah gangguan Ketertiban Umum	Kasus	16.467

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]
13	Pertumbuhan Investasi	Rp juta	5.749.158.9
14	Persentase UMKM naik kelas	Persen	25,00
15	Rasio PAD	Persen	49,77
16	Indeks Inovasi Daerah	Poin	77,70
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jiwa	338.762
18	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	126

Sumber : Bappeda Kota Medan

Table 2.4. di atas menunjukkan bahwa sesuai dengan perjanjian kinerja terdapat 18 indikator kinerja pada tahun 2024. Secara umum indikator kinerja tersebut mengarah kepada sasaran yang terkait kepada bidang perekonomian, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, investasi, lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat.

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Analisis capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut

Tabel 2.5.

Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,93	63,69
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	127,55	70.10
3	Persentase Kemiskinan	Persen	7,40 - 7,95	7,94
4	Indeks Pendidikan	Poin	11,42	0,803
5	Indeks Kesehatan	Poin	74.30	0,847
6	Nilai SAKIP	Level	BB (75)	62,44 (B)
7	Opini BPK	Level	WTP	Dalam Proses
8	Indeks SPBE	Level	2,90	3,67
9	Indeks Pelayanan Publik	Level	A- (4,41)	4,51 (A)
10	Luas Kawasan Kumuh	Ha	105,96	207,92
11	Jumlah Titik Banjir/Genangan	Titik	305	305
12	Jumlah gangguan Ketertiban Umum	Kasus	16.467	13.863
13	Pertumbuhan Investasi	Rp juta	5.749.158.9	3.013.395,5
14	Persentase UMKM naik kelas	Persen	25,00	30,00

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
15	Rasio PAD	Persen	49,77	43,99
16	Indeks Inovasi Daerah	Poin	77,70	45,99
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jiwa	338.762	698.577
18	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	126	126

Sumber : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.5. di atas dapat dilihat bahwa dari 18 indikator kinerja yang ditetapkan, beberapa diantaranya telah berada pada kisaran atau mencapai target. Dengan membandingkan antara target dan realisasi diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) indikator yang telah atau sudah mencapai target, antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Kemiskinan, Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik dll. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja utama (IKU) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan relative sudah baik yaitu sebesar 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah dicapai peningkatan atau perbaikan atas beberapa indikator, namun demikian masih perlu perhatian kerja keras agar capaian atas beberapa indikator lainnya dapat sesuai atau mampu melampaui dengan target yang telah ditetapkan.

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Analisis capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (2023) diuraikan pada Tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6.

Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2023-2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,67	63,69
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	70.10	70.10
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,00	7,94
4	Indeks Pendidikan	Poin	11,62	0,803
5	Indeks Kesehatan	Poin	81.55	0,847
6	Nilai SAKIP	Level	B (70)	62,44 (B)
7	Opini BPK	Level	WTP	Dalam Proses
8	Indeks SPBE	Level	2,77	3,67
9	Indeks Pelayanan Publik	Level	B	4,51 (A)
10	Luas Kawasan Kumuh	Ha	207,92	207,92

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11	Jumlah Titik Banjir/Genangan	Titik	410	305
12	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	6.353	13.863
13	Pertumbuhan Investasi	Rp juta	6.655.274,5	3.013.395,5
14	Persentase UMKM naik kelas	Persen	20,54	30,00
15	Rasio PAD	Persen	42,10	43,99
16	Indeks Inovasi Daerah	Poin	44,77	45,99
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jiwa	276.065	698.577
18	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	93	126

Sumber : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.6. di atas tampak bahwa dari 18 indikator kinerja, beberapa indikator kinerja mengalami perbaikan/peningkatan capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Terdapat sebanyak 10 (sepuluh) indikator yang mengalami perbaikan/peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa capaian atas indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2024 yang berhasil diraih Pemko Medan relative lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023, dengan tingkat capaian berkisar 55,56 persen.

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Analisis capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan target yang ada dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diuraikan pada Tabel 2.7. berikut

Tabel 2.7.

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemko Medan dan Target dalam RPJMD Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	TARGET RPJMD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,69	58,27
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	70.10	70,50
3	Persentase Kemiskinan	Persen	7,94	7,50
4	Indeks Pendidikan	Poin	0,803	11,42
5	Indeks Kesehatan	Poin	0,847	74,30
6	Nilai SAKIP	Level	62,44 (B)	BB
7	Opini BPK	Level	Dalam Proses	WTP
8	Indeks SPBE	Level	3,67	3,67

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	TARGET RPJMD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
9	Indeks Pelayanan Publik	Level	4,51 (A)	4,51 (A)
10	Luas Kawasan Kumuh	Ha	207,92	207,92
11	Jumlah Titik Banjir/Genangan	Titik	305	305
12	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	13.863	18000
13	Pertumbuhan Investasi	Rp juta	3.013.395,5	5.749.158.9
14	Persentase UMKM naik kelas	Persen	30,00	25,00
15	Rasio PAD	Persen	43,99	49,77
16	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45,99	77,7
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jiwa	698.577	698.577
18	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	126	126

Sumber : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.7. di atas diketahui bahwa dari 18 indikator kinerja pada RPJMD 2021-2026, beberapa diantaranya telah tercapai, juga terdapat beberapa telah melampaui target, yaitu 9 (sembilan) indikator kinerja. Indikator kinerja yang telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, dan lainnya. Proporsi indikator yang telah tercapai dan melampaui target capaian relative sudah memadai yaitu sebesar 50%. Dengan demikian secara umum tingkat capaian yang diraih atas indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 relative sudah memadai dengan persentase capaian berkisar 50 persen

2.3.5. Analisis Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berkaitan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai dalam Tahun 2024 diuraikan dengan membandingkan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja untuk program berkaitan dengan kinerja yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Medan Sesuai Kinerja yang Ditetapkan (Tapkin) Tahun Anggaran 2024 (Rp).

No	URUSAN/OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,342,366,154,341	1,239,991,815,377	92,37%
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	495,437,565,235	486,723,142,583	98,24%
1.2	Program Pengembangan Kurikulum	592,847,120	545,295,000	91,98%
1.3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	316,368,670	252,980,000	79,96%

No	URUSAN/OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3,194,134,960	722,406,940	22,62%
1.5	Program Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya	2,384,647,240	1,102,031,240	46,21%
1.6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	840,440,591,116	750,645,959,614	89,32%
2	DINAS KESEHATAN	736,835,002,207	724,034,716,780	98,26%
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	264,949,714,121	261,495,357,306	98,708%
2.2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	2,232,441,803	1,480,517,750	66,32%
2.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	463,068,916,786	454,764,066,724	98,21%
2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6,583,929,497	6,294,775,000	95,61
3	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI	737,026,556,711	634,466,230,374	86,08%
3.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	32,930,943,198	31,267,686,610	94,95%
3.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	268,843,974,465	232,955,132,543	86,65%
3.3	Program Penyelenggaraan Jalan	339,452,493,478	277,686,360,533	81,80%
3.4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2,147,503,145	2,140,535,395	99,68%
3.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	93,651,642,425	90,416,515,293	96,55
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1,516,643,226,043	1,079,551,282,132	71,18%
4.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	14,470,837,000	13,849,405,000	95,71%
4.2	Program Pengembangan Perumahan	2,159,220,000	2,101,336,000	97,32%
4.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16,248,254,000	15,549,637,000	95,70%
4.4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	101,171,344,655	39,593,375,601	39,13%
4.5	Program Penataan Bagunan Gedung	671,298,081,858	542,840,489,916	80,86%
4.6	Program Penataan Bagunan dan Lingkungannya	421,825,177,840	288,060,617,251	68,29%
4.7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	400.000.000	89,843,000	22,46%
4.8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	45,727,500,320	41,765,652,529	91,34%
4.9	Program Kawasan Permukiman	13,243,834,000	13,003,334,000	98,18%
4.10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,977,722,370	1,772,868,000	89,64%

No	URUSAN/OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	228,121,254,000	120,924,723,835	53,01%
5	DINAS SOSIAL	109,554,727,879	92,283,417,043	84,32%
5.1	Program Pemberdayaan Sosial	80,437,898,553	72,861,703,635	90,58%
5.2	Program Rehabilitasi Sosial	11,493,469,163	6,452,145,538	56,14%
5.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3,508,215,160	1,842,503,880	52,52%
5.4	Program Penanganan Bencana	2,588,550,716	2,108,937,200	81,47%
5.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	14,115,145,003	11,127,063,990	78,83%
6	DINAS TENAGA KERJA	16,505,371,502	15,351,078,597	93,01%
6.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	249,541,815	245,540,590	98,40%
6.2	Program Hubungan Industrial	2,149,486,400	2,146,538,900	99,86%
6.3	Program Pelatihan Kerja & Produktifitas Tenaga Kerja	515,563,700	507,532,950	98,44%
6.4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	13,590,779,587	12,451,466,157	91,62%
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70,587,680,392	62,596,523,554	88,68%
7.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	650,480,000	546,126,361	83,96%
7.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3,689,119,525	3,192,033,871	86,53%
7.3	Program Pengelolaan Persampahan	10,549,969,880	9,953,664,641	94,35%
7.4	Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional	3,099,990,000	2,789,401,368	89,98%
7.5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	694,932,780	609,850,011	87,76%
7.6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	956,006,200	914,776,200	95,69%
7.7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	51,519,725	50,000,000	97,059%
7.8	Program Pembinaan & Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	179,752,380	2,400,000	1,34%
7.9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	199,190,680	180,053,500	90,39%
7.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,790,340	64,261,400	63,76%
7.11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	50,415,928,882	44,293,956,202	87,86%
8	DINAS PERHUBUNGAN	517,957,682,808	467,740,424,639	90,30%
8.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	160,635,302,825	122,907,809,236	76,51%

No	URUSAN/OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
8.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	357,322,379,983	344,832,615,403	96,50%
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	122,403,644,854	117,572,189,680	96,05%
9.1	Program Penguatan Idiologi Pancasila & Karakter Kebangsaan	2,210,423,564	1,938,238,000	87,69%
9.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	832,415,730	409,651,000	49,21%
9.3	Program Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5,940,000	5,440,000	91,58%
9.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya	416,895,360	176,600,000	42,36%
9.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas & Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,281,978,570	948,988,217	74,03%
9.6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	117,655,991,630	114,093,272,463	96,97%
10	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN & PERIKANAN	37,473,320,090	36,395,440,040	97,12%
10.1	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1,123,448,050	1,044,551,716	92,98%
10.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	520,105,550	430,186,500	82,71%
10.3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	719,587,100	713,407,650	99,14%
10.4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	985,376,606	983,933,100	99,85%
10.5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,499,947,120	1,497,455,384	99,83%
10.6	Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian	2,030,312,139	1,978,992,315	97,47%
10.7	Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian	474,606,540	471,890,442	99,43%
10.8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner	484,278,507	436,250,190	90,08%
10.9	Program Penyuluhan Pertanian	735,088,158	728,387,958	99,09%
10.10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	28,900,570,320	28,110,384,785	97,27%
11	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42,184,711,927	36,754,527,287	87,13%
11.1	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	343,484,000	341,014,000	99,28%
11.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)	4,976,858,656	4,971,493,300	99,89%
11.3	Program Pengembangan UMKM	4,318,270,000	4,196,893,000	97,19%
11.4	Program Perencanaan & Pembangunan Industri	1,043,200,000	1,034,720,492	99,19%
11.5	Program Perizinan & Pendaftaran Perusahaan	42,000,000	42,000,000	100,00%

No	URUSAN/OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11.6	Program Penggunaan & Pemasaran Produk Dalam Negeri	1,799,171,000	1,660,374,939	92,29%
11.7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7,219,815,650	6,029,845,600	83,52%
11.8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	23,485,112,621	19,512,906,448	83,09%
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28,240,237,644	24,988,947,386	88,492%
12.1	Program Promosi Penanaman Modal	292,000,000	238,000,000	81,51%
12.2	Program Pelayanan Penanaman Modal	59,833,000	17,838,000	29,81%
12.3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	301,047,000	274,968,000	91,34%
12.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	631,386,700	110,588,500	17,52%
12.5	Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	753,600,000	560,400,000	74,36%
12.6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	26,202,370,944	23,787,152,886	90,78%
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48,814,919,091	46,165,617,059	94,57%
13.1	Program Peningkatan Ketentraman & Ketertiban Umum	34,827,582,601	33,109,439,484	95,07%
13.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	13,987,336,490	13,056,177,575	93,34%
14	DINAS PARIWISATA	23,815,757,503	21,995,655,960	92,36%
14.1	Program Pemasaran Pariwisata	6,719,657,640	6,338,428,257	94,33%
14.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	357,795,178	353,611,336	98,83%
14.3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	117,428,680	112,338,000	95,66%
14.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	843,460,680	838,160,766	99,37%
14.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	15,777,415,325	14,353,117,601	90,97%
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	44,866,142,245	34,988,951,371	77,99%
15.1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, & Masyarakat Hukum Adat	6,179,042,345	4,680,603,357	75,75%
15.2	Program Pengendalian Penduduk	467,400,000	385,925,835	82,57%
15.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5,026,407,946	4,136,652,886	82,30%
15.4	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera	7,270,595,525	7,102,870,660	97,69%
15.5	Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan	373,122,627	221,263,760	59,30%

No	URUSAN/OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
15.6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	136,900,710	0	0,00%
15.7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender & Anak	78,700,355	77,177,855	98,07%
15.8	Program Pemenuhan Hak Anak	189,301,988	175,761,988	92,85%
15.9	Program Perlindungan Perempuan	118,579,700	57,574,277	48,55%
15.10	Program Perlindungan Khusus Anak	322,420,300	228,618,160	70,91%
15.11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	24,703,670,749	17,922,502,593	72,55%
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32,736,155,527	31,336,086,208	95,72%
16.1	Program Pendaftaran Penduduk	3,665,322,390	3,344,407,500	91,24%
16.2	Program Pencatatan Sipil	178,230,000	156,344,000	87,72%
16.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	600,000,000	560,732,137	93,46%
16.4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	28,292,603,137	27,274,602,571	96,40%
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	186,901,037,730	142,434,161,284	76,21%
17.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12,757,021,981	7,271,257,283	57,00%
17.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	174,144,015,749	135,162,904,001	77,62%
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21,675,809,457	19,399,558,822	89,50%
18.1	Program Kepegawaian Daerah	1,551,232,460	1,095,019,000	70,59%
18.2	Program Pengembangan SDM	2,050,984,705	1,523,697,574	74,29%
18.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	18,073,592,292	16,780,842,248	92,85%
19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	77,155,728,747	36,646,940,298	47,503%
19.1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,419,768,003	6,497,817,469	56,90%
19.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	38,855,570,410	9,110,965,562	23,45%
19.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	26,880,390,334	21,038,157,267	78,27%
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	54,984,865,614	52,879,451,067	96,17%
20.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	148,320,000	134,575,000	90,73%
20.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	27,473,703,966	27,371,688,673	99,63%
20.3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10,322,470,000	9,569,882,233	92,71%
20.4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	249,934,000	232,601,597	93,07%
20.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	16,790,437,648	5,570,703,564	92,74%
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	39,174,917,889	37,002,966,897	94,46%
21.1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran	11,891,581,105	11,638,875,945	97,87%

No	URUSAN/OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
21.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	27,283,336,784	25,364,090,952	92,97%
22	SEKRETARIAT DAERAH	140,377,603,451	123,488,986,438	87,9745%
22.1	Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	12,416,062,997	10,126,475,718	81,56%
22.2	Program Perekonomian & Pembangunan	3,136,895,786	2,757,495,000	87,91%
22.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	124,824,644,668	110,605,015,720	88,61%
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14,906,940,398	14,397,409,375	96,58%
23.1	Program Pembinaan Perpustakaan	387,855,000	306,126,800	78,93%
23.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	14,519,085,398	14,091,282,575	97,05%
24	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	20,410,497,576	18,276,410,613	89,54%
24.1	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	3,868,511,800	3,528,649,500	91,21%
24.2	Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan & Pembangunan Daerah	1,937,238,950	1,790,041,000	92,40%
24.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	14,604,746,826	12,957,720,113	88,72%
25	INSPEKTORAT	25,441,464,336	21,562,018,387	84,75%
25.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,447,900,000	2,078,850,000	84,92%
25.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	22,993,564,336	19,483,168,387	84,73%
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14,782,847,280	13,853,588,586	93,71%
26.1	Program Penanggulangan Bencana	2,042,780,800	2,038,596,000	99,805%
26.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	12,740,066,480	11,814,992,586	92,74%
27	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	9,609,559,580	8,837,113,477	91,96%
27.1	Program Penelitian & Pengembangan Daerah	1,048,257,050	961,250,050	91,70%
27.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	8,561,302,530	7,875,863,427	91,99%
28	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	46,077,338,914	41,783,060,252	90,686%
28.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10,143,125,823	9,262,864,935	91,32%
28.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,083,172,259	1,030,726,000	95,16%
28.4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	34,851,040,832	31,489,469,317	90,35%-
	JUMLAH	6,061,036,643,110	5,180,288,199,370	88,41%

Sumber : Bappeda Kota Medan

Dari Tabel 2.9. di atas tampak bahwa secara umum penggunaan sumber daya anggaran antara realisasi dibandingkan rencana dalam rangka pencapaian hasil kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 88,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja tahun 2024

sumber daya yang digunakan mencapai 88,41%. Penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja tahun anggaran 2024 selalu mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah, termasuk akuntabilitasnya.

2.3.6. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024 maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung dan diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang terukur. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2024 diuraikan pada tabel 2.9. berikut

Tabel 2.9.

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	b. Pengadaan Mebel Sekolah
	c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	e. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	f. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	h. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
	i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
	j. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
	k. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	l. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	m. Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	n. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	o. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	p. Pengadaan Perlengkapan PAUD
	q. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
	r. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	s. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	t. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	u. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan
1.2	Program Pengembangan Kurikulum
	a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	b. Penyusunan Sillabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	c. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1.3	Program Pendidik & Tenaga Kependidikan
	a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
1.4	Program Pengembangan Kebudayaan

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab./Kota
	d. Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat
1.5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
1.6	Program Pembinaan Sejarah
	a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	b. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
1.7	Program Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya
	a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	b. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
	c. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota
	d. Pengembangan Cagar Budaya
1.8	Program Pengelolaan Permuseuman
	a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2.	Dinas Kesehatan
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	a. Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	c. Pengembangan Puskesmas
	d. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	e. Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan
	f. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota
	g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
	h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
	k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
	l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
	o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
	q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	r. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	s. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
	t. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	u. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	v. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
	w. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	x. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab./Kota
	y. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	z. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	aa. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis
	bb. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (OD HIV)
	cc. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
	dd. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
	ee. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
2.2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
	a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	b. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	b. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab./Kota
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi
3.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	c. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
	d. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
	e. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
	f. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
	g. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
	h. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
3.2	Program Penyelenggaraan Jalan
	a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	c. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kab./Kota dan Desa
	d. Pembangunan Jalan
	e. Rekonstruksi Jalan
	f. Pemeliharaan Berkala Jalan
	g. Rehabilitasi Jembatan
	h. Pembangunan Jembatan
	i. Pelebaran Jalan, Menambah Lajur
	j. Pemeliharaan Rutin Jalan
	k. Pelebaran Jembatan
3.3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab./Kota
	c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
3.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab./Kota

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
4.1	Program Pengembangan Perumahan
	a. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	b. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
4.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4.3	Program Kawasan Permukiman
	a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar
4.4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota
4.5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4.6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
	a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.8	Program Penataan Bangunan Gedung
	a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4.9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota,
4.10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5.	Dinas Sosial
5.1	Program Pemberdayaan Sosial
	a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
5.2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5.3	Program Rehabilitasi Sosial
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
5.4	Program Penanganan Bencana
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6.	Dinas Ketenagakerjaan
6.1	Program Penempatan Tenaga Kerja
	a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	d. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.2	Program Hubungan Industrial
	a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
6.3	Program Pelatihan Kerja & Produktifitas Tenaga Kerja
	a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	b. Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	Dinas Lingkungan Hidup
7.1	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)
	a. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
7.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota
	b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota
	c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota
7.3	Program Pengelolaan Persampahan
	a. Pengelolaan Sampah
7.4	Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional
	a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
7.6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
7.8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
7.9	Program Pembinaan & Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7.10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
8.	Dinas Perhubungan
8.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
	b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
	c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.1	Program Penguatan Idiologi Pancasila & Karakter Kebangsaan
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
9.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	Situasi Politik
9.3	Program Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
9.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
9.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas & Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
10.1	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
10.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
	b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
10.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	a. Pengembangan Prasarana Pertanian
10.4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	c. Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
10.5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
10.6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
10.7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
	b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
10.8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota.
	b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
	c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
10.9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	a. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	Kabupaten/ Kota
	b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
10.11	Program Penyuluhan Pertanian
	a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
11.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
11.1	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
11.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)
	a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
11.3	Program Pengembangan UMKM
	a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
11.4	Program Perizinan & Pendaftaran Perusahaan
	a. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
	b. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
11.5	Program Penggunaan & Pemasaran Produk Dalam Negeri
	a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran & Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
11.6	Program Perencanaan & Pembangunan Industri
	a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
11.7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	a. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
12.1	Program Promosi Penanaman Modal
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12.2	Program Pelayanan Penanaman Modal
	a. Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12.3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
12.5	Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal
	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)
13.1	Program Peningkatan Ketenteraman & Ketertiban Umum
	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
14	Dinas Pariwisata

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
14.1	Program Pemasaran Pariwisata
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
14.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	a. Pengelolaan Kawasan Stratgis Pariwisata Kabupaten/Kota
	b. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
14.3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
14.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, & Masyarakat Hukum Adat
	a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
15.2	Program Pengendalian Penduduk
	a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
15.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
15.4	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera
	a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab./Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
15.5	Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan
	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
	c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
15.6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	a. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender & Anak
	a. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.8	Program Pemenuhan Hak Anak
	a. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
15.9	Program Perlindungan Perempuan
	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.10	Program Perlindungan Khusus Anak
	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.1	Program Pendaftaran Penduduk
	a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
16.2	Program Pencatatan Sipil
	a. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
16.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	a. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
17.	Badan Pendapatan Daerah
17.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM)
18.1	Program Kepegawaian Daerah
	a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	b. Mutasi dan Promosi ASN
	c. Pengembangan Kompetensi ASN
	d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
18.2	Program Pengembangan SDM
	a. Pengembangan Kompetensi Teknis
	b. Sertifikasi, Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional
19.	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
19.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
19.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
	a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
20.2	Program Pengelolaqn Aplikasi Informatika.
	a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
20.3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
	a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
20.4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
	a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
21.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
21.1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran
	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
22.	Sekretariat Daerah
22.1	Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
	a. Administrasi Tata Pemerintahan.
	b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
	c. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual.
	d. Fasilitas dan Koordinasi Hukum.
	e. Fasilitas Kerjasama Daaerah.
22.2	Program Perekonomian & Pembangunan
	a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
	b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
	c. Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa.
	d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.1	Program Pembinaan Perpustakaan
	a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23.2	Program Pengelolaan Arsip
	a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
24.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
24.1	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
24.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
25.	Inspektorat
25.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
25.2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	b. Pendampingan dan Asistensi
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
26.1	Program Penanggulangan Bencana
	a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
27.	Badan Riset dan Inovasi Daerah
27.1	Program Penelitian & Pengembangan Daerah
	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
28.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
28.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
28.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Sumber: Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.9. di atas tampak bahwa program/kegiatan organisasi perangkat daerah relative telah mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024 serta dibandingkan dengan target RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari uraian di atas nampak bahwa adanya peningkatan kinerja Pemerintah Kota Medan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kota, yang ditunjukkan dari pencapaian beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024. Namun demikian masih perlu perhatian terhadap beberapa indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya mencapai target sehingga perlu didorong pencapaiannya agar lebih optimal di tahun berikutnya.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teiknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
- 8) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 9) Permendikbud Nomo 13 tahun 2020 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan;
- 10) Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah;
- 11) Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 12) Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 13) Peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021;
- 14) Peraturan BKKBN Nomor 27 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
- 15) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2023
- 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022
- 22) surat dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 900/177.05/KEU/IX/2023 tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Kabupaten/Kota Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan hortikultura Provinsi Sumatera Utara (690705) Badan Pangan Nasional.

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Medan

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

3.2.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat Maupun Yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Memberikan Penugasan.

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memberikan penugasan diantaranya adalah:

- 1) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3) Kementerian Kesehatan, Bidang Keluarga Berencana. dan BKKBN Propinsi Sumatera Utara.
- 4) Kementerian Koperasi Dan UKM
- 5) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
- 6) Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Kementrian Pertanian

3.2.2. Bidang Urusan Yang Ditugas Pembantukan

Kekhususan penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan adalah program, kegiatan, sumber pendanaan maupun prasarana dan sarana pendukungnya, ditetapkan oleh pemerintah sehingga pemerintah kota hanya merupakan unsur pelaksana berdasarkan pedoman, acuan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Medan selama tahun 2023 mendapat tugas pembantuan dari 5 (tiga) kementerian/ lembaga, yaitu:

- 1) Tugas Pembantuan Urusan Pendidikan
- 2) Tugas Pembantuan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- 3) Tugas Pembantuan Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Penurunan Stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
- 4) Tugas Pembantuan Urusan Koperasi dan UKM
- 5) Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Dan Perikanan.

3.2.3. Jumlah Kegiatan

Program dan jumlah kegiatan tugas pembantuan untuk masing-masing urusan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Pendidikan Usia Dini
2. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Tugas Pembantuan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

3. Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 16 (enam belas) kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAK NON FISIK)
2. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK NON FISIK).
3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK).
4. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NON FISIK).
5. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK NON FISIK).
6. Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes) dan minilokakarya (minilok) (DAK NON FISIK).
7. Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK (DAK NON FISIK).
8. Pengendalian Program KKBPK (DAK NON FISIK).
9. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB (DAK NON FISIK).
10. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK).

11. Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya (DAK NON FISIK).
 12. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK NON FISIK)
 13. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK)
 14. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB (DAK NON FISIK)
 15. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK (DAK NON FISIK)
 16. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK NON FISIK).
 17. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)(DAK NON FISIK)
 18. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)
4. Urusan Koperasi dan UKM
- Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 6 (enam) kegiatan yaitu:
1. Pelatihan Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2023).
 2. Pelatihan Koperasi Menuju Koperasi Modern (DAK Non Fisik Tahun 2023)
 3. Kegiatan Pelatihan Manajemen untuk Koperasi (DAK Non Fisik Tahun 2023)
 4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Koperasi, UMKM dan Wirausaha Pemula (DAK Non Fisik Tahun 2023)
 5. Kegiatan Pelatihan Penerapan Legalitas, Perizinan, Pajak dan Sanksi Hukum bagi Koperasi (DAK Non Fisik Tahun 2023).
 6. Kegiatan Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 202)
5. Urusan Pangan dan Pertanian
- Jumlah kegiatan tugas Bantuan Dana APBD Propinsi Sumatera Utara di Kota Medan Tahun 2023 ada sebanyak 14 (empat belas) kegiatan yaitu:
1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.
 2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Kota Medan (SP SABA)
 3. Registrasi Keamanan Pangan Segar di Kota Medan
 4. Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Medan
 5. Data dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Medan
 6. Nilai tambah dan Daya Saing Industri
 7. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Hortikultura

8. Pengembangan Budi Daya Tanaman Pangan
9. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kota Medan.
10. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan Kota Medan
11. Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kota Medan
12. Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kota Medan
13. Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Medan
14. Data dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Medan

1.2.4. Anggaran Tugas Pembantuan

1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk 6 kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Operasional PAUD untuk: (1) Jumlah Lembaga / TK : 569 Swasta / negeri : (2).Jumlah Peserta Didik : 19.543 orang sebesar Rp. 15.146.780.000
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk Jumlah Lembaga 33 lembaga dan Jumlah Peserta Didik : 6108 orang sebesar Rp. 8.018.220.000
3. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SD untuk Jumlah Sekolah : (a) Negeri : 382 dan (b) Swasta : 425 sebesar Rp. 186.312.200.000
4. Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah untuk Jumlah Sekolah : 8 sekolah 16 paket sebesar Rp. 3.302.816.000
5. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SMP untuk Jumlah Sekolah: (a) Negeri 45 Sekolah dan (b) Swasta : 302 sebesar Rp. 109.788.560.000
6. Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah untuk Jumlah Sekolah: 13/26 Paket sebesar Rp. 5.589.967.000
7. Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru) adalah sebesar Rp. 183.696.690.000
8. Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional sebesar Rp. 4.458.500.000

9. Urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk 8 kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah (SR) di Kel.Pulo Brayan Darat II Kec.Medan Timur Zona 11 (DAK FISIK) sebesar Rp. 658.000.000
2. Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah (SR) di Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Zona 11 (DAK FISIK) sebesar Rp. 930.873.000
3. Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah (SR) di Kel.Pulo Brayan Kota Kec.Medan Barat Zona 10 (DAK FISIK) sebesar Rp. 1.099.000.000

4. Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Besar Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK) sebesar Rp. 480.000.000
 5. Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Rengas Pulau Kec.Medan Marelان (DAK FISIK) sebesar Rp. 632.000.000
 6. Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Sei Mati Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK) sebesar Rp. 1.240.000.000
 7. Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Terjun Kec. Medan Marelان (DAK FISIK) sebesar Rp. 928.000.000
 8. Pembangunan Kebun Pembibitan (DBH Sawit) sebesar Rp. 200.000.000
10. Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan sebanyak 18 kegiatan adalah:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAK NON FISIK) sebesar Rp 64.200.000.
2. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK NON FISIK) sebesar Rp 233.400.000
3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK) sebesar Rp 66.000.000.
4. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NON FISIK) sebesar Rp 120.000.000.
5. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK NON FISIK) sebesar Rp 150.000.000.
6. Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes) dan minilokakarya (minilok) (DAK NON FISIK) sebesar Rp 273.000.000.
7. Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK (DAK NON FISIK) sebesar Rp 292.050.000.
8. Pengendalian Program KKBPK (DAK NON FISIK)sebesar Rp 80.000.000
9. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB (DAK NON FISIK) sebesar Rp 32.000.000
10. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK) sebesar Rp 302.000.000.
11. Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya (DAK NON FISIK) sebesar Rp 176. 400.000.
12. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK NON FISIK) sebesar Rp 2.357.764.000.
13. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK) Rp 86.100.000,-
14. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB (DAK NON FISIK) sebesar Rp 849.000.000.

15. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK (DAK NON FISIK) Rp 372.000.000,-
16. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK NON FISIK) sebesar Rp 360.000.000.
17. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)(DAK NON FISIK) sebesar Rp 6.498.800.
18. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK) sebesar Rp 1.388.258.000

11. Urusan Koperasi dan UKM

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan sebanyak 6 kegiatan adalah:

1. Pelatihan Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2023) sebesar Rp. 66.333.000
2. Pelatihan Koperasi Menuju Koperasi Modern (DAK Non Fisik Tahun 2023) sebesar Rp. 59.011.000
3. Kegiatan Pelatihan Manajemen untuk Koperasi (DAK Non Fisik Tahun 2023) sebesar Rp. 71.763.000
4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Koperasi, UMKM dan Wirausaha Pemula (DAK Non Fisik Tahun 2023) sebesar Rp. 65.389.000
5. Kegiatan Pelatihan Penerapan Legalitas, Perizinan, Pajak dan Sanksi Hukum bagi Koperasi (DAK Non Fisik Tahun 2023) sebesar Rp. 72.074.000
6. Kegiatan Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 202) sebesar Rp. 75.600.000.

12. Urusan Pertanian dan Perikanan

Jumlah anggaran tugas Bantuan Dana APBD Propinsi Sumatera Utara di Kota Medan Tahun 2022 untuk 14 (empat belas) kegiatan yakni

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebesar Rp. 100.000.000
2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Kota Medan (SP SABA) sebesar Rp. 16.742.000
3. Registrasi Keamanan Pangan Segar di Kota Medan sebesar Rp. 32.327,000
4. Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Medan sebesar Rp. 23.500.000
5. Data dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Medan sebesar Rp.9.500,000
6. Nilai tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp. 521.207.000
7. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Hortikultura sebesar Rp. 27.000.000

8. Pengembangan Budi Daya Tanaman Pangan sebanyak 102 ha benih padi.
9. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kota Medan sebesar Rp. 7.974.000
10. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan Kota Medan sebesar Rp. 4.915.000
11. Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kota Medan sebesar Rp. 48.125.000
12. Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kota Medan sebesar Rp. 4.240.000
13. Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Medan sebesar Rp. 23.500.000
14. Data dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Medan sebesar Rp. 9.500.000

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar pelaksanaan tugas pembantuan, program/kegiatan, lokasi, OPP Pelaksana, alokasi dan realisasi anggaran dan relaisasi capaian kerja yang menerima tugas pembantuan diuraikan berikut ini;

3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Medan

Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Kota Medan disajikan pada table 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 berikut:

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kemertrian Pendidikan dan Kebudayaan	Permendikbud Nomo 13 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2020	Program Pengelolaan Pendidikan • Pengelolaan Pendidikan Usia Dini Penyaluran Bantuan Operasional PAUD untuk: (1) Jumlah Lembaga /TK: 225 Swasta / negeri; (2) Jumlah Peserta Didik: 10.075 orang	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.811.930.000	12.742.695.000	99.00	Tersalurkannya bantuan Operasional PAUD untuk: 1. Jumlah Lembaga /TK: 225 Swasta / negeri: 2 2. Jumlah Peserta Didik: 10.075 orang	100	
			• Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Medan	Dinas Pendidikan dan	7.784.550.000	7.632.690.000	98.00	Tersalurkannya Bantuan Operasional	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan: 1. Jumlah Lembaga 33 Lembaga 2. Jumlah Peserta Didik : 6108 orang		Kebudayaan				Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1. Jumlah Lembaga 33 Lembaga 2. Jumlah Peserta Didik : 6108 orang		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SD: Jumlah Sekolah : a. Negeri : 382 b. Swasta :425	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	111.267.760.000	175.734.088.282	158	• Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah SD: Jumlah Sekolah : (a) Negeri : 382 dam (b) Swasta :425	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk: Jumlah Sekolah : 10 sekolah 20 paket	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.096.797.000	3.096.797.000	100	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk jumlah sekolah: 10 sekolah 20 paket	100	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SMP: Jumlah Sekolah : a. Negeri 45 Sekolah b. Sekolah	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.899.670.000	107.948.807.640	193	Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah SMP untuk Jumlah Sekolah: a. Negeri 45 Sekolah b. Swasta: 302	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Swasta : 654								
			<ul style="list-style-type: none"> Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk Jumlah Sekolah : 6 / 20 Paket 	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.548.844.000	1.548.844.000	100	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk Jumlah Sekolah : 6 / 20 Paket	100	
			1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <ul style="list-style-type: none"> Dana 	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			<p>Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru): Guru - Guru yang Telah Sertifikasi Bagi di Negeri Maupun Swasta di Kota Medan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional: untuk guru yang tidak memiliki sertifikasi yang menjadi target bantuan 			185.322.722.000	181.333.802.312	98.00	<ul style="list-style-type: none"> Tersalurkannya Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru) untuk Guru - Guru yang Telah Sertifikasi Bagi di Negeri Maupun Swasta di Kota Medan 	100	
						5.097.920.000	5.097.920.000	900	Tersalurkannya Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional untuk guru yang tidak memiliki sertifikasi yang menjadi target bantuan	100	

Tabel 3.2: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Medan	Dinas Perumahan Kawasan Permukima n Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	5.024.000.000	4.920.266.000	97.94	Terlaksanan ya pengelolaan dan pengembang an sistem air limbah	100	
	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Medan	5.024.000.000		4.920.266.000	97.94	Terlaksanan ya Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100		
	1.03.05.2.01.06		Medan	5.024.000.000		4.920.266.000	97.94		100		

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat								
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur (DAK FISIK) 	Medan Timur		1.456.000.000	1.424.695000	97.85	Terpasangnya Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur (DAK FISIK)	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur (DAK FISIK) 	Medan Timur		1.456.000.000	1.424.695.000	97.92	Terpasangnya Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur (DAK FISIK)	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi 			1.456.000.000	1.424.695.000	97.96	Terpasangnya Pipa Distribusi		

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Durian Kec.Medan Timur (DAK FISIK)						Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Durian Kec.Medan Timur (DAK FISIK)		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Tegal Rejo Kec.Perjuangan (DAK FISIK) 	Medan Barat		656.000.000	643.522.000	98.10	Terpasangnya Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Tegal Rejo Kec.Perjuangan (DAK FISIK)	100	
		1.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Medan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	7.866.000.000	7.667.975.000	97.48	Terlaksannya a Pengelolaan dan pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	100	
		2023 Tahun	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan	Medan		7.866.000.000	7.667.975.000	97.48	Terlaksananya Pengelolaan	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
		2023 Nomor 100) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Medan		7.866.000.000	7.667.975.000	97.48	Terlaksanan ya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Labuhan Deli Kec.Medan Marelan (DAK FISIK) 	Medan Labuhan n		874.000.000	854.877.000	97.81	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Labuhan Deli Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan (DAK FISIK) 	Medan Marelan		874.000.000	854.465.000	97.76	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Paya Pasir Kec.Medan Marelan (DAK FISIK) 	Medan Labuhan		874.000.000	848.311.000	97.06	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Paya Pasir Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan 	Medan Marelan		874.000.000	850.406.000	97.30	Terpasangny a Pipa Distribusi	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Titi Papan Kec.Medan Deli (DAK FISIK)						Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Titi Papan Kec.Medan Deli (DAK FISIK)		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Kota Bangun Kec.Medan Deli (DAK FISIK) 			874.000.000	849.418.000	97.19	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Kota Bangun Kec.Medan Deli (DAK FISIK)		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan 			874.000.000	853.813.000	97.69	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR)		

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Mabar Kec.Medan Deli (DAK FISIK)						Kelurahan Mabar Kec.Medan Deli (DAK FISIK)		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK) 			874.000.000	850.271.000	97.29	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK)		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tangkahan Kec.Medan Labuhan (DAK 			874.000.000	853.320.000	97.63	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tangkahan Kec.Medan		

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			FISIK)						Labuhan (DAK FISIK)		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Martubung Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK) 			874.000.000	853.091.000	97.61	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Martubung Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK)		

Tabel 4.3: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari BKKBN Pusat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Kementerian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)		1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
			1.1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Kota Medan	DP3APMP2KB	46.729.700	9.209.827	19,70	100 %		Dikerjakan berdasarkan adanya laporan kejadian

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ Kota (DAK NON FISIK)								
			1.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			1.2.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Kota Medan	DP3APMP2KB	29.070.000	28.820.000	99,14	100 %		

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			1.3. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			1.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK NON FISIK)	Kota Medan	DP3APMP2KB	151.630.300	84.026.960	55,41	100 %		
			1.4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			1.4.1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ (DAK NON FISIK)	Kota Medan	DP3APMP2KB	29.070.000	28.820.000	99,14	100 %		
	BKKBN PUSAT	1. Peraturan BKKBN Nomor 13 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023	1.PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Medan	DP3APMP2KB	363.600.000	311.333.398				

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			1.1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	DP3APMP2KB	363.600.000	311.333.398	85,62	100 %		
			1.1.1. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	335.400.000	317.490.000	94,66	100 %		
			1.1.2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	132.000.000	68.435.000	51,84	100 %		

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
			1.1..Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								
			1.1.1. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Kota Medan	DP3APMP2KB	315.000.000	315.000.000	100	100 %		
			1.1.2. Advokasi Program Bangga kencana oleh	Kota Medan	DP3APMP2KB	250.000.000	121.350.000	48,54	100 %		Tidak terrealisasi

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)								seluruhnya, karena SPPD ASN tidak boleh dibayarkan
			1.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
			1.2.1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	453.000.000	453.000.000	100	100 %		
			1.3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan								

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Kesertaan Ber-KB								
			1.3.1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	3.750.000	0	0	100 %		
			1.3.2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	285.000.000	276.532.800	97,02	100 %		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
			1.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan								

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Keluarga								
			1.1.1. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	96.000.000	10.880.000	11,33	100 %		
			1.1.2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	300.000.000	234.900.000	78,3	100 %		
			1.2. PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN								

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN								
			1.2.1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	3.048.000.000	3.048.000.000	100	100 %		
			1.2.1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	3.352.800.000	3.352.800.000	100	100 %		

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			BOKB)								

Tabel 4.4: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
25	KEMENTERIAN KOPERASI DAN	PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Medan	Dinas Koperasi, UKM,	343.484.000	342.764.000	99,79	Terlaksananya Program Pendidikan dan	100	-

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	UKM	UKM NO. 1 TAHUN 2020, TAGGAL 06 FEBRUARI 2020	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Perindustrian dan Perdagangan				Latihan Perkoperasian		
			1. Pelatihan Vocational Makanan Olahan bagi Wirausaha pemula (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Pelatihan Vocational Makanan Olahan bagi			152.851.000	152.851.000	100	Terlaksananya Pelatihan Vocational Makanan Olahan bagi Wirausaha pemula	100	-

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Wirausaha pemula selama 6 hari yang diikuti 45 orang peserta, dari tanggal 23 s/d 28 November 2024 di Hotel arabia style medan jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu, Medan Sumatera utara								
			2. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Wirausaha Pemula (DAK Non Fisik Tahun 2024). Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Wirausaha Pemula selama 3 hari yang diikuti 25 orang peserta, dari tanggal 2 s/d 4 Desember Agustus 2024 di Hotel arabia style jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu,			58.493.000	58.493.000	100	terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Wirausaha Pemula	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Medan Sumatera utara								
			3. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula selama 2 hari yang diikuti 25 orang peserta, dari tanggal 3 s/d 4 Desember 2024 di Hotel arabia style jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu, Medan Sumatera utara			40.620.000	40.620.000	100	terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula	100	-
			4. Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan UMKM (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan			4.000.000	4.000.000	100	Terlaksana Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	100	-

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan UMKM selama 3 hari yang diikuti 1 orang peserta, dari tanggal 25 s/d 27 November 2024 di Jl. Sempurna No. 170 B Medan 20218						UMKM		
			5. Kegiatan Okupasi Konsultasi Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Okupasi Konsultasi Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran selama 3 hari yang diikuti 1 orang peserta dari			4.000.000	4.000.000	100	terlaksananya kegiatan Okupasi Konsultasi Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			tanggal 25 s/d 27 November 2024 di Jl. Sempurna No. 170 B Medan 20218								
			6. Kegiatan Tenaga Pendamping Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan pendampingan oleh Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM Kota Medan selama 12 Bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember 2024.			83.520.000	82.800.000	99,14	terlaksananya kegiatan pendampingan oleh Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM Kota Medan	100	-

Tabel 4.5: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2023

NO	Kemntrian/ Leabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sumatera Utara (690705). - Deputi Penganekegaran Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (01)	- Anggaran (DIPA) Nomor: SP/DIPA-125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 dan POK SATKER 690705 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara - Sesuai surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan								
			Pendampingan Pemeliharaan Pasar Pangan Segar Aman Kota Medan	Pasar Sei Sikambing Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	44.800.000	44.620.000	99,6	Terlaksana dengan baik	100	

NO	Kementrian/ Leabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
		Nomor 900/59.09/KEU/III/ 2024 tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten/Kota Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan holtikultura Provinsi Sumatera Utara (690705) Badan Pangan Nasional (01) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.	2. Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan. Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan								
			Operasional Keamanan dan Mutu Pangan Segar Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	20.000.000	19.954.900	99,77	Terlaksana dengan baik	100	
			3. Sertifikasi Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan.								

NO	Kementrian/ Leabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
			Sertifikasi dan Registrasi								
			Jumlah Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang diterbitkan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	110	110	100	Terlaksana dengan baik	100	
			Operasional Registrasi dan Sertifikasi dan Mutu Pangan Segar Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	40.000.000	39.654.600	99,14	Terlaksana dengan baik	100	
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi	Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (PSVA) Kota Medan	Kota Medan (21 Kecamatan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	23.500.000	23.450.000	99,79	Terlaksananya Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		

NO	Kementrian/ Leabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	Sumatera Utara								(PSVA) Kota Medan		
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara	Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	12.260.000	12.250.000	99,92	Tersedianya data dan Informasi Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah di Kota Medan	100	
		Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	43.650.000	43.548.700	99,77	Terlaksananya Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kota Medan	100	
		1. Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	9.660.000	9.598.600	99,36	Terlaksananya Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kota Medan	100	

1.3. Hambatan/Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi berkaitan tugas pembantuan:

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi

- a. Pembayaran Tamsil mengalami carry over di TW 4 sehingga proses pembayaran terkendala.
- b. Pada Triwulan IV akhir anggaran tambahan TAMSIL tersedia namun tidak bisa digunakan.
- c. Pada Bantuan BOS dan BOP , masih terdapat pengembalian dana karena tidak beropersional sekolah.
- d. Perlu dilakukan eveluasi dan pengawasan atas pembayaran pajak dari penggunaan dana bos dan bop sehingga tidak menimbulkan hutang pajak pada penutupan anggaran.
- e. Penyusunan BKU atas penggunaan Dana BOS dan BOP harus sesuai dengan rincian belanja yang ditentukan di RKAS.
- f. Nilai pendapatan dana transfer pusat belum dirincikan sesuai kebutuhan perunit sekolah karena masih terdapat anggaran glondongan untuk Dikdas.

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan yang dihadapi

Tugas Pembantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi

Karena penggunaan Dana DAK baik fisik maupun non fisik penggunaannya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dari pusat, dimana juknis dibuat sesuai dengan kondisi daerah rata - rata di Indonesia sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi di daerah Kota Medan.

4. Urusan Koperasi dan UKM.

Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan

5. Urusan Pangan dan Pertanian adalah:

Zonasi Pedagang yang belum teratur dan peremajaan pasar sudah lama tidak dilakukan sehingga sanitasi kurang baik.

1.4. Saran dan Tindak Lanjut

1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- a. Evaluasi dalam penggunaan dana BOS dan BOP sehingga tidak menimbulkan laporan yang tidak sesuai dengan laporan pajak.
- b. Melakukan pendataan jumlah tenaga pendidik (P3K) yang sertifikasi atau non sertifikasi guna kebutuhan yang seharusnya dibayarkan.

- c. Perlu dilakukan monitoring dalam penyusunan Laporan Bos dan BOP agar data yang dihasilkan sesuai dengan bukti pembayaran yang dilakukan melalui Ekatalog maupun sipla.
2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Solusi yang diupayakan: -
3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:
Solusi yang diupayakan
- Kegiatan tetap direncanakan secara berkelanjutan dan akan tetap dilaksanakan tahun depan
4. Urusan Koperasi dan UKM adalah
Solusi yang diupayakan: -
5. Urusan Pangan dan Pertanian adalah:
Solusi yang diupayakan
Perbaikan dan peremajaan Pasar yang sesuai dengan Standar dan Aman.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Pendidikan merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Dasar (SD, SMP)
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2024 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1.1. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Tingkat partisipas I warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,82%	100%	100%
2	Pendidikan Dasar (SD, SMP)			
2.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%
2.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	94,50%	100%	100%

4.1.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.a. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,358,068,706,708	16,92 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	494.763.989.312,-	36,42 % dari Anggaran OPD

Tabel 4.1.3.b. Rencana & Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
KOTA MEDAN						494,763,989,312	474,304,853,978	95.86
1	Program Pengelolaan Pendidikan			-	494,763,989,312	474,304,853,978	95.86	
	a	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629		-	257,729,038,749	249,803,939,550	96.93	
		1)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0,00	
		2)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00	
		3)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0,00	
		4)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0,00	
		5)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00	
		6)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0,00	
		7)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00	
		8)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Ruang	0	0	0,00	

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Unit Kesehatan Sekolah				
		9)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0,00
		10)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0,00
		11)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	17.117.920.400	15.085.000.000	88,12
		12)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0,00
		13)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	2,521,848,732	2,018,412,700	80.04
		14)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00
		15)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	13,502,500,000	15.500,000,000	99.98
		16)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	5,427,200,000	4,720,000,000	86.97
		17)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	2,479,072,461	1,815,108,250	73,22
		18)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0,00
		19)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	3,140,903,485	2,377,950,000	75,71
		20)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	2,297,623,300	1,477,307,000	64,30
		21)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	172,424,180,000	172,424,180,000	100,00
		22)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	437,537,560	410,869,000	93,90
		23)	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		24)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0,00
		25)	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0,00
		26)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0,00
		27)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0,00
		28)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0,00
		29)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0,00
		30)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0,00
		31)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0,00
		32)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0,00
		33)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0,00
		34)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, ekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0,00
		35)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0,00
		36)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00
		37)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	16,748,471,600	16,252,160,000	97,04

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		38)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0,00
		39)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00
		40)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0,00
		41)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0,00
		42)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3.770,288.000	1.443,030.300	38,27
JUMLAH INDIKATOR					257,729,038,749	249,803,939,550	96.93 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647			205,752,570,291	195,850,720,750	95.19 %
		1)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0,00
		2)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0,00
		3)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0,00
		4)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0,00
		5)	Pembangunan Laboratorium	Ruang	0	0	0,00
		6)	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0,00
		7)	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0,00
		8)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0,00
		9)	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0,00
		10)	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0,00
		11)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0,00

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		12)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	7,331,253,536	4,854,260,500	66.21
		13)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0.00
		14)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0.00
		15)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	0	0	0.00
		16)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0.00
		17)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0.00
		18)	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0.00
		19)	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0.00
		20)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0.00
		21)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	24,697,345,681	24,137,550,000	97.73
		22)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0.00
		23)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	13,285,743,648	13,285,743,648	88,20
		24)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0.00
		25)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	18,752,500,000	18,750,000,000	99,99
		26)	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0.00
		27)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	352.800.000	0	0,00

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		28)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	3,853,968,210	3,256,463,150	84,50
		29)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0,00
		30)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	3,951,451,920	683,947,300	17,31
		31)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	2,797,994,796	2,153,089,800	76,95
		32)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	111,267,760	111,267,760	100,00
		33)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0,00
		34)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0,00
		35)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0,00
		36)	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0,00
		37)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0,00
		38)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0,00
		39)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0,00
		40)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0,00
		41)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Dokumen	0	0	0,00

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Layanan di Bidang Pendidikan				
		42)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Doku men	0	0	0.00
		43)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komu nitas	0	0	0.00
		44)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegia tan	0	0	0.00
		45)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0.00
		46)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0.00
		47)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendi dikan	0	0	0.00
		48)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0.00
		49)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00
		50)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00
		51)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	19,461,752,500	19,030,250,000	97,78
		52)	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0.00
		53)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0.00
JUMLAH INDIKATOR					205,752,570,291	195,850,720,750	95.19 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			22,415,970,223	19,784,213,778	88.26 %
		1)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		2)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	19,030,250,000	0	0,00
		3)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0,00
		4)	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	0	0	0,00
		5)	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0,00
		6)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1,292,693,735	1,289,943,735	99,79
		7)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0,00
		8)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	0	0	0,00
		9)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	0	0	0,00
		10)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0,00
		11)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	2,893,442,738	2,351,521,398	81,27
		12)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	2,821,710,750	1,015,518,645	35,99
		13)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	12,811,930	12,811,930	100,00
		14)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	0	0	0,00
		15)	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0,00
		16)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0,00
		17)	Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Orang	0	0	0,00

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				
		18)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00
		19)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00
		20)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Doku men	0	0	0.00
		21)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Doku men	0	0	0.00
		22)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0.00
		23)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0.00
		24)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0.00
		25)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0.00
		26)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0.00
		27)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0.00
		28)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0.00
		29)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00
		30)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0.00
		31)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0.00

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		32)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0.00
		33)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00
		34)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00
		35)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2,396,193,000	2,315,300,000	96,62
		36)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0.00
JUMLAH INDIKATOR					22,415,970,223	19,784,213,778	88.26 %
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan K20240327112444				8,866,410,049	8,865,979,900	100.00 %
		1)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0.00
		2)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0.00
		3)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0.00
		4)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0.00
		5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0.00
		6)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1,081,860,049	1,081,429,900	99,96
		7)	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	7,784,550,000	7,784,550,000	100,00
		8)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Orang	0	0	0.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
		9)	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0.00
		10)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0.00
		11)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0.00
		12)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00
		13)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00
		14)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Doku men	0	0	0.00
		15)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Doku men	0	0	0.00
		16)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komu nitas	0	0	0.00
		17)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegia tan	0	0	0.00
		18)	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0.00
		19)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0.00
		20)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0.00
		21)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peser ta didik	0	0	0.00

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		22)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0.00
		23)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00
		24)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0.00
		25)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0.00
		26)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0.00
		27)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0.00
		28)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00
		29)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0.00
		30)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00
		31)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0.00
		32)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0.00
		33)	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0.00
		34)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0.00
		35)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0.00
		36)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0.00
JUMLAH INDIKATOR					8,866,410,049	8,865,979,900	100.00 %
JUMLAH PROGRAM					494,763,989,312	474,304,853,978	95.86 %

4.1.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.1.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pejabat Pimpinan Dinas	2	8
2	Pejabat Bidang Pendidikan PAUD & PNF serta Pendidikan Dasar	8	32
3	ASN Bidang PAUD & PNF serta Pendidikan Dasar	15	60
JUMLAH		25	100

4.1.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.1.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

No	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	Belum tersedia anggaran untuk bantuan Biaya Personal Peserta Didik PAUD yang kurang Mampu.	Pada APBD Tahun 2025, diusulkan kegiatan tersebut	Pendataan peserta didik Kesetaraan
2	Jumlah TK Negeri yang tersedia tidak sesuai dengan Jumlah Kecamatan	Penambahan Jumlah Sekolah TK untuk Negeri	Kordinasi dengan Brista dan Perkim

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh OPD Dinas Kesehatan Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.2.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2024 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.306	36.116	96,81%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	37.060	35.618	96,11%
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.623	34.840	97,80%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	185.978	183.188	98,50%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	109.748	86.312	78,65%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	1.630.971	1.236.076	75,79%
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	284.173	255.895	90,05%
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	482.112	313.265	64,98%
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	44.194	36.072	81,62%
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	3.481	3.310	95,09%
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	51.925	44.582	85,86%
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV	74.141	66.704	89,97%
Rata-rata				87,60%

4.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal
Urusan Kesehatan.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Kesehatan	1,005,216,324,112	12,52 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	13,460,521,293	1,34% dari Anggaran OPD

Tabel 4.2.3.a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal
Urusan Kesehatan.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
KOTA MEDAN		13,460,521,293	10,184,348,646	75,66
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13,460,521,293	10,184,348,646	75.66
1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	13,460,521,293	10,184,348,646	75.66
1.1.1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1,277,974,000	681,751,200	53.35
1.1.2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	303,809,000	27,226,000	8.96
1.1.3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	449,787,000	449,400,000	99.91
1.1.4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	1,501,387,193	1,300,844,496	86.64
1.1.5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,219,850,000	0	0,00
1.1.6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	619,200,000	291,900,000	47.14
1.1.7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	421,200,000	310,500,000	73.72
1.1.8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	0	0	0,00
1.1.9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	3,160,616,000	3,082,000,000	97.51
1.1.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	0	0	0,00
1.1.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,344,698,100	4,005,915,750	92.20
1.1.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	162,000,000	34,811,200	21.49
Jumlah		13,460,521,293	10,184,348,646	75.66

4.2.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan didukung oleh Sumber Daya

Manusia yaitu 1.781 personil. Personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

Tabel 4.2.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Kesehatan.

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	265
2	Dokter Gigi	102
3	Tenaga Perawat	542
4	Tenaga Kebidanan	378
5	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	115
6	Fisioterapis	4
7	Nutrisionis	71
8	Terapis Gigi dan Mulut	7
9	Rekam Medis	77
10	Radiografer	1
11	Sanitarian	53
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	3
13	Apoteker	54
14	Asisten Apoteker	89
Total		1.781

4.2.5. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi, baik dari sisi kebijakan, sistem, maupun implementasi di lapangan. Berikut beberapa masalah utama yang dapat ditemukan:

- 1) Keterbatasan Anggaran
- 2) Perhitungan Kebutuhan
- 3) Kekurangan Tenaga Administrasi

b. Solusi

Adapun aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), antara lain :

1. **Keterbatasan anggaran**
Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan cara Optimalisasi Anggaran, yaitu Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada dan memprioritaskan kebutuhan dasar dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Serta melakukan Pendanaan Bersama, yaitu Menjalin kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan sektor swasta dan lembaga donor untuk mendukung pendanaan.
- 2) **Perhitungan Kebutuhan**
Kebutuhan pemenuhan diklasifikasikan ke dalam jumlah penerima yang harus dilayani sesuai SPM, jumlah kebutuhan barang/jasa yang harus disediakan untuk memenuhi layanan, jumlah sarpras yang harus disediakan untuk memenuhi SPM, serta jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi SPM. Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumuskan strategi pemenuhan SPM. Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumuskan strategi pemenuhan SPM. Strategi pemenuhan pemerintah daerah perlu

menetapkan target tahunan yang memperlihatkan seberapa lama total kebutuhan pemenuhan SPM akan terpenuhi.

3) **Kekurangan Tenaga Administrasi**

Kekurangan tenaga administrasi menyebabkan tenaga medis seperti dokter dan perawat, harus menangani tugas administratif seperti pencatatan data pasien, pengelolaan rekam medis, dan pengisian laporan, selain dari tugas utama mereka dalam memberikan pelayanan medis. Hal ini mengurangi waktu yang dapat mereka alokasikan untuk merawat pasien dan dapat menurunkan kualitas pelayanan medis. Oleh karena itu perlu dilakukan perekrutan dan penambahan tenaga administrasi untuk ditugaskan di puskesmas dan rumah sakit.

4.3. **Urusan Pekerjaan Umum**

4.3.1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2. **Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2024 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umu.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Rumah Tangga/Warga yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	554.743	547.819	98.75 %
2	Rumah Tangga/KK yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak	554.743	533.550	96.18 %

4.3.3. **Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pekerjaan umum terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan

Pekerjaan Umum yaitu Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1,517,003,226,034	18,90 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	35,249,600,000	2,28% dari Anggaran OPD

Tabel 4.3.3.a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan & Pelaksanaan (Rp)	Serapan	
	KOTA MEDAN				35,249,600,000	27,123,719,100	98.20%
1	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				18,789,400,000	15,167,692,000	98.08%
	1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			18,789,400,000	15,167,692,000	98.08%
		1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dok.	100,000,000	---	---
		1.1.2	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	18,689,400,000	15,167,692,000	98.08%
2	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah				16,460,200,000	11,956,027,100	98.34%
	2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			16,460,200,000	11,956,027,100	98.34%

4.3.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum yaitu Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 414 orang yang terdiri dari 142 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 272 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yaitu 268 orang laki-laki dan 146 orang perempuan.

1. Komposisi Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2024

Tabel 4.3.4.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	11	5	16
2	Strata-1/D-4	40	29	69
3	D1-D3	2	2	4
4	SMA	36	14	50
5	SMP	1	-	1
6	SD	1	1	2
	Jumlah	91	51	142

2. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan tahun 2024

Tabel 4.3.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	-	-	-
2	Pembina TK I/IV-b	1	1	2
3	Pembina/IV-a	2	3	5
4	Penata TK. I/III-d	28	20	48
5	Penata/III-c	15	6	21
6	Penata Muda Tk. I/III-b	9	6	15
7	Penata Muda/III-a	13	5	18
8	Pengatur TK I/II-d	10	6	16
9	Pengatur/ II-c	11	3	14
10	Pengatur Muda TK I/II-b		-	-
11	Pengatur Muda / II-a		-	-
12	Juru Tk. I / I-d	2	1	3
13	PHL	177	95	272
	Jumlah	268	146	422

3. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan tahun 2024

Tabel 4.3.4.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu.

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	6	-	6
4	JFT	8	3	11
	Jumlah	18	4	22

4.3.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum.

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum adanya data yang valid terkait dengan jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan air minum yang layak/ yang belum terlayani air bersih	Perlu segera berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pendataan.
2	Penghitungan Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM perpipaan dan bukan perpipaan belum akurat	
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Debit Air yang kurang setelah pipa distribusi air bersih dan SR yang terpasang ▪ Adanya Penolakan oleh sebahagian masyarakat terkait dengan kegiatan pemasangan pipa distribusi air limbah dan SR 	Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut lagi mengenai pemasangan pipa distribusi air limbah dan sambungan rumah kepada masyarakat.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2024 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0%	0%
2	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemko Medan yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	0%	0%

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas merupakan indikator baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

4.4.3. Alokasi Anggaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 menyediakan anggaran untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 800.000.000,- namun tidak terealisasi karena tidak ada bencana sehingga Pemko Medan tidak melakukan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Sedangkan untuk kegiatan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Medan belum dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024. Anggaran terkait pelaksanaan SPM pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1,295,226,012,677	16,13 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	35,209,600,000	2,72% dari Anggaran OPD

Tabel 4.4.3. a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan & Pelaksanaan	Serapan
1	Program Pengembangan Perumahan				800,000,000	0 0.00%
	1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			800.000.000	
		1.1.1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	400.000.000	0.00%
		1.1.2	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	400.000.000	0.00%

4.4.4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan telah dibagi dan ditempatkan sesuai struktur organisasi, dengan jumlah personil 414 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun 2024 sebanyak 414 orang yang terdiri dari 142

orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 272 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) serta terdiri dari 268 orang laki-laki dan 146 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Komposisi Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2024

Tabel 4.4.4.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	11	5	16
2	Strata-1/D-4	40	29	69
3	D1-D3	2	2	4
4	SMA	36	14	50
5	SMP	1	-	1
6	SD	1	1	2
	Jumlah	91	51	142

2. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan tahun 2024

Tabel 4.4.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	-	-	-
2	Pembina TK I/IV-b	1	1	2
3	Pembina/IV-a	2	3	5
4	Penata TK. I/III-d	28	20	48
5	Penata/III-c	15	6	21
6	Penata Muda Tk. I/III-b	9	6	15
7	Penata Muda/III-a	13	5	18
8	Pengatur TK I/II-d	10	6	16
9	Pengatur/ II-c	11	3	14
10	Pengatur Muda TK I/II-b		-	-
11	Pengatur Muda / II-a		-	-
12	Juru Tk. I / I-d	2	1	3
13	PHL	177	95	272
	Jumlah	268	146	422

3. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan eselon dan jabatan pada tahun 2024

Tabel 4.4.4.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	6	-	6
4	JFT	8	3	11
	Jumlah	18	4	22

4.4.5. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terkait implementasi kebijakan SPM dan solusi yang dilakukan untuk mengatasinya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat.

No	Masalah	Solusi
1	Pada tahun 2024 ini di kota Medan tidak terjadi bencana sehingga untuk capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak dapat disajikan	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti BPBD dan Bappeda
2	Belum adanya kebijakan pemerintah Kota Medan untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan daerah sehingga baik perencanaan maupun realisasi belum ada	

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan beberapa indikator meliputi:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2024 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
A	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)-			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	80	80	100%
B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).			
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	-	-	-
2.1	Banjir	100%	100%	100%
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%
5	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	4,94%	4,94%
6	Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	4,94%	4,94%
7	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	29,43%	29,43%
8	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	2,74%	2,74%
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	0%	0%
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	0%	0%
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
C	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).			
1	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%	95,43%	95,43%
2	Waktu tanggap (<i>respons time</i>) penanganan kebakaran (menit)	15,00	13,10	100%

4.5.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Satpol PP	34,607,407,601	0,43 % dari APBD
	Berkaitan dengan SPM	29,618,914,641	85,59%
2	BPBD	24,480,394,306	0,30 % dari APBD
	Berkaitan dengan SPM	21,755,195,483	88,87%
3	Damkar	39,174,917,889	0,48 % dari APBD
	Berkaitan Penerapan SPM	32,517,819,019	83,01%

Tabel 4.5.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Rp)-

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).			
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.827.582.601	33.109.439.484	
1.1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.764.279.500	32.081.794.963	
1.2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	1.063.303.101	1.027.644.521	
B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).			
1	Program Penanggulangan Bencana	2.042.780.800	2.032.596.000	
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	675.844.400	674.880.000	
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.366.936.400	1.363.716.000	
1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	0	
C	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).			
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	11.891.581.105	11.638.878.945	98,78
1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.423.626.105	11.174.777.445	99,12
1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	467.955.000	464.098.500	92,71

4.5.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.5.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Persen
1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)-		
1.1	Personil Satpol-PP	684	100
a	PNS	59	
b	Non PNS/PHL	625	
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).		
2.1	Personil BPBD	123	100
a	PNS	38	
b	PHL	85	
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)-		
3.1	Personil DPKP	303	100
a	PNS	140	
b	Non PNS	163	
3.1	Personil DPKP	303	100

4.5.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas terkait menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.5.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat-

A Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)-		
No	Masalah	Solusi
1	Bahwa sampai dengan saat ini, Satpol-PP Kota Medan belum ada menerima pengajuan layanan kerugian materil maupun pengobatan dari warga negara yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Menyusun SOP, standar sarana dan prasarana, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota perlindungan masyarakat, standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
2	Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar.	Menyediakan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan
3	Sarana dan Prasarana Satpol-PP Kota Medan belum memenuhi standar sarana dan prasarana minimal (Permendagri 17 Tahun 2019) antara lain: Luas lahan efektif untuk parkir kendaraan, gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran, tempat upacara/ olah raga & Latihan Satpol PP yang kurang memadai.	Mengupayakan peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).
4	Anggota Satpol-PP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar ada 7 orang dan anggota yang berkualitas PPNS ada 8 orang.	Upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengumpulan data

B		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).		
No	Masalah	Solusi
1	Keterbatasan Sumber Daya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
2	Keterbatasan Koordinasi Pentaholix tentang Kebencanaan	Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi
3	Perubahan Iklim	Peningkatan Partisipasi Masyarakat
C		
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)-		
No	Masalah	Solusi
1	Pencapaian target SPM membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai meliputi jumlah pos maupun personil sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Penambahan sarana dan prasarana meliputi pos dan personil yang memadai sesuai amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota di Kota Medan

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Sosial merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

4.6.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2024 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.6.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

No	Jenis Indikator	Indikator SPM		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.381 orang	1.381 orang	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	541 orang	541 orang	100 %

No	Jenis Indikator	Indikator SPM		Capaian
		Target	Realisasi	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1.563 orang	1.563 orang	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	767 orang	767 orang	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota	20.689 orang	20.689 orang	100 %

4.6.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang sosial terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Sosial	14.082.019.879	0,16 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	14.082.019.879	100% dari Anggaran OPD

Tabel 4.6.3.a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial (Rp).

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.493.469.163	6.452.145.538
1.1	Pemberian alat bantu bagi orang dengan kecacatan	519.700.000	242.700.000
A	Penyediaan Permakanan	212.500.000	-
B	Penyediaan Paket Sandang	200.000.000	198.912.000
1.2.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	7.856.119.163	3.620.003.260
1.3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.705.150.000	2.390.530.278
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.588.550.716	2.107.526.600
2.1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab / kota	1.890.025.716	1.734.936.600
A	Penyediaan Permakanan	612.971.800	525.675.000
B	Penyediaan Sandang	200.000.000	197.757.600
C	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	1.077.053.916	1.011.561.000
2.2	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab / kota	698.525.000	372.590.000
A	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksaaan Kampung Siaga Bencana	242.525.000	-
B	Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Tugas TAGANA	456.000.000	372.590.000
	JUMLAH	14.082.019.879	8.559.672.138

4.6.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan

Sosial yaitu Dinas Sosial Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.6.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Sosial.

NO	KETERANGAN	JUMLAH ORANG	
		PNS	Non PNS
1	PEGAWAI DINAS SOSIAL		
1.1	ASN	42	
1.2	PHL		71
1.3	PKH		186
1.4	TKSK		21
1.5	PEKSOS		4
1.6	Pendamping Lansia		-
1.7	Pendamping Disabilitas		-
1.8	TAGANA		40
2	PEGAWAI BERKAITAN PENERAPAN SPM		
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti		
2.1.1	URC		15
2.1.2	PEKSOS		4
2.1.3	Pendamping Lansia		-
2.1.4	Pendamping Disabilitas		-
2.1.5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial/ TAGANA.		40

4.6.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial.

No	Permasalahan	Solusi
1	Keterbatasan anggaran	Meningkatkan alokasi anggaran pada sektor SPM
2	Kurangnya kapasitas SDM	Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang menjadi prioritas SPM
3	Kurangnya koordinasi antar lintas bidang	Adanya focal point disetiap bidang pengampu SPM sehingga memudahkan pengolahan data dan melakukan monitoring/ evaluasi melalui rapat yang dilakukan per triwulan untuk bidang pengampu SPM
4	Minimnya pemahaman tentang SPM	Perlu dilakukan bimtek SPM, khususnya bidang yang mengampu urusan SPM Sosial

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun 2024 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini menyajikan berdasarkan prinsip: transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kota selama tahun anggaran 2024 dengan situasi dan kondisi yang cukup dinamis. Di samping itu, penyusunannya juga merupakan implementasi pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan di masa yang akan datang, guna memperkuat implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024, pada dasarnya menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup: (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup; (i) capaian kinerja makro; (ii) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan (iii) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal. Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa capaian kinerja makro pembangunan kota relatif cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin membaiknya berbagai indikator kinerja makro selama tahun 2024, seperti: indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan.

Demikian juga capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup: indikator kinerja kunci keluaran atau output, indikator kinerja hasil atau outcome dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dapat dikatakan relatif cukup berhasil. Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut ditandai dengan membaiknya berbagai Indikator Kinerja Kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan serta capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagaimana telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja tersebut merupakan wujud dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota secara konsisten dan berkelanjutan serta kontribusi dari pemangku kepentingan dalam membangun Kota Medan.

Di samping keberhasilan tersebut, tidak dapat dipungkiri masih terdapat capaian kinerja yang secara relatif kurang menggembirakan seperti terlihat pada angka

pengangguran dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) yang secara relatif belum dapat sepenuhnya diturunkan secara signifikan. Hal tersebut tentunya tidak disebabkan kurangnya perhatian Pemerintah Kota dalam mengatasinya, tetapi lebih dikarenakan keterbatasan sumber daya pembangunan yang tersedia yang dapat dikelola selama tahun anggaran 2024.

Pemerintah Kota juga menyadari selain tantangan yang disebutkan di atas, masih terdapat kekurangan dan kendala selama periode tahun anggaran 2024 terutama dalam pelaksanaan asas-asas *good governance* melalui *monitoring* dan evaluasi secara terus menerus. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Medan tidak menutup diri terhadap saran dan kritik yang konstruktif dalam membuat Kota Medan menjadi "*Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif*".

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan pembangunan kota yang secara nyata telah berkontribusi besar terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan selama tahun anggaran 2024, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Pusat atas dukungan terhadap pembangunan kota selama ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2025





#KOLABORASI
#MEDAN BERKAH

